



# LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Garut dapat menyusun dan menerbitkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2022 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berkelanjutan sesuai kewenangan yang ada.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 dilakukan atas dasar penilaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022.

Secara umum, Capaian Kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pemangku Kepentingan Pembangunan dalam Perumusan Kebijakan, Implementasi serta Pengawasannya. Namun, disadari masih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang belum tercapai, sehingga melalui laporan ini dapat menjadi media evaluasi dan alat kendali untuk peningkatan kinerja kedepan agar menjadi lebih produktif, efektif dan efisien.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi pencapaian kinerja maupun pendorong peningkatan kinerja.

Garut, 30 Maret 2023

**BUPATI GARUT,**

  
**Dr. H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP.**



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Patriot No. 3 Telp / Fax (0262) 233882 Garut  
Email :inspektoratkabupatengarut@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT TAHUN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk tahun 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



**Drs. TONI TISNA SOMANTRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640215 199203 1 005



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**

# Ringkasan Eksekutif

## *Executive Summary*

Upaya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut secara berkesinambungan terus dilakukan dalam mendorong tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, sehingga diharapkan program dan kegiatan pembangunan terarah mendukung pencapaian Visi :

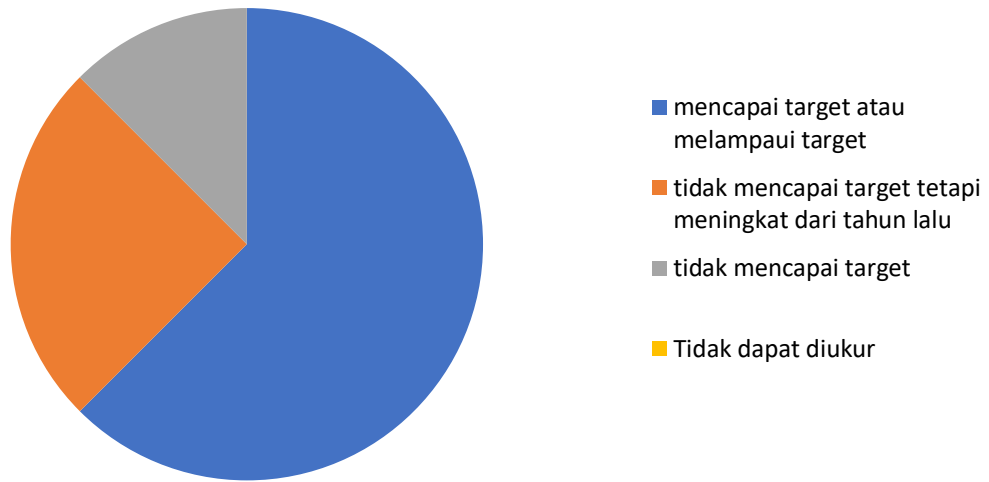
### **Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera**

Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa sasaran dan indikator kinerja utama yang ada dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu 24 indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan menginformasikan keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis untuk menjadi umpan balik peningkatan kinerja di masa mendatang.

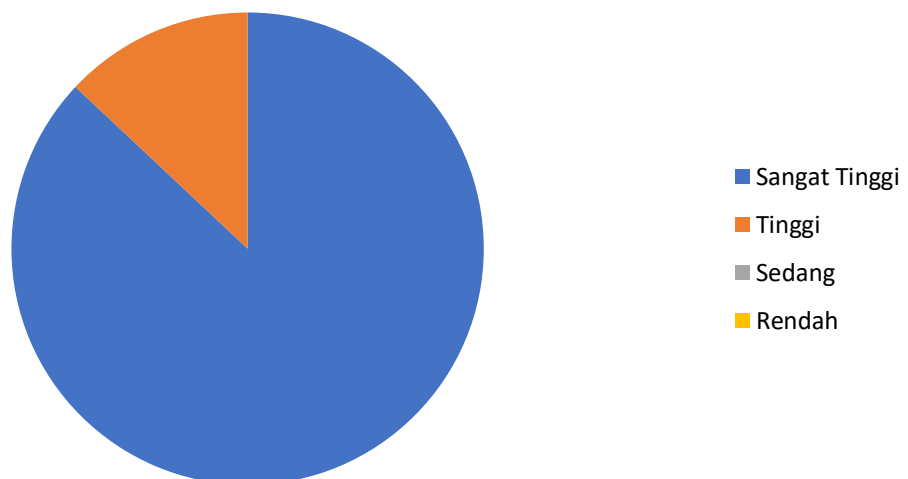
Hasil Pengukuran kinerja tujuan dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terhadap 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengukur realisasi pencapaian kinerja Indikator Makro pembangunan tahun 2022 dibandingkan dengan target keberhasilan dari sebanyak 8 ukuran keberhasilan (indikator) yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan **menunjukkan 5 indikator (62,5%) mencapai target atau melampaui target, 2 indikator (25%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari tahun lalu, 1 indikator (12,5%) tidak mencapai target.**

## Tingkat Ketercapaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2022



Dari sisi gradasi nilai (skala intensitas) kinerja indikator makro tujuan yang ditargetkan pada tahun 2022 **Sebanyak 7 indikator (87%) berada dalam skala nilai Sangat Tinggi**, **Sebanyak 1 indikator (13%) berada dalam skala nilai Tinggi**.

## Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan 2022



Pengukuran kinerja tujuan dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terhadap 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengukur realisasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan tahun 2022 dibandingkan dengan target keberhasilan dari sebanyak 8 ukuran keberhasilan (indikator) yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.



**Sebanyak 8 indikator (72,73%) mencapai atau melampaui target, Sebanyak 3 indikator (27,27%) tidak mencapai target tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, Sebanyak 0 indikator (0%) tidak mencapai target, Sebanyak 0 indikator (0%) belum tersedia.**



Dari sisi gradasi nilai (skala intensitas) kinerja indikator target kinerja tujuan yang ditargetkan pada tahun 2022 menunjukkan hasil **Sebanyak 10 indikator (91%) berada dalam skala nilai Sangat Tinggi, Sebanyak 1 indikator (9%) berada dalam skala nilai Tinggi, Sebanyak 0 indikator (0%) berada dalam skala nilai Sangat Rendah, Sebanyak 0 indikator (0%) tidak dapat diukur.**

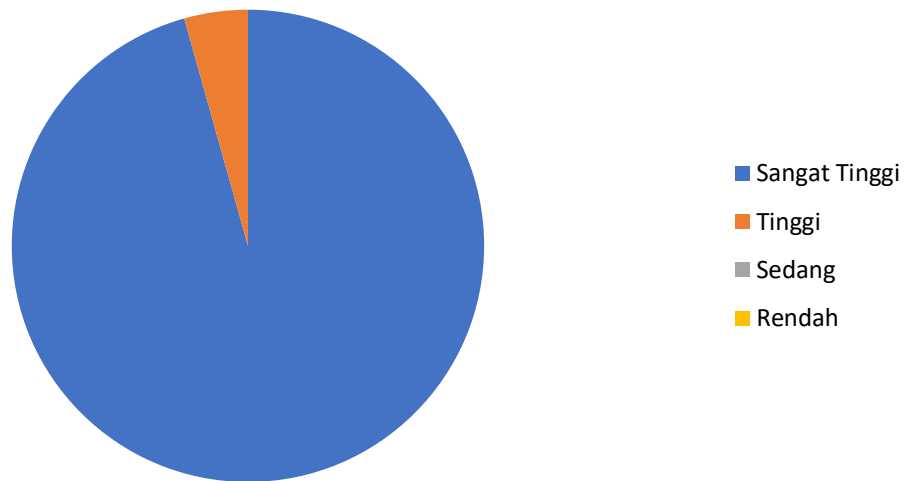


Pengukuran Kinerja Tahun 2022 terhadap 17 Sasaran Strategis dengan menggunakan 23 indikator yang ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, menunjukkan sebanyak **15 indikator (65,22%) mencapai atau melampaui target**, **sebanyak 7 indikator (30,43%) tidak mencapai target tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu**, **sebanyak 1 indikator (4,35%) tidak mencapai target**, **dan sebanyak 0 indikator (0%) tidak dapat diukur**.



Skala intensitas ketercapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, menunjukkan **sebanyak 22 indikator (95,65%) dalam skala nilai Sangat Tinggi**, **1 indikator (4,35%) dalam skala nilai Tinggi**, **0 indikator (0%) dalam skala nilai Sedang**, **0 indikator (0%) dalam skala nilai Rendah**, **0 indikator (0%) tidak dapat diukur**.

## Skala Intensitas Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022



Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan, sehingga menjadi bahan evaluasi yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih produktif, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tersebut, didukung pula dengan adanya alokasi Tahun Anggaran 2022, Belanja dianggarkan sebesar Rp 4.901.034.700.924,00 dan realisasinya sebesar Rp 4.676.257.530.686,00 atau 95,41%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar Rp 4.938.938.117.892,00 dan realisasinya sebesar Rp 4.649.602.155.581,00 atau 94,14%. yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2022 antara lain masih rendahnya kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk dapat mewujudkan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan masih perlunya penajaman penetapan program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan keterpaduan perencanaan (integrated development plan) untuk mewujudkan prioritas pembangunan.

Di tengah permasalahan masih rendahnya kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk dapat mewujudkan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu: "Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera", maka kedepan diupayakan dapat menghasilkan

prioritas kegiatan yang berkualitas yang diarahkan pada 4 (empat) pilar tujuan pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta sukses pelayanan dan pemerintahan umum, melalui pelayanan aparatur yang profesional, santun dan amanah dengan bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pendorong peningkatan kinerja di masa mendatang yang disertai dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dari seluruh *stakeholder* dalam upaya ***Mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.***



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-BAB I</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Garut .....	3
A. Tugas dan Fungsi .....	3
B. Struktur Organisasi .....	8
1.4 Gambaran Umum Daerah.....	11
A. Data Kegawaian .....	12
B. Isu Strategis .....	12
1.5 Dasar Hukum.....	16
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>1-BAB II</b>
2.1 Rencana Strategis .....	2
A. Visi Pemerintah Kabupaten Garut.....	3
B. Misi Pemerintah Kabupaten Garut .....	3
C. Tujuan serta Sasaran Strategis Sebelum dan Setelah Reviu.....	4
2.2 Indikator Kinerja Pembangunan.....	12
A. Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan .....	12
B. Indikator Kinerja Utama .....	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>2</b>
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut .....	3
A. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan.....	3
B. Pencapaian Kinerja Tujuan .....	29
C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis .....	31
D. Capaian Prestasi dan Penghargaan .....	97

E. Evaluasi Internal Terkait Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut.....	101
F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 .....	106
3.2 Realisasi Anggaran .....	109
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>1</b>

**LAMPIRAN**

## Daftar Tabel, Gambar dan Lampiran

Halaman

### Daftar Tabel

#### BAB II

(Dimulai dari hal 1)

Tabel 2.1	Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan	5
Tabel 2.2	Tujuan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024	12
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Garut Tahun 2022	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022	18

#### BAB III

(Dimulai dari hal 1)

### Daftar Tabel

Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	3
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tujuan Tahun 2022	5
Tabel 3.3	Indeks Pembangunan Manusia	6
Tabel 3.4	Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2022	7
Tabel 3.5	Pencapaian Misi Ke 2	9
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017-2022	9
Tabel 3.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022	11
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi	12
Tabel 3.9	Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2024	12
Tabel 3.10	Pengukuran Persentase Penduduk Miskin	15
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2017-2024	15



Tabel 3.12	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2017-2022	16
Tabel 3.13	Pendatan Per Kapitan	19
Tabel 3.14	Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut Tahun 2017-2022	20
Tabel 3.15	Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022	21
Tabel 3.16	Tingkat Pengangguran Terbuka	22
Tabel 3.17	Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Garut Tahun 2017-2022	22
Tabel 3.18	Indeks Gini	24
Tabel 3.19	Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Indeks Gini Tahun 2017-2024	25
Tabel 3.20	Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Inflasi	27
Tabel 3.21	Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Inflasi Tahun 2017-2024	27
Tabel 3.22	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya Bulan Desember 2022 di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional	28
Tabel 3.23	Pengukuran Kinerja Tujuan Tahun 2022	31
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022	32
Tabel 3.25	Pencapaian Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat	38
Tabel 3.26	Nilai IKS Berdasarkan Masing-Masing Dimensi	38
Tabel 3.27	Pengukuran Sasaran Strategis 1.2	40
Tabel 3.28	Target dan Realisasi serta Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Garut Tahun 2017-2024	41
Tabel 3.29	Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	42
Tabel 3.30	Pengukuran Sasaran Strategis 3	44
Tabel 3.31	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Garut, Jawa Baray dan Nasional Tahun	45

2017-2022

Tabel 3.32	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	47
Tabel 3.33	Pengukuran Strategis 1.4	50
Tabel 3.34	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2017-2022	50
Tabel 3.35	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2017-2024	51
Tabel 3.36	Target dan Realisasi Serta Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2023	54
Tabel 3.37	Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Garut Tahun 2017-2022	54
Tabel 3.38	Pengukuran Sasaran Strategis 1.5	57
Tabel 3.39	Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2017-2022 Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)	57
Tabel 3.40	Pengukuran Sasaran Strategis 2.1	62
Tabel 3.41	Pengukuran Sasaran Strategis 2.2	63
Tabel 3.42	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2021	64
Tabel 3.43	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Garut Tahun 2022	66
Tabel 3.44	Pengukuran Strategis 3.1	70
Tabel 3.45	Kondisi Jalan Kabupaten Garut 2019-2022	70
Tabel 3.46	Pengukuran Sasaran Strategis 3.2	73
Tabel 3.47	Pengukuran Sasaran Strategis 3.3	74
Tabel 3.48	Kinerja Cakupan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2018-2022	74
Tabel 3.49	Pencapaian Sasaran Strategis 4	76
Tabel 3.50	Faktor Peningkatan Luas Kawasan Permukiman Layak Huni	77
Tabel 3.51	Pengukuran Sasaran Strategis 3.5	78
Tabel 3.52	Luas Areal Irigasi Yang Terlayani	79
Tabel 3.53	Pencapaian Sasaran Strategis ke 6	82

Tabel 3.54	Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022	83
Tabel 3.55	Indeks Kualitas Air Tahun 2022	84
Tabel 3.56	Indeks Kualitas Udara Tahun 2022	84
Tabel 3.57	Indeks Vegetasi Tutupan Lahan	84
Tabel 3.58	Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7	85
Tabel 3.59	Pencapaian Sasaran Strategis 1 Pada Misi 4	89
Tabel 3.60	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Garut Tahun 2021 s.d. Tahun 2022	90
Tabel 3.61	Pencapaian Sasaran Strategis 2 Pada Misi 4	91
Tabel 3.62	Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022	91
Tabel 3.63	Pencapaian Sasaran Strategis 3 Pada Misi 4	94
Tabel 3.64	Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2020-2022	94
Tabel 3.65	Data Jumlah Penerbitan Perizinan di Kabupaten Garut Tahun 2020-2022	96
Tabel 3.66	Capaian Prestasi dan Penghargaan	98
Tabel 3.67	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	107
Tabel 3.68	Alokasi dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Tahun 2022	109
Tabel 3.69	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022	109
Tabel 3.70	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	112

Halaman

### **Daftar Gambar**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	11
Gambar 1.2	Profil PNS Pemda Kab. Garut	12

### Bab II

(Dimulai dari hal 1)

Gambar 2.1	Ringkasan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024	2
Gambar 2.2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut	4
Bab III		
(Dimulai dari hal 1)		
Gambar 3.1	Ringkasan Pencapaian Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2022	4
Gambar 3.2	Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Tahun 2022	5
Gambar 3.3	IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2022	7
Gambar 3.4	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	8
Gambar 3.5	Jumlah penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 (Ribuan Jiwa)	10
Gambar 3.6	LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	13
Gambar 3.7	Peringkat Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2022	13
Gambar 3.8	Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2022	14
Gambar 3.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut-Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	16
Gambar 3.10	Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Garut dengan rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022	17
Gambar 3.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	18
Gambar 3.12	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	19
Gambar 3.13	Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	20
Gambar 3.14	Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	21
Gambar 3.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut,	23

## Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022

Gambar 3.16	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	23
Gambar 3.17	Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	25
Gambar 3.18	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	26
Gambar 3.19	Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	28
Gambar 3.20	Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Tujuan Tahun 2022	30
Gambar 3.21	Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2022	31
Gambar 3.22	Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	33
Gambar 3.23	Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	34
Gambar 3.24	Nilai IKS Garut dan Nasional	39
Gambar 3.25	Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	41
Gambar 3.26	Perbandingan AHH Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	41
Gambar 3.27	RLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	45
Gambar 2.28	Perbandingan RLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	46
Gambar 3.29	HLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	48
Gambar 3.30	Perbandingan HLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	48
Gambar 3.31	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut-Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	52
Gambar 3.32	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	55
Gambar 3.33	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	55

Gambar 3.34	Jumlah penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 (Ribu Jiwa)	58
Gambar 3.35	Nilai IKM Kabupaten Garut Tahun 2022	62
Gambar 3.36	Kondisi Jalan Kabupaten 2019-2022	71
Gambar 3.37	Kinerja Cakupan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2018-2022	74
Gambar 3.38	Salah Satu Contoh Pembangunan Drainase Taman Kota (ujung merdeka) Kec. Tarogong Kidul	81
Gambar 3. 39	Perbandingan IKLH Garut dan Nasional	83
Gambar 3.40	Peta Indeks Bahaya Multi Bencana Kabupaten Garut	86
Gambar 3.41	Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	92
Gambar 3.42	Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	92



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat yang diperlukan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas merupakan suatu keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemberi amanat dan pemilik kekuasaan serta kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna serta berhasil guna. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.





Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, disusun suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan SAKIP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan di atas, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai media pertanggungjawaban mengenai hasil kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Garut menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Garut bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun 2022.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) guna



mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai media untuk mendapatkan masukan *stakeholder* dengan memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Garut. Melalui identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Sehingga Laporan Kinerja dapat menjadi proses evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik.

### **1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Garut**

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Kepala daerah mempunyai tugas :



- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Daerah dalam:
  1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  2. mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
  3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan



4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten, kelurahan dan/atau Desa bagi wakil bupati;
- b. memberikan saran dan pertimbangan Kepada Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Tahun 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Klasifikasi



Urusan Pemerintahan terdiri atas **urusan pemerintahan absolut** yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, **urusan pemerintahan konkuren** yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dan **urusan pemerintahan umum** yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam rangka pembangunan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar** meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar** meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;



- 
- m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.

**Urusan Pemerintahan Pilihan** yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Diantara urusan-urusan yang dibagi tersebut, yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota antara lain:

- a. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya;
- b. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi;



- c. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud;
- d. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## **B. Struktur Organisasi**

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta perangkat daerah lainnya khusus untuk Lingkup Sekretariat Daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perbup Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati.
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum;
  - c. Bagian Kerjasama;
  - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:



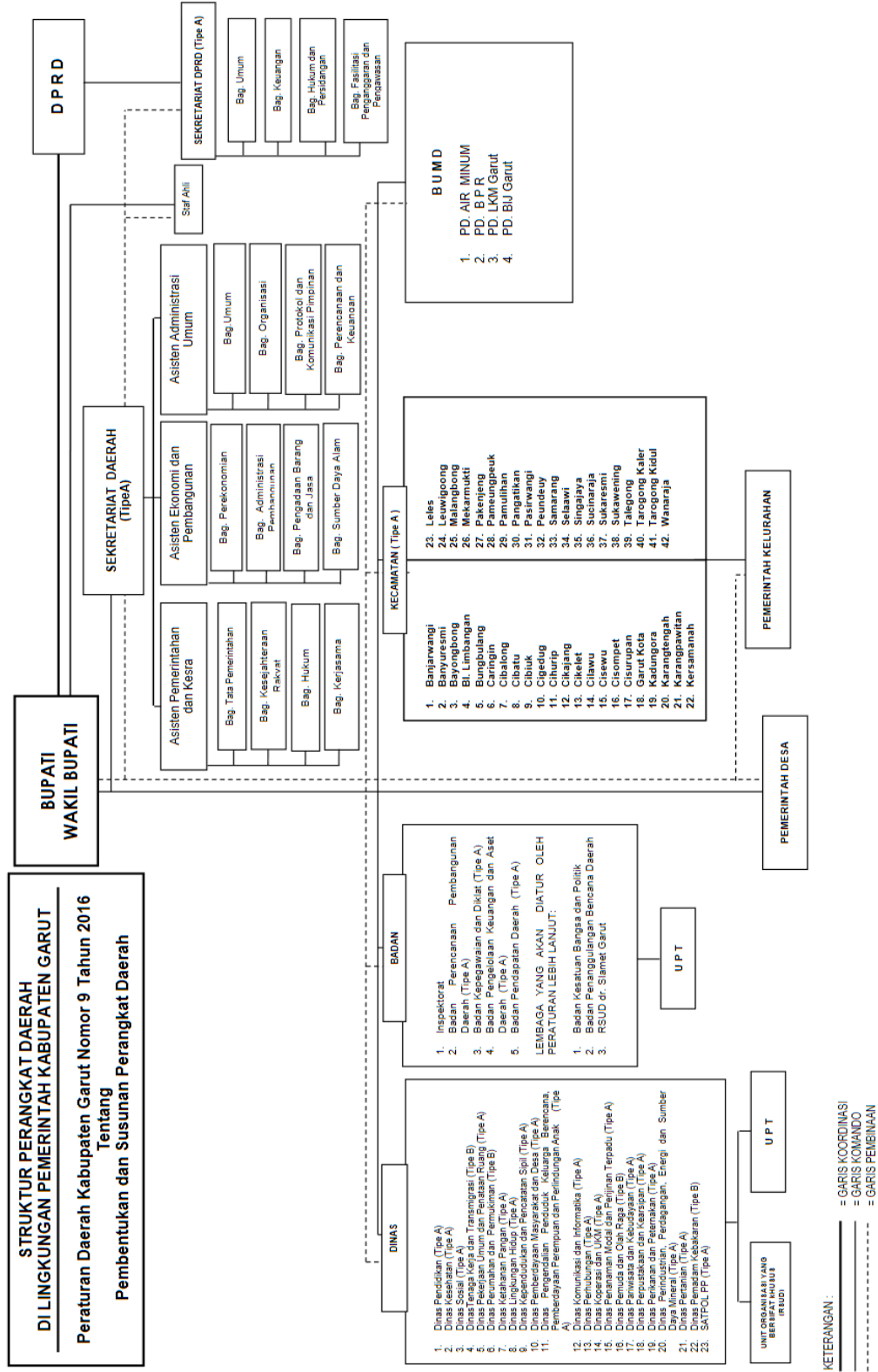
- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - b. Bagian Perekonomian;
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Bagian Sumber Daya Alam
5. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Bagian Umum;
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  - d. Bagian Organisasi.
6. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 4 (empat) Badan dan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian dan Diklat;
  - c. Badan Pendapatan Daerah;
  - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet.
7. Dinas Daerah terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Dinas Sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - g. Dinas Ketahanan Pangan;
  - h. Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Koperasi dan UKM;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;





- p. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - s. Dinas Perikanan dan Peternakan;
  - t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - u. Dinas Pertanian;
  - v. Dinas Pemadam Kebakaran.
8. Inspektorat Kabupaten Garut merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
  9. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut adalah perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
  12. Kecamatan.
  13. Kelurahan.

### 1.4 Gambaran Umum Daerah



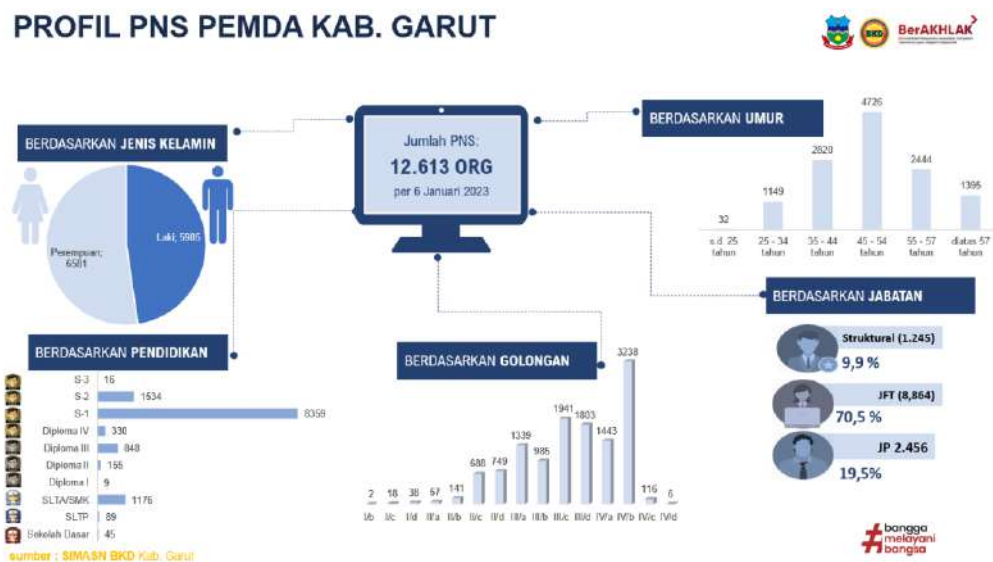
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

## A. Data Kepegawaian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2022 sebanyak 12.613 orang. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebanyak 1.153 orang dibanding kondisi tahun 2021 sebanyak 13.766 orang. Dari sisi ketersediaan Aparatur Sipil Negara terhadap jumlah penduduk, maka indikator rasio ketersediaan PNS per 1.000 penduduk sebagai salah satu indikator dalam pelayanan publik, adalah sebesar rata-rata 13 orang PNS melayani 1.000 penduduk.

**Gambar 1.2**  
**PROFIL PNS PEMDA KAB. GARUT**



Sumber: SIMASN BKD Garut

## B. Isu Strategis

Perumusan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023, diantaranya disusun berdasarkan Program Prioritas 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil



---

Bupati Garut pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024 meliputi hal berikut:

1. Mewujudkan masyarakat bertaqwa:
  - a. 25 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana 5000 masjid
  - b. 15 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana pesantren salafiah
  - c. Meningkatkan alokasi insentif guru ngaji dari 2,4 milyar menjadi 5 milyar
  - d. Peningkatan kualitas manajemen masjid
  - e. Membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
  - f. Optimalisasi peran Lembaga Pendidikan keagamaan
  - g. Optimalisasi gerakan "maghrib mengaji"
2. Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah:
  - a. Mudah, cepat dan tuntas dalam segala bentuk pelayanan publik
  - b. Pembinaan dan Pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan amanah
  - c. Mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel
3. Menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata:
  - a. Menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya
  - b. Membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan
  - c. Menuntaskan pembangunan dan renovasi Gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi:
  - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur Pendidikan
  - b. Bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya



- c. Menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional
  - d. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW
  - e. Penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau:
- a. Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama
  - b. Penambahan kuota jaminan kesehatan
  - c. Pembinaan mental tenaga kesehatan yang profesional
  - d. Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas
6. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal:
- a. Pembentukan destinasi wisata sampai tingkat desa/ kelurahan
  - b. Membangun kemitraan dalam pengelolaan lahan pemerintah
  - c. Pembangunan infrastruktur jalan ke lahan pertanian
  - d. Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak
  - e. Mendorong kemandirian Bumdes
  - f. Bantuan modal kepada kelompok usaha kecil dan mikro
7. Pelestarian lingkungan hidup:
- a. Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan masyarakat
  - b. Menambah hutan kota dan taman kota
  - c. Melanjutkan program "kota tanpa kumuh"
  - d. Menciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah
  - e. Bantuan renovasi 15.000 rumah tidak layak huni
8. Pemberdayaan peran serta perempuan dalam pembangunan :
- a. Peningkatan bantuan modal kepada kelompok usaha yang berbasis kaum perempuan



- b. Pembinaan kader posyandu
- c. Mewujudkan ketahanan keluarga untuk meningkatkan peran perempuan

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, isu yang sedang berkembang saat ini seperti penanganan Covid-19, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19.
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan (terutama terkait penanganan Covid-19), pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dalam menunjang percepatan pemulihan ekonomi dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik.
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.



---

Berdasarkan 8 (delapan) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut tahun 2023 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Secara umum, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka kebijakan umum pembangunan kedepan diarahkan pada :

1. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing.
3. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah.
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram.

## **1.5 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 233 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 233);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 120);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 208 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 208).





## 1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### Ringkasan Eksekutif

- Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

### Bab I Pendahuluan

- Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar hukum, Tugas fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Garut, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020.

### Bab II Perencanaan Kinerja

- Menguraikan tentang aspek Rencana Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024 yaitu visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

- Menguraikan capaian kinerja organisasi meliputi pencapaian kinerja sasaran, pencapaian kinerja tujuan, pencapaian kinerja lainnya, dan capaian realisasi anggaran.

### Bab IV Penutup

- Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja, langkah perbaikan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian kinerja Tahun 2021 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA



### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, sebagai tahap yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah; ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks provinsi maupun nasional; fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 tersebut, kemudian menjadi dokumen acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD dan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut.

Dalam rangka mendorong penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka Pemerintah Kabupaten Garut periode 2019-2024 telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja untuk mencapai *core area* prestasi sebagai ukuran pencapaian visi Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera sebagaimana disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Ringkasan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

## A. Visi Pemerintah Kabupaten Garut

Visi Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2019 – 2024 adalah:



Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara



berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

## **B. Misi Pemerintah Kabupaten Garut**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## **C. Tujuan serta Sasaran Strategis Sebelum dan Setelah Reviu**

Tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2022 disusun mengacu RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Menindaklanjuti

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa sasaran dan indikator kinerja utama pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu 17 sasaran dan indikator kinerja sasaran sebanyak 34, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan indikator kinerja utama menjadi 24 indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.



**Gambar 2.2 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut**

Berikut pada tabel 2.1 disajikan mengenai hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan sebelum dan sesudah reviu berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.



**Tabel 2.1**  
**Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2023	TARGET 2024	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2020	2021	2022				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA										
Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya										
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik		
		2. Indeks Kesehatan	Poin	79,09	79,37	79,77	79,83 - 80,03			
		3. Indeks Pendidikan	Poin	58,15	58,52	58,85	60,46 - 62,35			
		4. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	262,78	281,4	276,67	209,17-212,17			
		5. Persentase penduduk bekerja	%	91,04	91,32	n/a	92,49-92,69			
	1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	Baik	Baik	Baik		Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
									Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
									Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
									Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2023	TARGET 2024	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2020	2021	2022				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	1.1.2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,41	71,59	71,85	71,89-72,02	72,03 - 72,1	Kesehatan	Dinas Kesehatan
										RSUD dr. Slamet
	1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,52	7,53	7,83	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,91	12,03	12,15	12,07 - 12,15	12,13 12,21	Perpustakaan	Dispusip
	1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1. Persentase penduduk miskin	%	9,98	10,65	10,42	7,66 - 7,77	6,92 - 7,03	Sosial	Dinas Sosial
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96	8,68	7,6	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61	Tenaga Kerja	Disnakertrans
	1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	0,56	0,86	1,1	1,1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP2KBP3A
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih										
2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	BB			
	2.1.1. Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah





TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN (4)	REALISASI			TARGET 2023 (8)	TARGET 2024 (9)	BIDANG URUSAN (10)	PERANGKAT DAERAH (11)
				2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)				
dalam pelayanan public	yang profesional dan amanah								Pemerintahan Umum	Kecamatan
									Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
									Penanaman Modal	DPMPT
									Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran
	2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	B	B	B	A	A	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
									Statistik	
									Persandian	
									Pertanahan	Disperkim
									Pembinaan dan Pengawasan	Inspektorat
									Pengelolaan Keuangan	BPKAD Bapenda
2. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB	A	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah	
								Perencanaan	Bappeda	



TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN (4)	REALISASI			TARGET 2023 (8)	TARGET 2024 (9)	BIDANG URUSAN (10)	PERANGKAT DAERAH (11)
				2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)				
		3. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
									Kearsipan	Dispusip
									Penelitian dan Pengembangan	Bappeda
									Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian dan Diklat
									Pemerintahan Umum	Kecamatan
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang										
3.1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas		1. Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	80,86	77,19	77,48	79,33	81,05		
	3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	Persentase kemandirian jalan	%	n/a	49,92	51,42	55,27	57,92	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
									Perhubungan	Dinas Perhubungan
	3.1.2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	92,4	100	100	100	100	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindag dan ESDM
									Pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD



TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN (4)	REALISASI			TARGET 2023 (8)	TARGET 2024 (9)	BIDANG URUSAN (10)	PERANGKAT DAERAH (11)
				2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)				
	3.1.3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Cakupan air minum layak	%	84,16	86,96	88,51	90,04	90,74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		2. Cakupan sanitasi layak	%	70,76	67,2	67,69	68,11	68,53		
	3.1.4. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	n/a	6.727	6.825	6.784	6.894	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Disperkim
	3.1.5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1. Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	%	n/a	81,89	82,7	84,40	88,04	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		2. Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	70	60	25	0		
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,22	67,82	69,25	60,75	63,21		
		2. Indeks Risiko Bencana	Poin	205,52	185	164,91	197	194		
	3.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,22	67,82	69,25	60,75	63,21	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	3.2.2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	205,52	185	164,91	197	194	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	BPBD



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2023	TARGET 2024	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2020	2021	2022				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Masyarakat	
									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan										
4.1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,26	3,58	5,08	4,59 - 5,51	4,87-5,57		
		2. Indeks Daya Beli	Poin	62,84	63,17	64,17	66,96 - 67,63	68,45 - 69,09		
	4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	78,6	79,7	83,1	81	82	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
									Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	Juta Rp	22,04	23,356	25,346	24,33-24,49	25,43 - 25,61	Pertanian	Dinas Pertanian
										Dinas Perikanan dan Peternakan
									Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Peternakan
									Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
								Kebudayaan		
								Perindustrian	Disperindag dan ESDM	
								Perdagangan		



TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN (4)	REALISASI			TARGET 2023 (8)	TARGET 2024 (9)	BIDANG URUSAN (10)	PERANGKAT DAERAH (11)
				2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)				
									Koperasi, UKM	Dinas Koperasi UKM
	4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,113	1,29	1,165	2,12-2,13	1,52 - 1,53	Penanaman Modal	DPMPT

## 2.2 Indikator Kinerja Pembangunan

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terdiri dari **Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan Daerah** serta **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai salah satu ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024.

### A. Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan

Indikator kinerja tujuan pembangunan daerah merupakan suatu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan secara makro dari visi dan misi dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 telah menetapkan 5 (empat) tujuan dengan sebanyak 13 indikator tujuan yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan, disertai dengan target keberhasilan kerjanya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berikut pada tabel 2.2 disajikan 5 (lima) tujuan pembangunan untuk setiap misi RPJMD, beserta uraian indikator makro ukuran keberhasilan (indikator) serta target keberhasilan kinerja makro pembangunan tahun 2019-2024 berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2019-2024.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Misi	TUJUAN	INDIKATOR MAKRO	Target Perubahan 2022		
<b>Misi 1</b>					
Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya	1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1	Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat	Baik
			2	Indeks Kesehatan	79,72
			3	Indeks Pendidikan	60,075
			4	Jumlah Penduduk Miskin	229,17
			5	Persentase Penduduk Bekerja	91,69
<b>Misi 2</b>					
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah	2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta	1	Indeks Reformasi Birokrasi	B



Misi	TUJUAN	INDIKATOR MAKRO		Target Perubahan 2022	
Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	profesionalisme pelayanan publik				
<b>Misi 3</b>					
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang	3	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1	Indeks Daya Saing Infrastruktur	87,99%
	4	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,18%
			2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	200
<b>Misi 4</b>					
Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dan industri yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	5	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,855
			2	Indeks Daya Beli	65,745

Sumber : Perbup Nomor 9 Tahun 2022 tentang RPJMD Tahun 2019-2024

**B. Indikator Kinerja Utama (IKU)****Tabel 2.3****INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019–2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.</b>					
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	indeks kesalehan sosial masyarakat	kategori	hasil survei indeks kesalihan sosial dengan kategori baik (skor>60) dan kurang (skor<60). Ditetapkan dengan 10 (sepuluh) Indikator: 1. memberi; 2. peduli; 3. menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan; 4. tidak memaksakan nilai; 5. tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda; 6. keterlibatan dalam demokrasi; 7. Keterlibatan dalam perbaikan kinerja pemerintahan ( <i>Good governance</i> ); 8. mencegah kekerasan, 9. konservasi lingkungan, dan 10. restorasi lingkungan. Sumber: kajian indeks kesalehan masyarakat – KEMENAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Daerah</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>• Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>
2.	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	angka harapan hidup	tahun	rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang hingga akhir hayatnya. Sumber Data BPS	Dinas Kesehatan
3.	meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	a. rata-rata lama sekolah	tahun	kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan





		b.harapan lama sekolah	tahun	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	Dinas Pendidikan
4.	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	persentase penduduk miskin	%	(jumlah Penduduk yang memiliki rata-ratapengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk) x 100%.  Garis Kemiskinan menggambarkan batas kecukupan pengeluaran/konsumsi yang direfleksikan melalui besaran rupiah minimal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan.Sumber Data BPS.	Dinas Sosial
5.	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	laju pertumbuhan penduduk	%	(jumlah penduduk tahun perhitungan dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya) x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>MISI 2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih</b>					
6.	meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	indeks kepuasan masyarakat	kategori	IKM= <u>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</u> Total unsur yang terisi Dimana: Bobot nilai rata-rata tertimbang= $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$  untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatasdikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25  Sumber: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• RSUD dr. Slamet Garut</li> </ul>
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	kategori	satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.  Dimensi IPKD terdiri dari: a. Kesesuaian dokumen perencanaan anggaran b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah d. Penyerapan Anggaran e. Kondisi Keuangan Daerah  Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Inspektorat Daerah</li> </ul>



		b. nilai evaluasi SAKIP	kategori	predikat penilaian SAKIP Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat Daerah</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah</li> </ul>
		c. nilai evaluasi LPPD	kategori	predikat penilaian LPPD Kabupaten	Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
<b>MISI 3 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Serta Kemantapan Infrastruktur Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Serta Fungsi Ruang</b>					
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Persentase kemantapan jalan	%	(panjang Jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang Umum
9.	meningkatnya kemajuan pembangunan desa	persentase desa mandiri, maju dan berkembang	%	(Jumlah desa mandiri, maju dan berkembang dibagi total desa jumlah di kabupaten Garut) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	a. cakupan air minum layak	%	(jumlah jiwa yang terlayani air minum dibagi jumlah penduduk) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. cakupan sanitasi layak	%	(jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi dibagi Jumlah total rumah tangga) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	luas kawasan permukiman layak huni	Dinas Perumahan dan Permukiman
12.	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	a. persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	(luas areal yang terlayani irigasi teknis dibagi Total Luas areal yang harus terlayani irigasi teknis) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. persentase penurunan luas genangan air	titik	(Luas genangan air saat ini dibagi Luas genangan air) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



13.	meningkatnya kualitas lingkungan hidup	indeks kualitas lingkungan hidup	poin	mencerminkan Kondisi Kualitas Air, Udara dan Lahan Dengan Rumus IKLH = (IPA X 30%) + ( IPU X 30% ) + ( ITH X 40%) Catatan : IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	indeks risiko bencana	poin	Risiko = $\frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$ Keterangan : Risiko = Potensi Kerugian Ancaman = Potensi bencana Ancaman = Kesiapan menghadapi bahayabencana Kerentanan = Kesiapan menghadapi bahayabencana Kapasitas = Aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan	Badan PenanggulanganBencana Daerah
<b>MISI 4 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan Industri Pertanian Serta Pariwisata yang Berdaya Saing Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan</b>					
15.	meningkatnya kualitas ketahananpangan dan gizi masyarakat	skor pola pangan harapan	poin	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017	Dinas Ketahanan Pangan
16.	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB per kapita	juta (Rp)	jumlah PDRB atas Dasar Harga Berlaku/Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun. Sumber Data: BPS RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>• Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>• Dinas Pertanian</li> </ul>
17.	meningkatnya realisasi investasidaerah	jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	triliun (Rp)	jumlah Nilai Investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja, sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berikut disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1.	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	Baik
2	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	2.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,76-71,89
3	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,73-8,23
		4.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01-12,09
4	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	5.	Persentase penduduk miskin	%	8,41-8,52
		6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,21-8,41
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	7.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,1



6	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik
7	Meningkatnya tata Kelola yang baik dan bersih	9.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	A
		10.	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB
		11.	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi
8	Meningkatnya Aksesibilitas perekonomian	12.	Persentase Kemantapan Jalan	%	52,61
9	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	13.	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	97,15
10	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	14.	Cakupan Air Minum Layak	%	89,27
		15.	Cakupan Sanitasi Layak	Ha	67,69
11	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman	16.	Luas Kawasan Permukiman Layak Huni	Hektar	6,673
12	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	17.	Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	%	80,70
		18.	Perluasan Penurunan Luas Genangan Air	%	50
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,18
14	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	20.	Indeks Risiko Bencana	Poin	200
15	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	21.	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	80
16	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi local	22.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	23,25-23,52
17	Meningkatnya realisasi investasi daerah	23.	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	1,46-1,48

Sumber: BAPPEDA, Tahun 2022



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Garut selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2022 memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).



Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pencapaian Kinerja dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

- *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan *pencapaian kinerja yang semakin baik*, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan *semakin rendah pencapaian kinerja*, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kriteria hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dinilai sebagai berikut :

- Realisasi Kinerja  $\geq$  Target Kinerja : ***Mencapai/ Melampaui Target*** (✓)
- Realisasi Kinerja  $<$  Target Kinerja, tetapi  $>$  Realisasi Tahun Sebelumnya : ***Tidak Mencapai Target, tetapi Meningkatkan*** (▲)
- Realisasi Kinerja  $<$  Target Kinerja : ***Tidak Mencapai Target*** (X)

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan





Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, **gradasi nilai (skala intensitas) kinerja** suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

**(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

**(2) Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

**(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

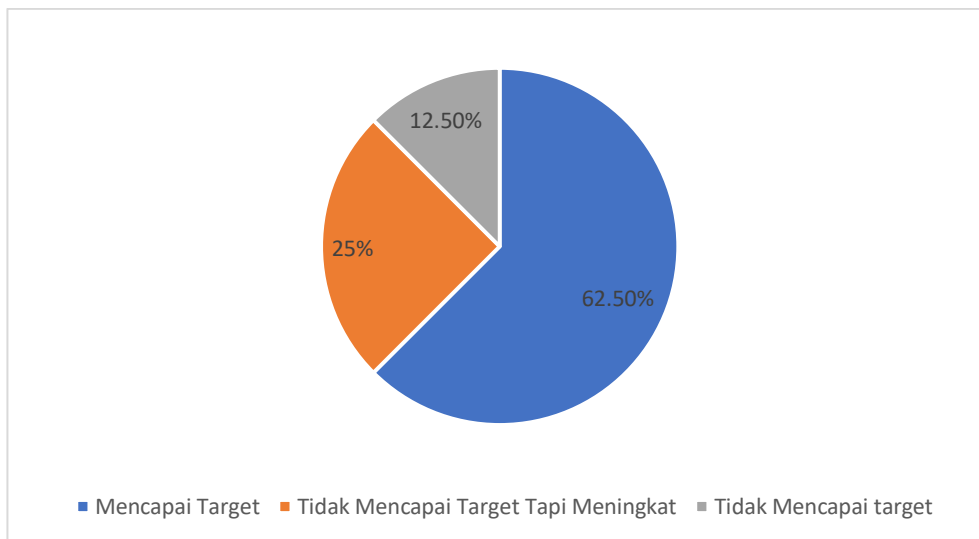
**3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut**

**A. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan**

Pengukuran kinerja tujuan dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terhadap 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengukur realisasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan tahun 2022 dibandingkan dengan target keberhasilan dari sebanyak 8 ukuran keberhasilan (indikator) yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian tujuan pembangunan Tahun 2022 secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Ringkasan Pencapaian Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2022**



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 8 indikator makro pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

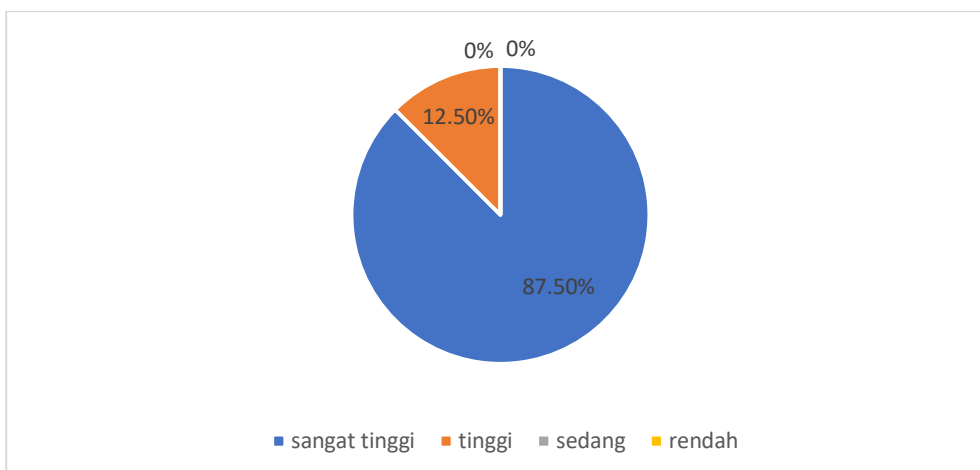
a. Dari sisi **tingkat ketercapaian target** kinerja indikator makro pembangunan yang ditargetkan pada tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- (1) Sebanyak **5 indikator (62,5%) mencapai atau melampaui target;**
- (2) Sebanyak **2 indikator (25%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu;**
- (3) Sebanyak **1 indikator (12,5%) tidak mencapai target.**

b. Dari sisi **gradasi nilai (skala intensitas) kinerja indikator makro pembangunan yang ditargetkan pada tahun 2022** menunjukkan hasil sebagai berikut :

- (1) Sebanyak **7 indikator (87%) berada dalam skala nilai Sangat Tinggi;**
- (2) Sebanyak **1 indikator (13%) berada dalam skala nilai Tinggi;**

**Gambar 3.2**  
**Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan**

**Tahun 2022**

Sumber: Hasil Pengolahan Data

**Tabel 3.2**  
**PENGUKURAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2022**

INDIKATOR MAKRO	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2022	Standar Nasional	% Capaian 2022	Status Capaian	
1	Indek Pembangunan Manusia	66,45	67.41	68.0	72,91	99,09%	▲
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,3	0.86	1.1	1.17	121,82%	✓
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,58	5.08	4.855	5.3	104.63%	✓
4	Persentase Penduduk Miskin	10,65	10.42	8.465	10,14	76,90%	X
5	Pendapatan Per Kapita	23.356	25.346	23.385	71	108.39%	✓
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,68	7.6	8.31	6,49	108,54%	✓
7	Indeks Gini	0,322	0.302	0.361	0,381	116,34%	▲
8	Inflasi	1,17	6.65	3.5	5,51	10%	X

*Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target. Sumber: BPS Kab. Garut 2022 dan 2023, serta Bappeda Kab. Garut Tahun 2022.*

Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

**Indikator Makro**

1

*Indeks Pembangunan Manusia*



Status Pembangunan Manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2021-2022 secara umum telah menunjukkan perubahan dan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut menurut komponennya adalah sebagai berikut:

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi

**Tabel 3.3**  
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	% Capaian Realisasi RPJMD 2022	Status Capaian
1	2	3	7	6	7	8	9
1	IPM	Poin	66,45	66,9	68,0	99,32%	▲
A	Indeks Pendidikan	Poin	58,52	79,72	79,77	100,06	▲
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,03	12,01-12,09	12,15	100,33%	√
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,73-8,23	7,53	98,96%	▲
B	Indeks Kesehatan	Poin	79,37	79,72	79,77	99,82%	▲
	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,59	71,63-71,74	71,59	99,87%	▲
C	Indek Daya Beli	Poin	63,795	65,39-66,1	64,71	98,85%	▲
	Pengeluaran per kapita	(000 Rp)	7.961	8.212,5	7.961	96,93%	▲

Sumber: Bappeda Garut. Garut 2022.

Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, N/A = data tidak tersedia.

#### b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional**  
**Tahun 2015-2022**

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Garut	63,20	63,64	64,52	65,42	66,22	<b>66,12</b>	66,45	67,41
IPM Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12
IPM Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91
Rangking IPM di Jawa Barat	25	25	25	25	25	25	25	25
Rangking Pertumbuhan IPM di Jawa Barat	1	15	2	2	4	20	9	<b>1</b>
Selisih dari Jawa Barat (poin)	-6,30	-6,41	-6,17	-5,88	-5,81	-5,97	-6,00	-5,71
Selisih dari Nasional (poin)	-6,34	-6,54	-6,30	-5,97	-5,70	-5,82	-5,84	-5,5
Pertumbuhan IPM Garut	1,55%	0,70%	1,37%	1,41%	1,22%	-0,16%	0,50%	1,45%
Pertumbuhan IPM Jawa Barat	1,02%	0,80%	0,91%	0,87%	1,02%	0,08%	0,50%	0,67%
Pertumbuhan IPM Nasional	0,93%	0,92%	0,90%	0,82%	0,75%	0,02%	0,49%	0,62%
Target IPM Garut (poin)	n/a	n/a	64,13	64,60	65,09	66,44	66,44	66,9
Tingkat Capaian Target IPM Garut	n/a	n/a	100,61 %	101,28 %	101,75 %	99,52 %	66,44%	99,32%

Sumber: Buku 1 RKPD 2022. Garut 2022.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional**

**Gambar 3.3 IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional**  
**Tahun 2016-2022**

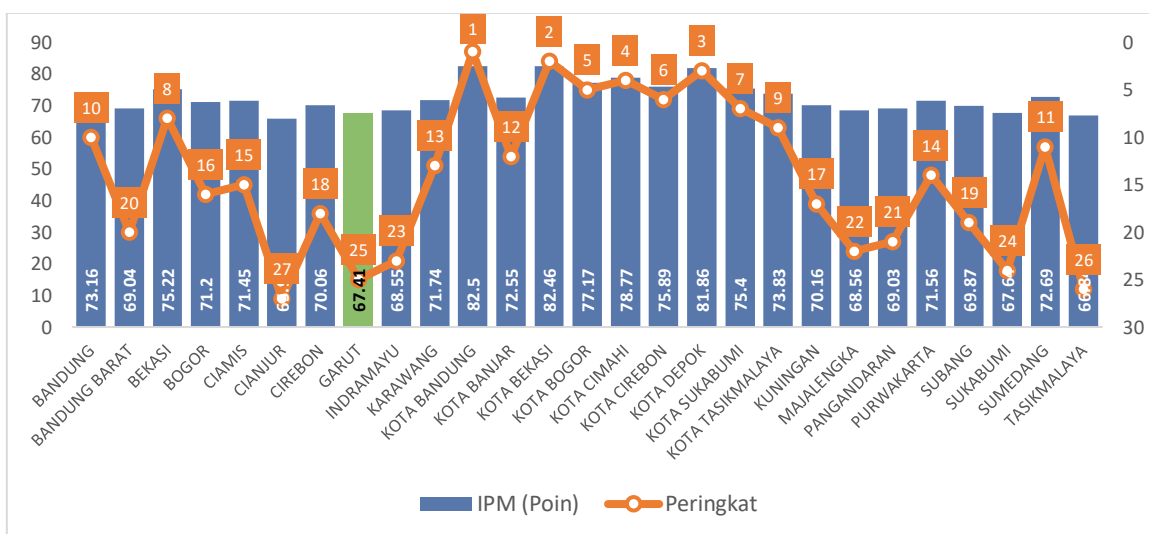


Sumber : BPS RI, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 3.4**



### Perbandingan IPM Kabupaten/Kotadi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber : BPS RI, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

#### d. Analisis Realisasi Kinerja

Status pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 mencapai 67,41 poin atau mencapai 99,09 % dibandingkan target IPM Tahun 2021. Hal ini menunjukkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak yang diukur dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Daya Beli.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik 0,97 poin atau 1,45% menjadi 67,41 poin. Meskipun masih tertinggal cukup jauh dari capaian Provinsi Jawa Barat (73,12) dan Nasional (72,91). Namun besaran dan persentase kenaikannya adalah yang paling tinggi di Provinsi Jawa Barat dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya dan lebih tinggi dari besaran kenaikan IPM Provinsi (0,67 poin) dan Nasional (0,62 poin). Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, IPM Kabupaten Garut menempati peringkat ke-25, sama dengan tahun 2021.

Selama periode Tahun 2017 sampai 2022, IPM mengalami tren kenaikan kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan yang kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat tidak hanya sisi kesehatan namun juga sisi perekonomian (daya beli) serta pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan formal.



## Indikator Makro

2

**Laju Pertumbuhan Penduduk**

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk Laju Pertumbuhan Penduduk pada tabel 3.5 berikut dibawah ini:

**a. Perbandingan Target dan Realisasi**

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Misi ke 2**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1 Laju Pertumbuhan Penduduk	0,56	1,1	0,86	121,82%	✓

Sumber: Bappeda, 2022.

Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017–2022**

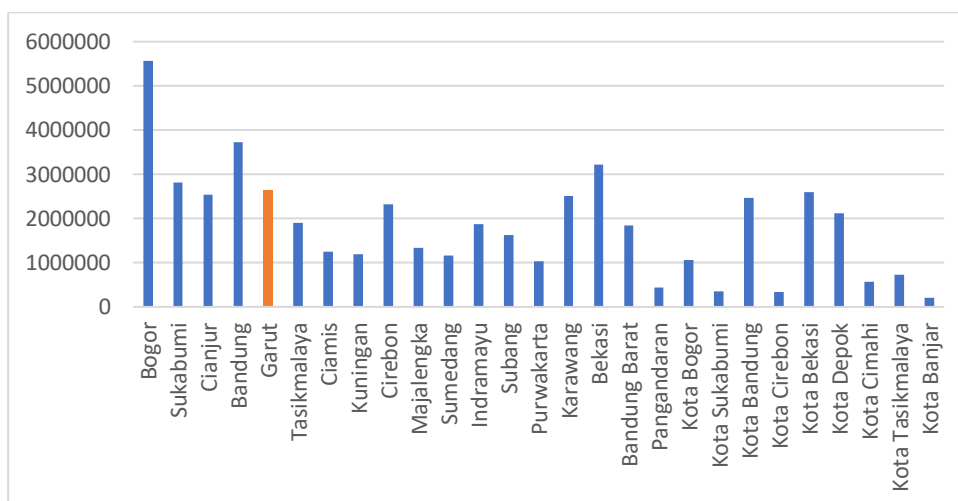
INDIKATOR	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)*	2.588.839	2.606.399	2.622.425	2.585.607	2.604.787	2.627.220
- Laki-Laki (Jiwa)	1.303.638	1.311.815	1.319.079	1.324.971	1.334.360	1.345.400
- Perempuan (Jiwa)	1.285.201	1.294.584	1.303.346	1.260.636	1.270.427	1.281.820
2. Sex Ratio (%)	101,43	101,33	101,21	105,1	105	105,12
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*	0,75	0,68	0,61	0,75	0,56	0,86
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	842	848	844,02	843,54	849,80	845,57
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	648.562	652.961	656.977	658.461	650.096	655.467
6. Rasio Ketergantungan Umur	57,83	57,75	57,65	57,50	47,23	47,27

Sumber : Kabupaten Garut Dalam Angka Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, yang dikelola dalam SIPD

**c. Perbandingan LPP dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat****Gambar 3.5**



### Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 (Ribuan Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

#### d. Analisis Realisasi Kinerja

Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan pembangunan *Laju Pertumbuhan Penduduk* pada Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

#### Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik diproyeksikan sebanyak 2.627.220 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.345.400 jiwa dan perempuan sebanyak 1.281.820 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,86%. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 menjadi rata-rata sebesar 8495,57 jiwa/ km<sup>2</sup>.

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (Sex ratio) menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2022 sebesar 105,12 yang berarti ada sekitar 105,12 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Berikut laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut menurut kecamatan:

**Tabel 3.7**

#### Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022





Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2020-2021 <sup>4</sup>	2021-2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cisewu	33,41	33,54	0,10	0,25
Caringin	32,01	32,55	0,59	0,90
Talegong	28,75	28,82	0,05	0,16
Bungbulang	58,30	58,48	0,07	0,21
Mekarmukti	18,16	18,72	1,10	1,58
Pamulihan	18,59	18,82	0,42	0,66
Pakenjeng	68,28	68,87	0,28	0,50
Cikelet	44,49	45,28	0,62	0,95
Pameungpeuk	42,56	43,38	0,67	1,02
Cibalong	44,57	45,40	0,66	0,99
Cisompét	52,75	53,40	0,42	0,68
Peundeuy	23,76	24,06	0,43	0,71
Singajaya	47,31	47,74	0,29	0,50
Cihurip	18,69	18,88	0,32	0,56
Cikajang	83,94	85,23	0,53	0,82
Banjarwangi	57,78	58,19	0,22	0,42
Cilawu	107,74	109,44	0,55	0,85
Bayongbong	102,70	104,82	0,72	1,08
Cigedug	43,48	44,64	0,95	1,39
Cisurupan	98,94	99,42	0,27	0,48
Sukaresmi	40,13	40,46	0,53	0,82
Samarang	77,80	78,51	0,60	0,92
Pasirwangi	65,23	65,60	0,34	0,57
Tarogong Kidul	115,66	116,49	0,45	0,72
Tarogong Kaler	97,10	98,39	0,90	1,33
Garut Kota	127,71	127,98	0,07	0,21
Karangpawitan	137,82	140,03	1,11	1,60
Wanaraja	48,72	49,22	0,68	1,02
Sucinaraja	29,42	29,78	0,82	1,22
Pangatikan	42,41	42,83	0,66	0,99
Sukawening	56,54	57,26	0,87	1,27
Karagtengah	18,61	18,87	0,97	1,40
Banyuresmi	91,72	92,53	0,58	0,88
Leles	84,21	85,08	0,68	1,03
Leuwigoong	46,91	47,48	0,82	1,22
Cibatu	74,25	74,94	0,61	0,93
Kersamanah	38,92	39,28	0,60	0,93
Cibiuk	35,00	35,49	0,95	1,39
Kadungora	92,82	93,52	0,47	0,75
Blubur Limbangan	78,82	79,13	0,20	0,39
Selaawi	42,18	42,70	0,85	1,24



Malangbong	130,71	132,00	0,65	0,99
Kabupaten Garut	2.604,79	2.627,22	0,56	0,86

Sumber: *Garut Dalam Angka 2023*

Berdasarkan data penduduk BPS, jumlah penduduk kabupaten Garut pada tahun 2022 termasuk ke dalam 5 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut.

## Indikator Makro

3

### Laju Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengukuran capaian indikator Kinerja Indikator Pembangunan Ketiga disajikan pada tabel 3.8 berikut dibawah ini:

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi

**Tabel 3. 8**  
**Pengukuran Kinerja Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,58	4,855	5,08	104.63%	✓

Sumber: *Badan Pusat Statistik Tahun 2022*

Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia, (\*)= data Tahun 2021.

#### b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2024**

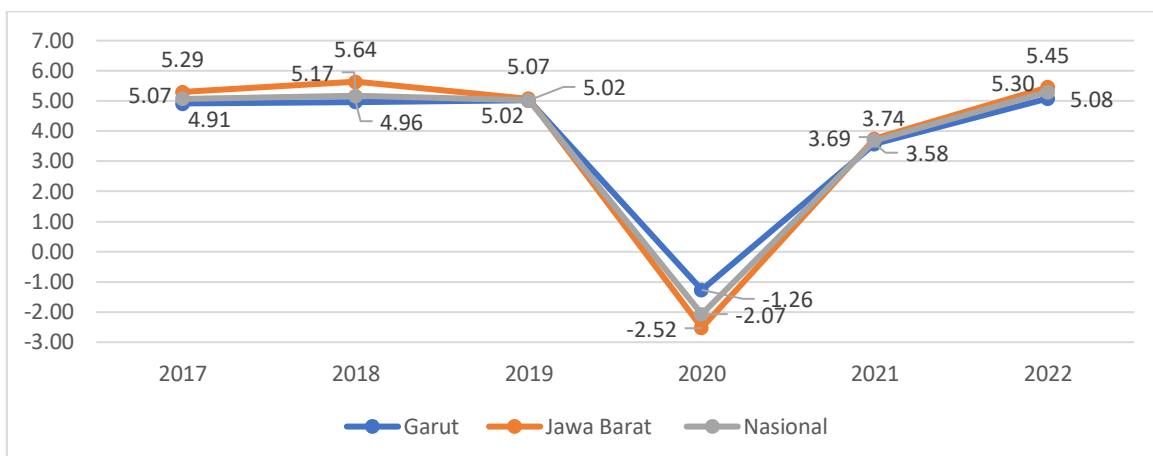
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	5,5	5,5	5,5	-3,07	3,39 - 4,37	4,31 - 5,4	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57
Realisasi (%)	4,91	4,96	5,02	-1,26	3,58	5,08		
Capaian (%)	89,36	90,19	91,27	-131,72	92,27	104,63		

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD*

#### c. Perbandingan Realisasi Kinerja Garut dengan Nasional

### Gambar 3.6

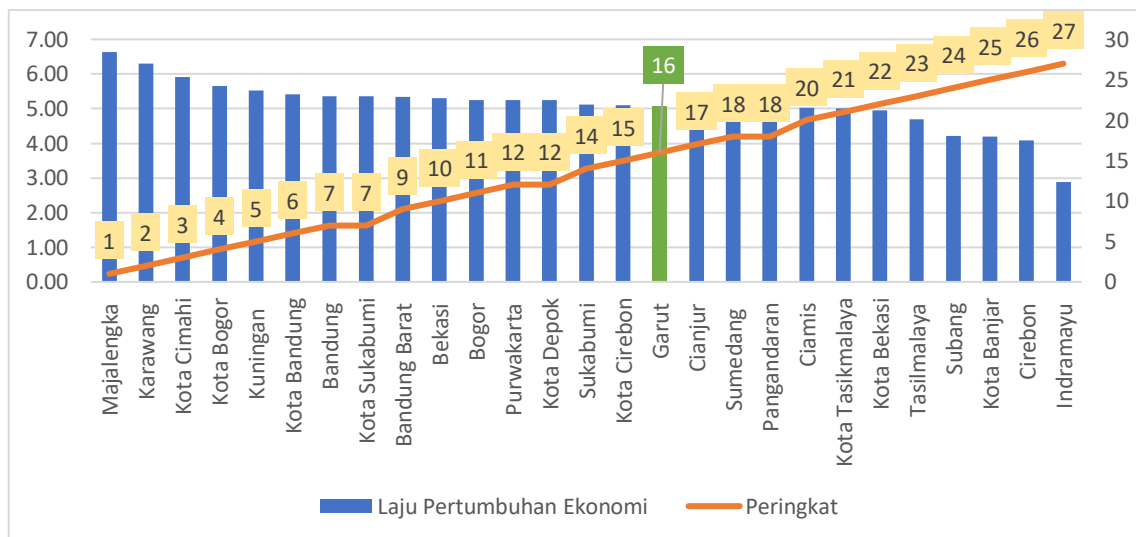
### LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022.



Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 3.7

### Peringkat Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Garut 2022, data yang dikelola dalam SIPD

#### d. Analisis Realisasi Kinerja

Penjelasan pencapaian indikator makro pembangunan Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

##### ✓ Laju Pertumbuhan Ekonomi

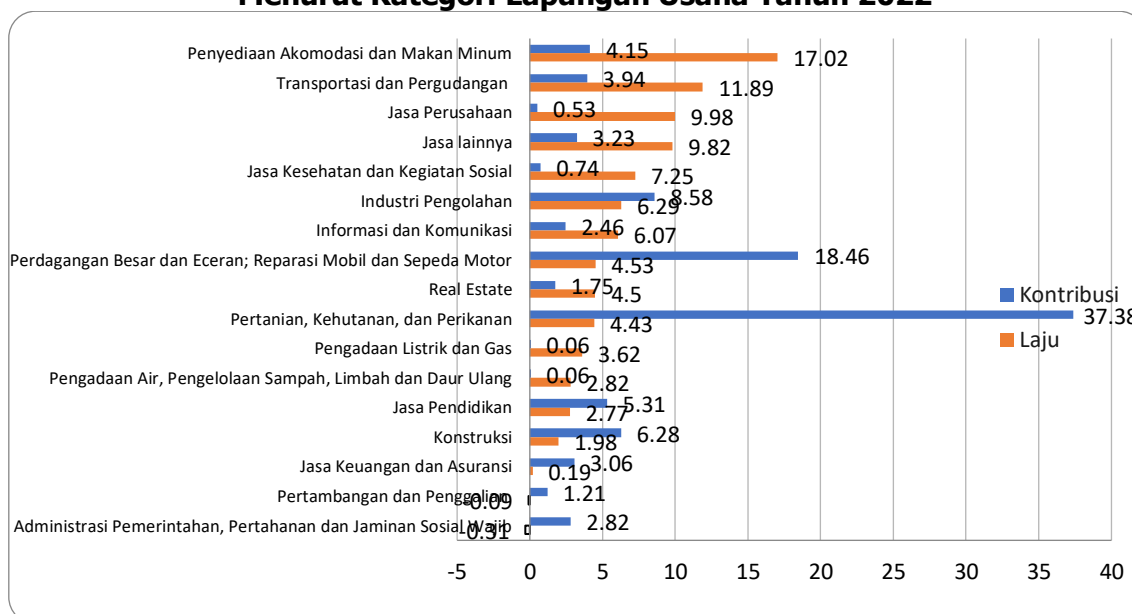
Apabila dibandingkan dengan target median LPE Tahun 2022 sebesar 4,855, maka capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 104,63%. Selama periode 2020-2022, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Garut tidak bergeser yaitu tetap

pada kategori Pertanian. Berikut perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 terhadap kabupaten/kota se-Jawa Barat menunjukkan LPE Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-16, turun empat peringkat dibandingkan tahun 2021, namun secara capaian jauh lebih baik dan meningkat dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2021. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Adapun dilihat dari sektor lapangan usaha, hampir semuanya mencatatkan pertumbuhan positif kecuali untuk Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (2,82%). Sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu Konstruksi (6,28%), Jasa Pendidikan (5,31%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (4,15%), Transportasi dan Pergudangan (3,94%), dan Jasa Lainnya (3,237,59%).

**Gambar 3.8**  
**Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD



Hasil pengukuran Indikator Makro Pembangunan Persentase Penduduk Miskin disajikan pada tabel 3.10 berikut dibawah ini:

**a. Perbandingan Target dan Realisasi**

**Tabel 3. 10**  
**Pengukuran Persentase Penduduk Miskin**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1 Persentase Penduduk Miskin	10,65	8,465	10,42	76,90%	x

Sumber : BPS, Kabupaten Garut Dalam Angka 2022 dan 2023, Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022 dan 2023

Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan**  
**Tahun 2017-2024**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2017	279.573	291.240	95,83%	91,56%	10,42	11,27	91,84%	86,05%
2018	272.583	241.310	111,47%	108,11%	10,02	9,27	107,49%	103,06%
2019	265.769	235.190	111,51%	111,51%	9,63	8,98	106,75%	106,75%
2020	252.110 – 265.410	262.780	98,75%	63,26%	6,92-7,03	9,98	80,48%	56,92%
2021	240.960 – 254.380	281.360	86,40%	53,59%	8,98-9,48	10,65	84,62%	47,31%
2022	227.670- 230.670	276.670	79,27%	56,03%	8,41 - 8,52	10,42	76,90%	50,60%
2023	209.170- 212.170				7,66 - 7,77			
2024	190.670- 193.670				6,92 - 7,03			

Sumber : Target RPJMD Kab. Garut dan data realisasi BPS Kab. Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

**b. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

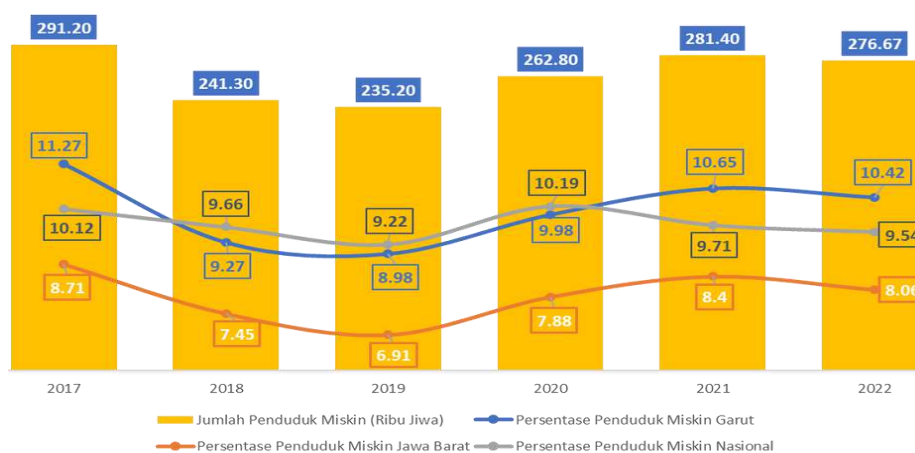
**Tabel 3.12**  
**Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2017-2022**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	267.252	282.683	301.202	310.437	320.050	335.134
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	291,24	241,31	235,19	262,78	281,36	276,67
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	11,27	9,27	8,98	9,98	10,65	10,42**
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,72	1,49	0,87	0,97	1,40	1,81
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,37	0,16	0,15	0,29	0,45

Sumber : Berita Resmi Statistik 2022 BPS Kabupaten Garut, per Maret Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

### c. Perbandingan Realisasi Garut dengan Nasional

**Gambar 3.9**  
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut – Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Maret Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

### d. Analisis Realisasi Kinerja

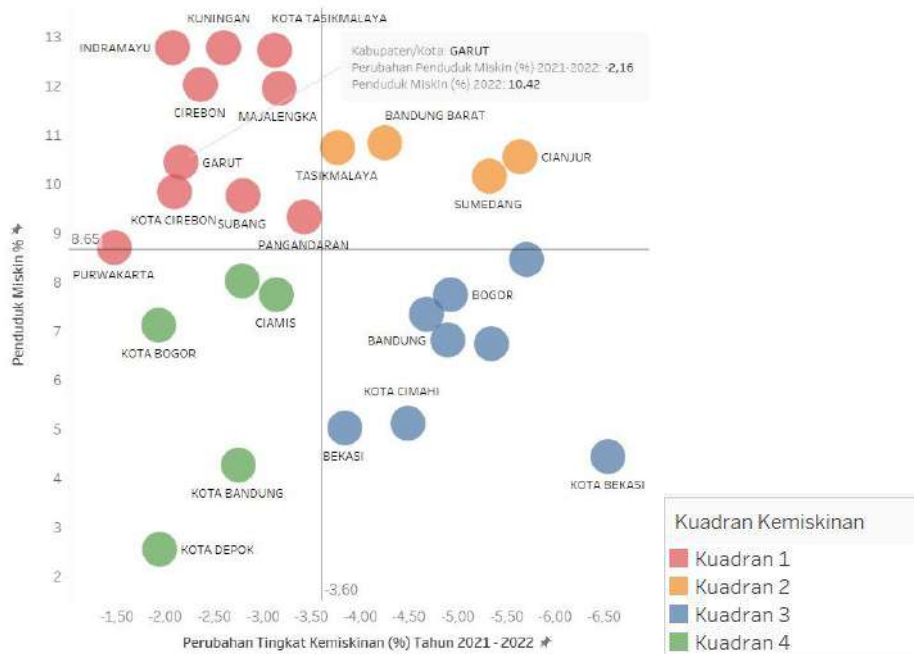
Penjelasan pencapaian Indikator Makro Pembangunan Persentase Penduduk Miskin disajikan sebagai berikut:

Perbandingan kondisi pencapaian indikator kemiskinan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut, secara umum pencapaian pada tahun 2022 belum dapat mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan. Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 0,23% dari

10,65% menjadi 10,42% (Maret 2022). Angka ini masih lebih tinggi dari angka Provinsi (8,06%) dan Nasional (9,54%). Secara jumlah, penduduk miskin telah berkurang sekitar 4.690 jiwa menjadi 276,67 ribu jiwa pada tahun 2022. Selama periode 2020-2022, dari sisi persentase penduduk miskin berada pada peringkat ke-10 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

Bahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari indikator makro. Kabupaten Garut berada di kuadran I yang memiliki jumlah warga miskin di atas rata-rata provinsi (276,67 ribu jiwa) dan penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 4,69 ribu jiwa. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa masyarakat Kabupaten Garut memiliki kerentanan tinggi dalam menghadapi sebuah krisis ekonomi.

**Gambar 3.10**  
**Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022**

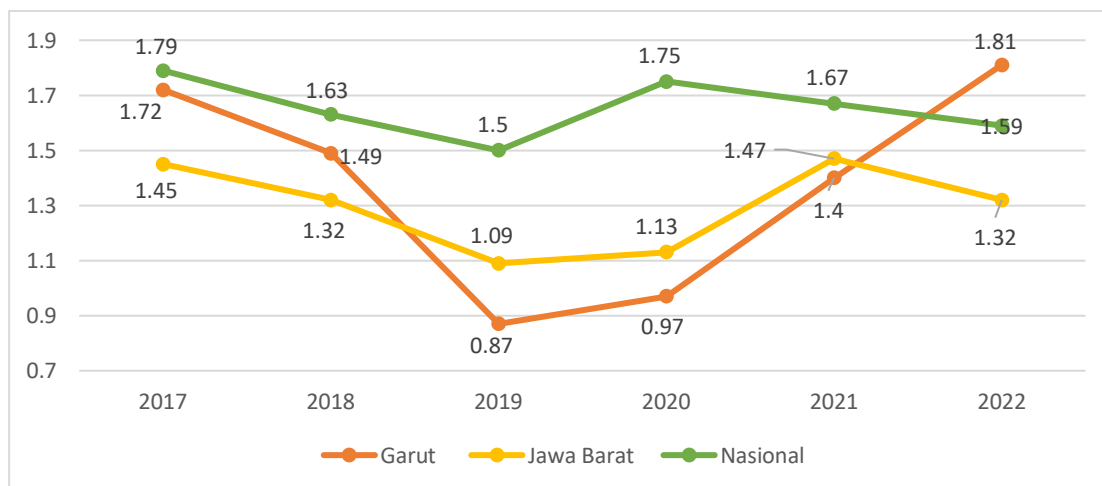


Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2022

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan naik. Ini mengindikasikan adanya perburukan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin.

**Gambar 3.11**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**

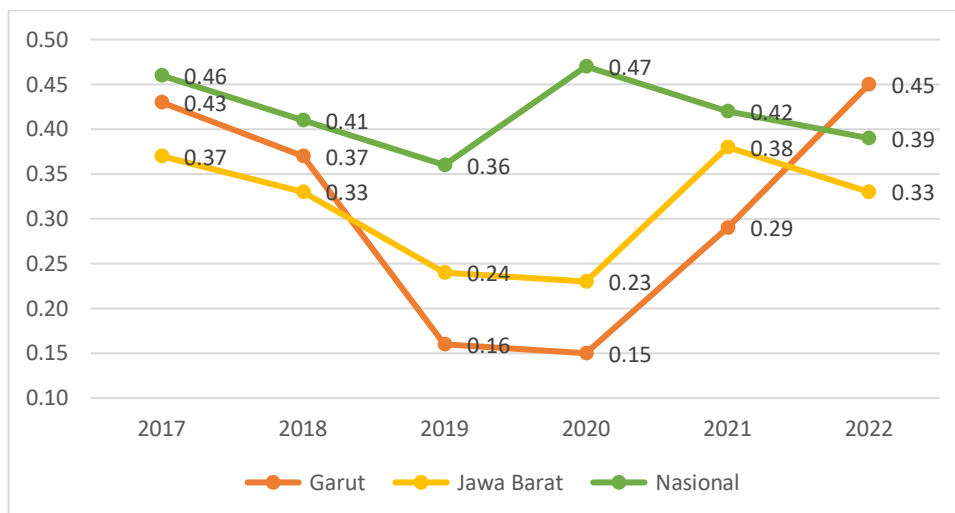


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,29 poin pada tahun 2021 menjadi 0,45 poin pada tahun 2022, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin melebar. Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2022 tersebut dibawah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,33 poin maupun Nasional sebesar 0,39 poin.

**Gambar 3.12**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Garut,**



**Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

**Indikator Makro**
**5**
*Pendapatan Per Kapita*

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk Pendapatan Per Kapita disajikan pada tabel 3.13 berikut dibawah ini:

**a. Perbandingan Target dan Realisasi**

**Tabel 3.13**  
**Pendapatan Per Kapita**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1   Pendapatan Per Kapita	23,356	23,385	25,346	108,39	✓

Sumber: BAPPEDA Garut 2022

Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia, (\*) = Data Tahun 2021.

**b. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

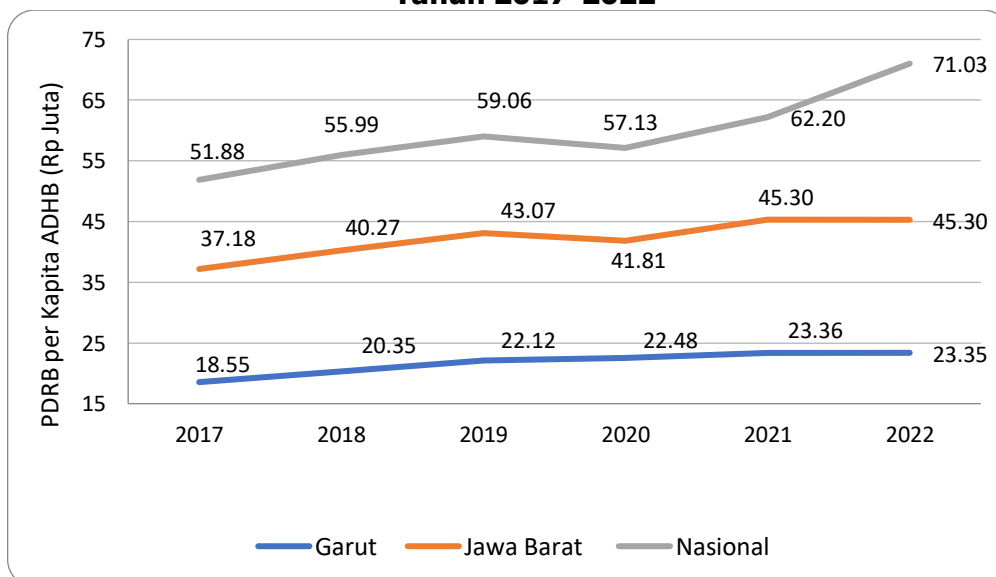
**Tabel 3.14**  
**Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut Tahun 2017–2022**

Uraian Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a. PDRB atas dasar harga berlaku	Juta Rp	48.004.084	53.009.108	57.579.150	58.043.000	60.836.770	66.590.620
b. PDRB atas dasar harga Konstan	Juta Rp	35.464.912	37.224.183	39.092.650	38.598.150	39.981.190	42.012.960
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun	Jiwa	2.588.839	2.606.399	2.622.425	2.585.607	2.604.787	2.627.220
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Rp	18.542.708	20.338.063	22.116.000	22.480.000	23.356.000	25.346.000
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan	Rp	13.699.157	14.281.844	14.939.000	14.949.000	15.349.000	15.991.000
f. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,91	4,96	5,02	-1,26	3,58	5,08
g. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh berlaku	%	7,24	17,62	8,46	1,72	4,04	8,52
h. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh konstan	%	4,13	8,56	4,37	0,14	2,82	4,18

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

### c. Perbandingan Realisasi Garut dengan Nasional

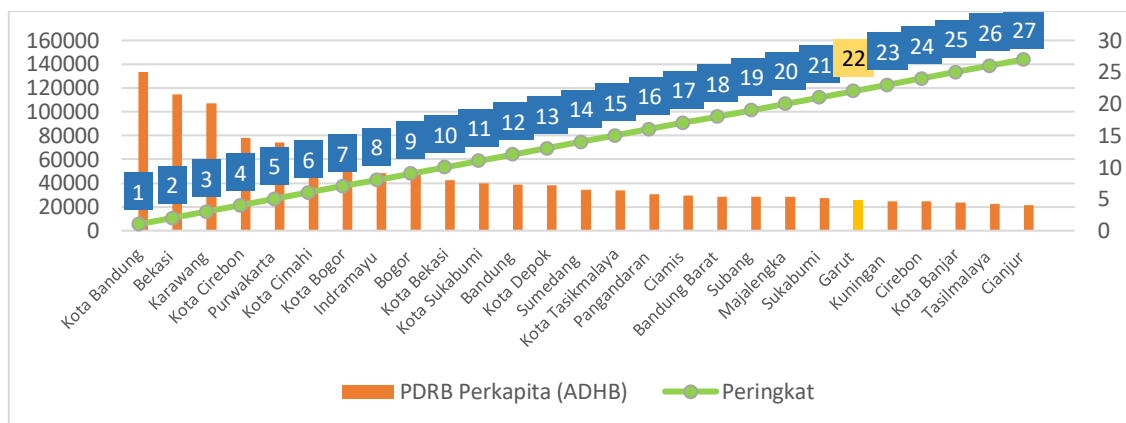
**Gambar 3. 13**  
**Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Pencapaian PDRB per kapita adh berlaku kabupaten Garut tahun 2022 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, hanya berada di peringkat 22 di bawah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.

**Gambar 3. 14**  
**Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

#### d. Analisis Realisasi

Penjelasan pencapaian indikator Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2022, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 8,52% atau dari semula Rp 23,36 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 25,35 juta pada tahun 2022

**Tabel 3.15**  
**Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022**

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Juta)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	adh Berlaku	adh Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2018	20,35	14,282	2.606.399	9,68	4,26
2019	22,12	14,939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22,48	14,949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23,36	15,349	2.604.787	3,90	2,68
2022	25,35	15,991	2.627.220	8,52	4,18

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD.



Pencapaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode 2017-2022 terus mengalami peningkatan, namun demikian capaian Kabupaten Garut masih tergolong rendah jika dibandingkan capaian Jawa Barat sebesar Rp 49,08 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp 71,03 juta.

## Indikator Makro

6

*Tingkat Pengangguran Terbuka*

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka disajikan pada tabel 3.16 berikut dibawah ini:

**a. Perbandingan Target dan Realisasi**

**Tabel 3.16**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1 Tingkat Pengangguran Terbuka	8,68	8,31	7,6	108,54%	✓

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia, (\*) = Data Tahun 2021

**b. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.17**  
**Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Garut Tahun 2017-2022**

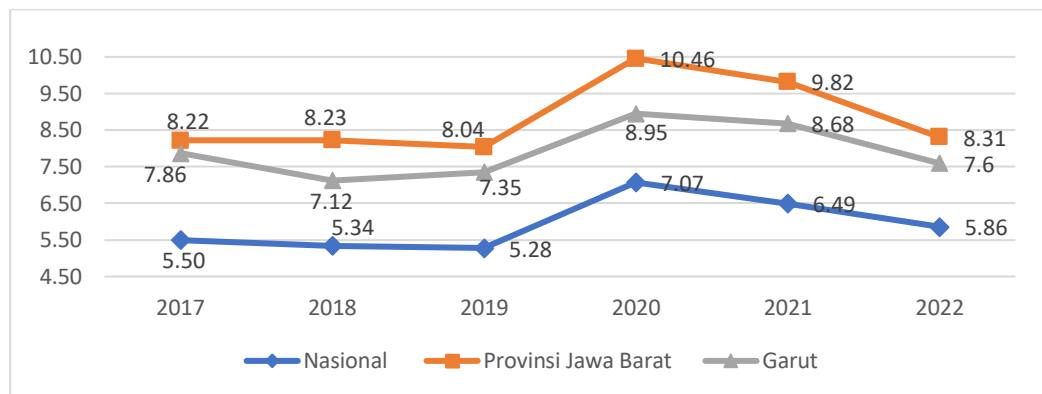
URAIAN INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,86	7,07	7,28	8,96	8,68	7,6
b. Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	89.111	77.437	84.045	103.607	104.212	
c. Persentase Penduduk Bekerja	%	92,14	92,93	92,72	91,04	91,32	
d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,92	60,13	62,70	61,11	62,76	
e. Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.801.059	1.822.722	1.842.301	1.892.059	1.912.716	
f. Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.133.248	1.095.981	1.155.071	1.156.180	1.200.346	
g. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	1.044.137	1.018.544	1.071.026	1.052.573	1.096.134	

URAIAN INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
h. Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	667.811	726.741	687.230	735.879	712.370	

Sumber : BPS Kab. Garut, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

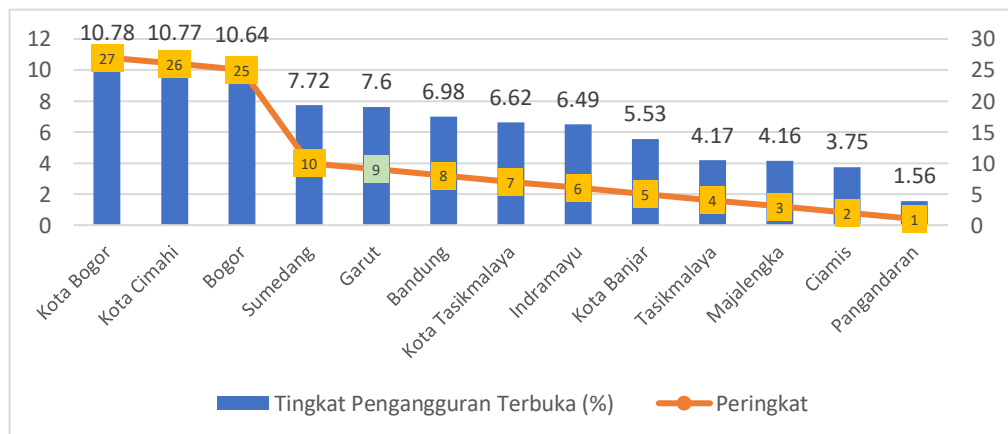
### c. Perbandingan Realisasi Garut dengan Nasional

**Gambar 3.15**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2022

**Gambar 3.16**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2022

### d. Analisis Kinerja

Penjelasan pencapaian indikator Pengangguran Terbuka pada Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :



Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Pencapaian TPT tahun 2022 sebesar 7,6% adalah sebesar 108,54 % terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2022 masih perlu terus diturunkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 5,86%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 8,31%.

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Garut tahun 2022 sama dengan kondisi pencapaian pada tahun 2021 yakni berada di peringkat 9. Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi adalah Kota Bogor sebesar 10,78%, disusul Kota Cimahi dan Kabupaten Bogor, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah kabupaten Pangandaran sebesar 1,56%, disusul Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka

## Indikator Makro

7

### *Indeks Gini*

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk Indeks Gini disajikan pada tabel 3.18 berikut dibawah ini:

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi

**Tabel 3.18**  
**Indeks Gini**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1   Indeks Gini	0,322	0,361	0,302	116,34%	✓

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia, (\*) = Data Tahun 2021

**b. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

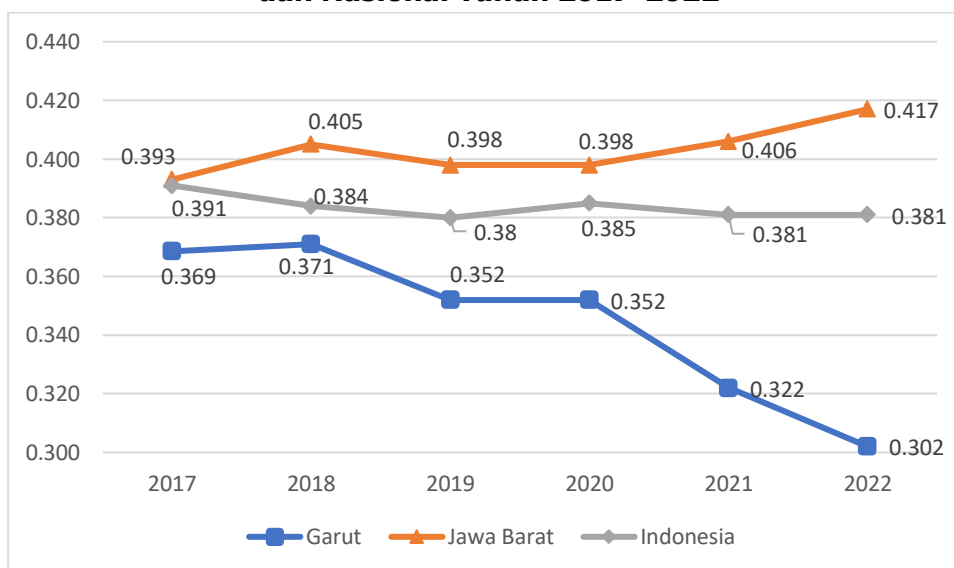
**Tabel 3.19**  
**Target dan Realisasi serta Capaian Indikator**  
**Indeks Gini Tahun 2017-2024**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	n/a	n/a	n/a	0,359-0,361	0,360-0,362	0,36 – 0,362	0,36 – 0,362	0,35 - 0,36
Realisasi (%)	0,369	0,371	0,352	0,352	0,322	0,302		
Capaian (%)	n/a	n/a	n/a	110,52	102,22	116,34		

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

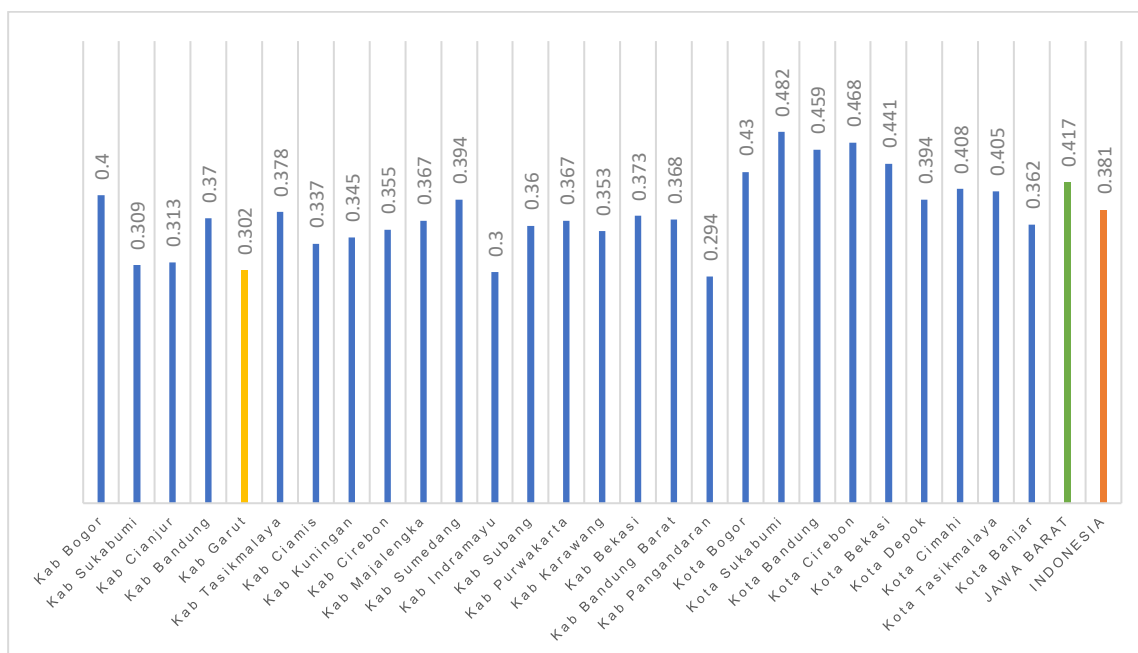
**c. Perbandingan Realisasi Garut dengan Nasional**

**Gambar 3.17**  
**Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 3.18**  
**Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

#### d. Analisis Kinerja

Adapun penjelasan terkait Indeks Gini:

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini ratio tahun 2022 berada pada level menengah dengan besaran 0,302, lebih baik dari tahun 2021 sebesar 0,020 poin dan dikategorikan kelompok ketimpangan "ringan" karena berada di bawah 0,4. Capaian





tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,417 dan Nasional sebesar 0,381. Pencapaian Indeks Gini tahun 2022 mencapai 116,34% dari target pada perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 0,360-0,362 poin.

Jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Barat, pada tahun 2022 kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 di bawah kabupaten Pangandaran dan kabupaten Indramayu. Kondisi tersebut sama dengan tahun 2021 Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah.

## Indikator Makro

8

### Inflasi

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk Inflasi disajikan pada tabel 3.20 berikut dibawah ini:

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi

**Tabel 3.20**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Inflasi**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1   Inflasi	1,17	3,5	6,65	10%	<b>X</b>

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia, (\*) = Data Tahun 2021

#### b. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Data target dan realisasi serta capaian indikator inflasi tahun 2017 hingga tahun 2024 akan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Inflasi Tahun 2017-2024**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	6	6	6	1,12-3,12	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5



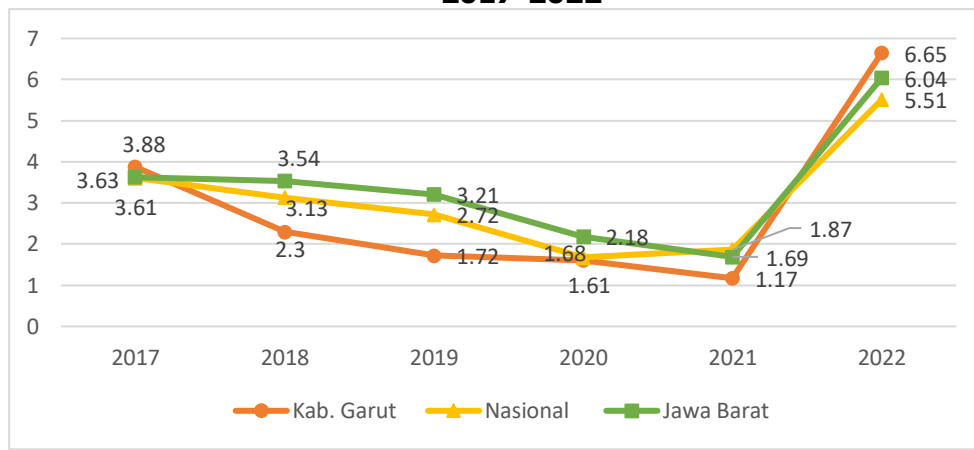
Realisasi (%)	3,88	2,3	1,72	1,61	1,17	6,65		
Capaian (%)	135,33	161,66	171,33	124,05	166,57	190,00		

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

### c. Perbandingan Realisasi Garut Dengan Nasional

Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional tersaji pada gambar dibawah ini.

**Gambar 3.19**  
**Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

**Tabel 3. 22**  
**Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya**  
**Bulan Desember 2022 di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional**

Kota		IHK Desember 2022	Inflasi Desember 2022	Inflasi Tahun Kalender (ytd)	Inflasi Tahun ke tahun (yoy)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Bogor	115,54	0,49	5,82	5,82
2	Sukabumi	113,32	0,50	5,45	5,45
3	Bandung	115,43	2,04	7,45	7,45
4	Cirebon	110,32	0,35	4,86	4,86
5	Bekasi	115,67	0,46	5,37	5,37
6	Depok	114,90	0,32	6,06	6,06
7	Tasikmalaya	111,78	0,53	6,65	6,65
	<b>Gabungan Jawa Barat</b>	<b>115,11</b>	<b>0,74</b>	<b>6,04</b>	<b>6,04</b>
	<b>Nasional</b>	<b>113,59</b>	<b>0,66</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD



#### **d. Analisis Kinerja**

Adapun penjelasan Pengukuran Kinerja Inflasi adalah sebagai berikut:

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Kondisi inflasi pada tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan yang tinggi, hal ini ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga gangguan pasokan domestik akibat cuaca. Hal ini menyebabkan kenaikan inflasi hampir di seluruh wilayah termasuk inflasi Jawa Barat sebesar 6,04% dan Nasional sebesar 5,51%. Kenaikan Pencapaian inflasi tahun 2022 mencapai 190,00% dari target Tahun 2022 sebesar 2,5% - 4,5%.

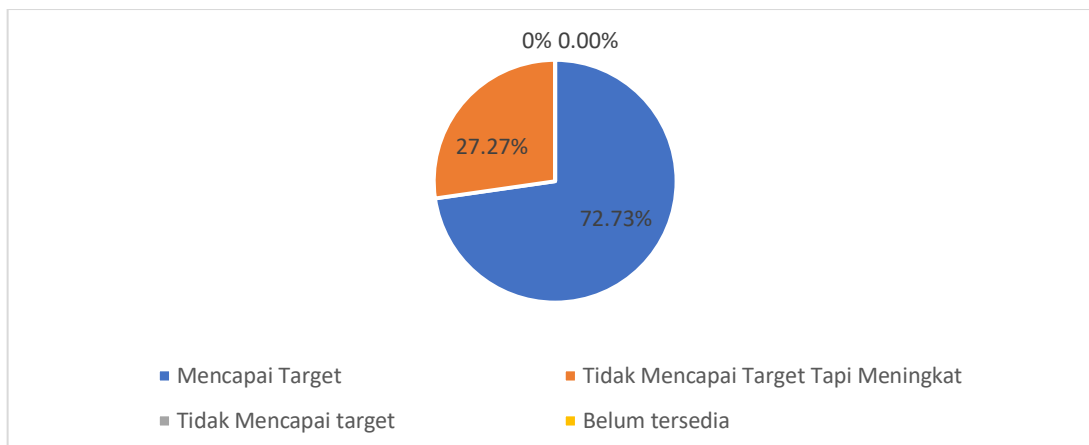
Perbandingan inflasi tahun 2022 pada tujuh kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Garut sebesar 6,65% (berdasarkan data BPS mengacu pada inflasi di Kota Tasikmalaya), mengalami inflasi tertinggi kedua dibandingkan dengan 6 kota lainnya, dan Kota Bandung berada pada peringkat satu dengan nilai inflasi 7,45%.

## **B. Pencapaian Kinerja Tujuan**

Pengukuran kinerja tujuan dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terhadap 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengukur realisasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan tahun 2022 dibandingkan dengan target keberhasilan dari sebanyak 8 ukuran keberhasilan (indikator) yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian tujuan pembangunan Tahun 2022 secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.20 dan gambar 3.21 sebagai berikut:

**Gambar 3.20**  
**Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Tujuan Tahun 2022**

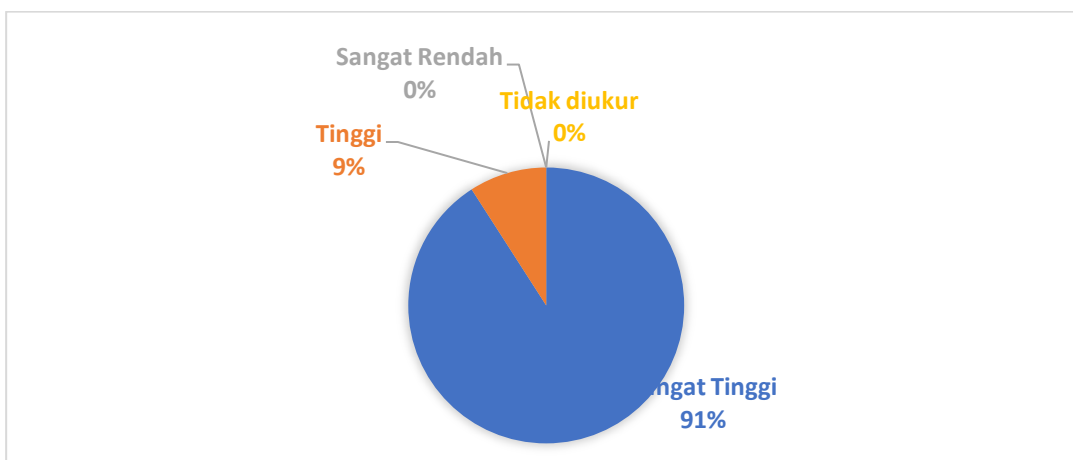


Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 tujuan dengan menggunakan 11 indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

- a. Dari sisi **tingkat ketercapaian target** kinerja indikator makro tujuan yang ditargetkan pada tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:
  - (1) Sebanyak **8 indikator (72.73%) mencapai atau melampaui target;**
  - (2) Sebanyak **3 indikator (27.27%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu;**
  - (3) Sebanyak **0 indikator (0%) tidak mencapai target;**
  - (4) Sebanyak **0 indikator (0%) belum tersedia;**
- b. Dari sisi **gradasi nilai (skala intensitas) kinerja indikator makro tujuan yang ditargetkan pada tahun 2022** menunjukkan hasil sebagai berikut :
  - (1) Sebanyak **10 indikator (91%)** berada dalam skala nilai **Sangat Tinggi;**
  - (2) Sebanyak **1 indikator (9%)** berada dalam skala nilai **Tinggi;**
  - (3) Sebanyak **0 indikator (0%)** berada dalam skala nilai **Sangat Rendah;**
  - (4) Sebanyak **0 indikator (0%)** tidak dapat diukur.

**Gambar 3.21**  
**Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Tujuan**  
**Tahun 2022**



Sumber: Hasil Pengolahan Data

**Tabel 3.23**  
**PENGUKURAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2022**

INDIKATOR KINERJA TUJUAN		Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1	Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat	B	B	B	100%	√
2	Indeks Pendidikan *)	58,52	60,075	59,85	99,63%	√
3	Indeks Kesehatan *)	79,37	79,72	79,77	100,06%	▲
4	Jumlah Penduduk Miskin	281,4	229,17	276,67	79,27%	▲
5	Persentase penduduk bekerja	91,32	91,69	92,4	100,77%	√
6	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	100%	√
7	Indeks daya Saing Infrastruktur	77,194	77,48	78,06	100,75%	√
8	Indeks Risiko Bencana	185	200	164,91	117,55%	√
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,82	59,18	69,25	117,02%	√
10	Indeks Daya Beli	63,17	65,745	64,17	97,60%	▲
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,58	4,855	5,08	104,63%	√

Sumber: BAPPEDA Kab Garut, 2022

## C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

### Ringkasan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 secara keseluruhan disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut :



**Tabel 3.24**  
**Capaian Indikator Kinerja sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022**

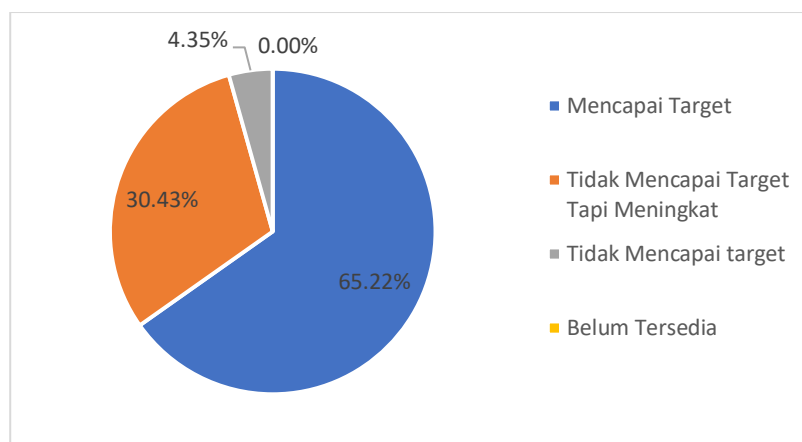
SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET SETELAH PERUBAHAN 2022		REALISASI 2022	% CAPAIAN	Status
				Range	(Nilai Tengah)		(Mencapai/tidak mencapai target )	
<b>Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya</b>								
1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Mencapai Target
1.1.2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,59	71,76 - 71,89	71,825	71,85	100,03	Mencapai Target
1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,73 - 8,23	7,98	7,83	98,12	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan
	2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,03	12,01 - 12,09	12,05	12,15	100,83	Mencapai Target
1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1. Persentase penduduk miskin	Tahun	10,65	8,41 - 8,52	8,456	10,42	76,90	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,68	8,21 - 8,41	8,31	7,6	108,54	Mencapai Target
1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	1,1	1,1	0,86	121,82	Mencapai Target
<b>Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih</b>								
2.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik		Baik	100	Mencapai Target
2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	B	A 75,7		B* 77,89	97,19	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan
	2. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB	BB		BB	100	Mencapai Target
	3. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi		Tinggi*	100	Mencapai Target
<b>Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang</b>								



3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	Persentase kemantapan jalan	%	49,92	52,61		51,42	97,74	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkat
3.1.2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	100	97,15		100	102,93	Mencapai Target
3.1.3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Cakupan air minum layak	%	86,96	89,27		88,51	99,15	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkat
	2. Cakupan sanitasi layak	%	67,2	67,69		67,69	100,00	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkat
3.1.4. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Luas Kawasan permukiman layak huni	Ha	6.727	6.673		6.825	102,28	Mencapai Target
3.1.5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1. Persentase Luas Areal Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	81,89	80,7		82,7	102,48	Mencapai Target
	2. Persentase penurunan luas genangan air	%	70	50		60	83,33	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkat
3.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,82	59,18		69,25	117,02	Mencapai Target
3.2.2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	185	200		164,91	117,545	Mencapai Target
<b>Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan</b>								
4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	79,7	80		83,1	103,88	Mencapai Target
4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	Juta Rp	23,356	23,25-23,52	23,385	25,346	108,39	Mencapai Target
4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,29	1,46-1,48	1,47	1,165	79,25	Tidak Mencapai target

Sumber: BAPPEDA KAB GARUT 2023

**Gambar 3.22**  
**Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022**



Sumber : Hasil Pengolahan Data, BAPPEDA 2023

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 17 sasaran strategis dengan menggunakan 23 indikator yang ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022.

a. Dari sisi **tingkat ketercapaian target** kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

- (1) Terdapat sebanyak **15 indikator (65.22%) mencapai atau melampaui target;**
- (2) Terdapat sebanyak **7 indikator (30.43%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu;**
- (3) Terdapat sebanyak **1 indikator (4.35%) tidak mencapai target;**
- (4) Terdapat sebanyak **0 indikator (0%) tidak dapat diukur.**

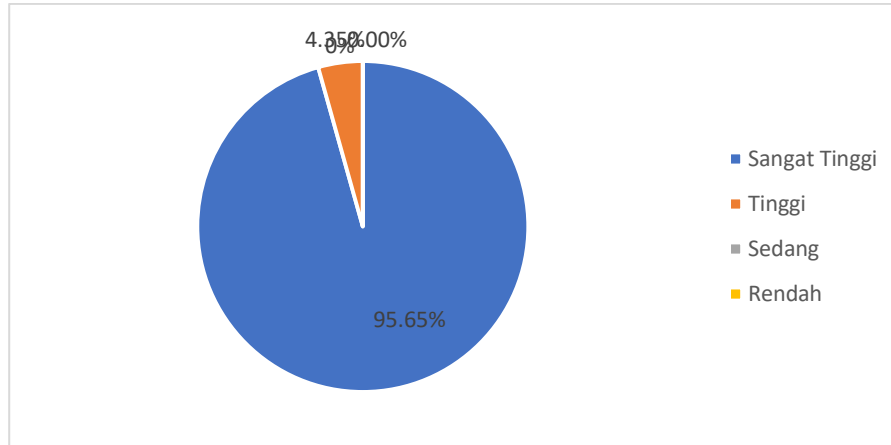
b. Dari sisi **gradasi nilai (skala intensitas) kinerja** sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut:

- (1) Sebanyak **22 indikator (95.65%) dalam skala nilai Sangat Tinggi ;**
- (2) Sebanyak **1 indikator (4.35%) dalam skala nilai Tinggi**
- (3) Sebanyak **0 indikator (0%) dalam skala nilai Rendah;**
- (4) Sebanyak **0 indikator (0%) dalam skala nilai Sedang;**



(5) Sebanyak **0 indikator (0%)** tidak dapat diukur.

**Gambar 3.23**  
**Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Tahun 2022**



*Sumber : Hasil Pengolahan Data, BAPPEDA 2023*

### Uraian Rinci Kinerja

Berikut diuraikan penjelasan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis untuk setiap misi pada Tahun 2022.

## *Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Berbudaya*



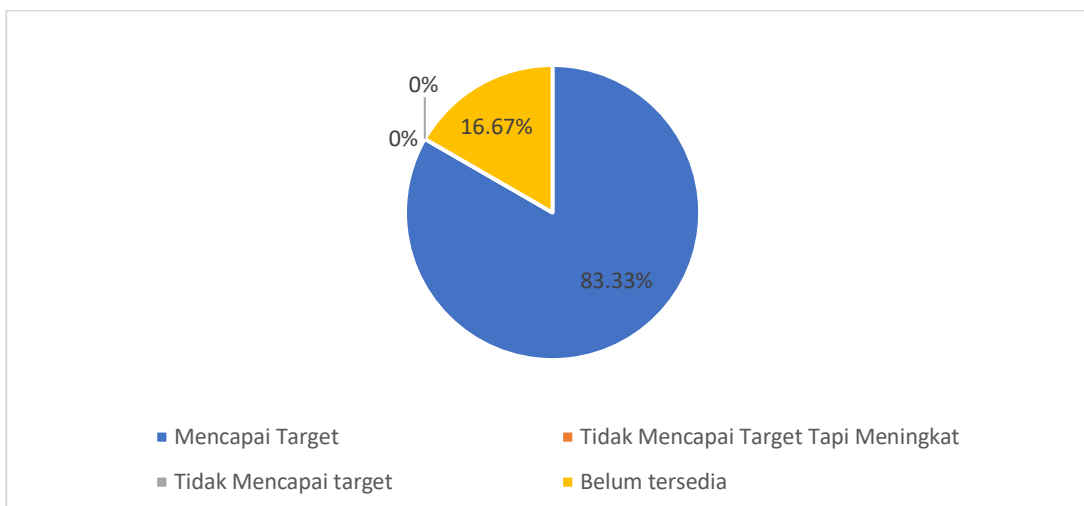
## Misi 1

Misi pertama *meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis*, bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama. Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan.

Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 1:

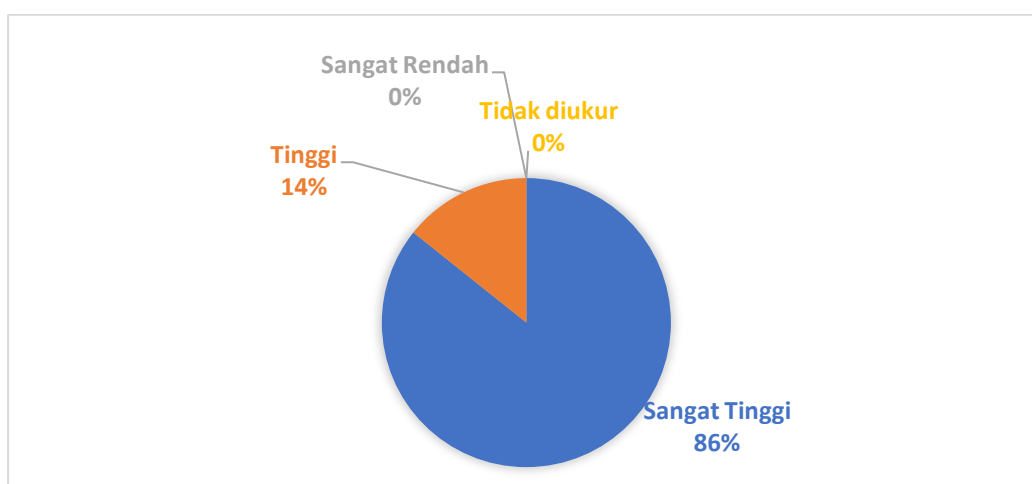
a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :

- (1) 5 indikator (57%) mencapai atau melampaui target;
- (2) 0 indikator (0%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari tahun lalu;
- (3) 0 indikator (0%) tidak mencapai target ;
- (4) 1 indikator (0%) tidak dapat diukur ;



b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 1:

- (1) Terdapat sebanyak 6 indikator (86%) berada dalam skala nilai Sangat Tinggi;
- (2) Terdapat sebanyak 1 indikator (14%) dalam skala nilai tinggi;
- (3) Terdapat sebanyak 0 indikator (0%) dalam skala rendah;
- (4) Terdapat sebanyak 0 indikator (0%) tidak dapat diukur;



Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 1 adalah sebagai berikut:

**Misi 1 Sasaran Strategis 1**

*Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya Daerah*

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pengukuran keberhasilan pencapaian



sasaran strategis ini, dilakukan terhadap 1 indikator sasaran yang telah ditetapkan target pencapaiannya, baik terhadap target tahun 2022, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD. Pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah* dilakukan dengan melihat sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap tata tertib kepada pemerintah. Realisasi capaian kinerja terkait ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan perlindungan masyarakat, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
**PENCAPAIAN INDEKS KESALEHAN SOSIAL MASYARAKAT**

NO	INDIKATOR	Realisasi 2021	Target Perubahan 2022	Realisasi 2022	(%) Capaian Kinerja 2022	Status Capaian Kinerja
1	Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat	B	B	B	100%	√

Sumber: Sekretariat daerah Kab Garut, 2022

### Analisis Kinerja Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah* menunjukkan dari indikator yang diukur telah dapat mencapai target dengan skala intensitas penilaian sangat tinggi. Uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kesalehan Sosial terhadap 5 dimensi yaitu Kepedulian Sosial, Relasi Antar Manusia, Etika dan Budi Pekerti, Melestarikan Lingkungan, dan Patuh pada Peraturan Negara, dengan sampel responden sebanyak 384 masyarakat beragama di Kabupaten Garut, diperoleh nilai 83,56 poin (Kategori Baik). Berdasarkan Perbup No 9 Tahun 2022, kategori hasil survei indeks kesalehan sosial terdiri dari kategori baik (skor>60) dan kurang (skor<60).

**Tabel 3.26**  
**Nilai IKS berdasarkan masing-masing dimensi**

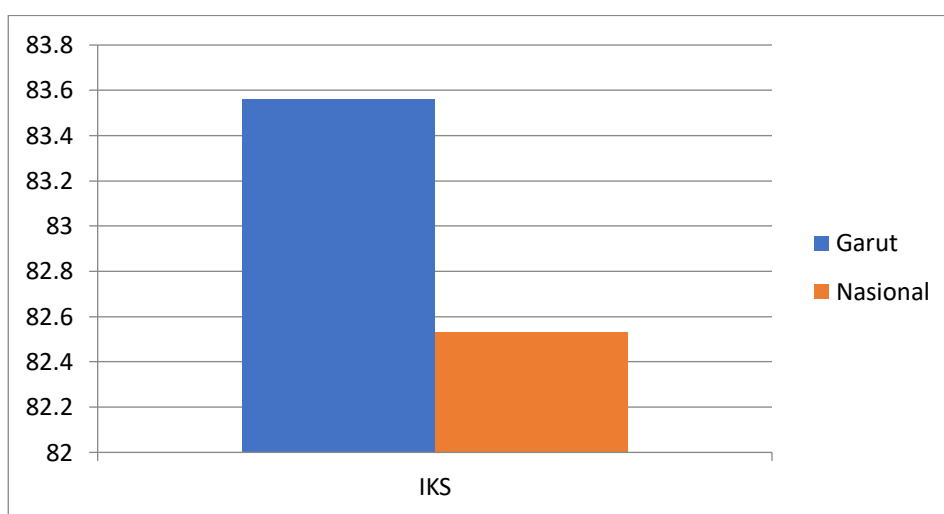
No	Dimensi	Rata-Rata
1	Kepedulian Sosial Y1	84,08
2	Relasi Antar manusia Y2	84,57
3	Etika dan Budi Pekerti (y3)	86,53
4	Melestarikan Lingkungan (y4)	77,77
5	Patuh Pada Peraturan Negara (y5)	84,83
<b>Total</b>		<b>83,56</b>
<b>Kategori</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: BAPPEDA, 2023

## 1 Perbandingan Realisasi IKS Garut Tahun Ini Dengan Capaian Nasional Tahun 2020

Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Garut pada tahun 2022 memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2020 yakni 82,53. Capaian Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten memiliki selisih 1,03 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional.

**Gambar 3.24**  
**Nilai IKS Garut dan Nasional**



Sumber: BAPPEDA, 2023

## 2 Kekurangan dan solusi sebagai pertimbangan kebijakan:

Berikut merupakan temuan yang bisa dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang:

1. Dimensi melestarikan lingkungan memiliki capaian lebih rendah dibandingkan dimensi yang lain. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu memperkuat upaya-upaya yang mengarah pada pentingnya pelestarian lingkungan mulai dari reboisasi, pengurangan sampah plastik bahkan daur ulang sampah.
2. Indikator melakukan piknik dengan keluarga pada Faktor habituasi memiliki capaian yang belum optimal. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Garut perlu memperkuat sosialisasi terkait dengan pentingnya melakukan rutinitas berkreasi bersama keluarga melalui piknik.
3. Prasarana Rumah Ibadah pada variabel Terpaan Kinerja Program Pemerintah Daerah Kabupaten Garut memiliki capaian yang belum optimal dengan kategori sedang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Garut perlu menjamin

kemudahan sarana dan prasarana rumah ibadah di masing-masing wilayah kecamatan maupun desa.

4. Variabel Terpaan Kinerja Program Pemerintah Daerah Kabupaten Garut belum memiliki dampak yang signifikan terhadap Kesalehan Sosial ditinjau berdasarkan hasil pengukuran. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja melalui program-program ataupun aktivitas lainnya.

### Misi 1 Sasaran Strategis 2

#### *Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat*

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya Meningkatkan harapan hidup masyarakat. Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, dilakukan terhadap 1 indikator sasaran yang telah ditetapkan target pencapaiannya, baik terhadap target tahun 2022, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya harapan hidup masyarakat* disajikan pada tabel 3.27 berikut dibawah ini

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi

**Tabel 3.27**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 1.2**

No	Indikator	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian 2022	Status Capaian
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	71,41	71,59	71,825	71,85	100,03%	✓

**Sumber :** BAPPEDA, Tahun 2022

**Ket:** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available / data tidak tersedia

**b. Perbandingan Target dan Realisasi**

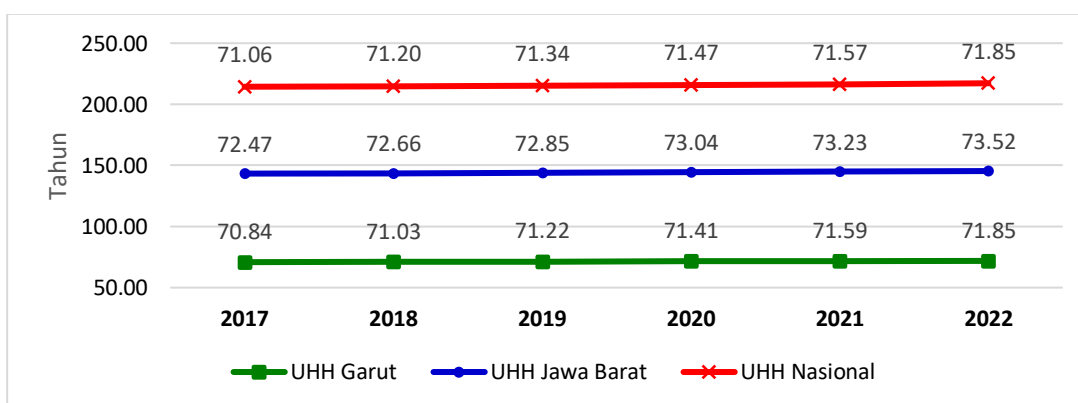
**Tabel 3.28**  
**Target dan Realisasi serta Capaian Angka Harapan Hidup (AHH)**  
**Kabupaten Garut Tahun 2017 - 2024**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	$\Delta$ 2021 - 2022	$\Delta$ 2017 - 2022
Target (tahun)	70,84	70,93	71,02	71,42-71,48	71,63-71,74	71,7-71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16		
Realisasi (tahun)	70,84	71,03	71,22	71,41	71,59	71,85			0,36 %	1,42%
Capaian (%)	99,99	100,14	100,29	99,94	99,87	100,03				

Sumber: BPS, Tahun 2021 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

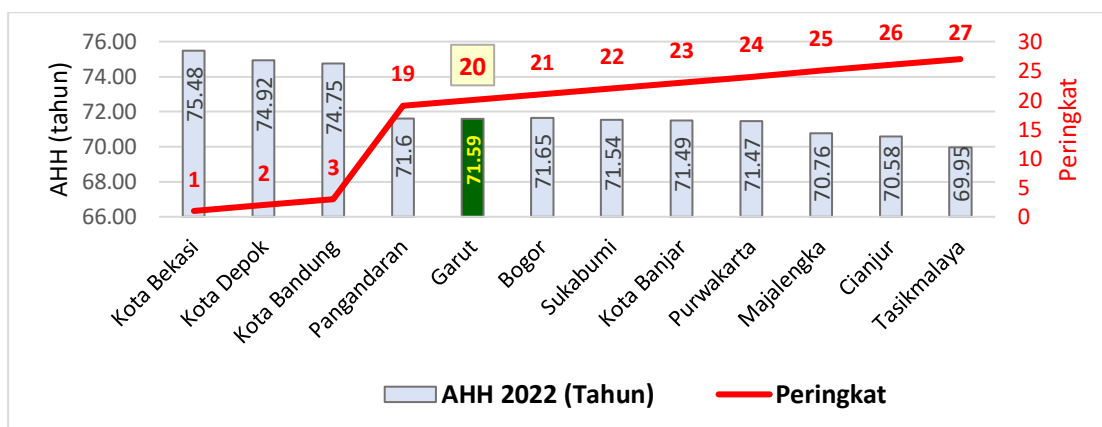
**c. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

**Gambar 3.25**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut,**  
**Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS RI, Desember 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

**Gambar 3.26 Perbandingan AHH Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber : BPS RI (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.



#### d. Analisis Kinerja

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 71,85 tahun. Selama periode 2017-2022, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 % atau meningkat 0,26 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi hal ini dipengaruhi oleh perbaikan pada program yang menunjang baik di bidang kesehatan maupun di diluar kesehatan antara lain pengentasan kemiskinan. Di samping itu, melakukan kegiatan yang menunjang seperti terjaminnya kesehatan ibu hamil dan bayi untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.

Dari capaian AHH yang tersaji pada data target dan realisasi serta capaian tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 tabel 2.26 diatas, pencapaian AHH tahun 2022 sebesar 71,85 tahun telah mencapai 100,03 % dari target.

**Tabel 3.29**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH)**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**

Uraian	Angka Harapan Hidup						Δ2021-2022	Δ2017-2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
AHH Garut (tahun)	70,84	71,03	71,22	71,41	71,59	71,85	0,36%	1,42%
AHH Jawa Barat (tahun)	72,47	72,66	72,85	73,04	73,23	73,52	0,40%	1,45%
AHH Nasional (tahun)	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85	0,39%	1,11%
Rangking AHH di Jawa Barat	19	19	19	19	20	20		
Rangking Pertumbuhan AHH di Jawa Barat	12	14	14	14	14	24		
Selisih dari AHH Jawa Barat (tahun)	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63	-1,64	-1,67		
Selisih dari AHH Nasional (tahun)	-0,22	-0,17	-0,12	-0,06	0,02	0,00		

*Sumber : BPS, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.*

Selama periode Tahun 2017-2022, pertumbuhan AHH Kabupaten Garut sebesar 1,42% berada di atas pertumbuhan Jawa Barat (1,45%) dan Nasional sebesar (1,11%).

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian AHH kabupaten Garut tahun 2022 masih berada di peringkat 20. Pada tahun 2022, AHH tertinggi adalah kota Bekasi sebesar 75,48 tahun, disusul kota Depok, dan kota Bandung.





Kondisi tahun 2022, dari sisi nilai Indeks Kesehatan sebesar 79,77 poin berada pada peringkat ke-20 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Kesehatan sebesar 0,50 %, berada pada peringkat ke-25 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Laju pertumbuhan Indeks Kesehatan Kabupaten Garut selama periode 2017-2022 lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sehingga pada tahun 2022 capaiannya bisa sama dengan Indeks Kesehatan Nasional. Adapun jika dibandingkan dengan Jawa Barat, laju pertumbuhannya relatif sama sehingga gap nya pun relatif tidak berubah selama periode 2017-2022.

- ✓ Menurut konsep hidup sehat H.L.Blum, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai faktor determinan timbulnya masalah kesehatan yang terdiri dari:
  - 1 faktor lingkungan sebesar 45% (sosial, ekonomi, politik, budaya),
  - 2 faktor perilaku kesehatan/gaya hidup sebesar 30% (life style),
  - 3 faktor pelayanan kesehatan sebesar 20% (jenis cakupan dan kualitasnya)
  - 4 dan faktor keturunan sebesar 5% (genetik). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Dari sisi lingkungan, menunjukkan pada Tahun 2022 kondisi belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan dari masih terdapat 13,04% rumah tangga yang belum mampu mengakses air minum layak dan masih terdapat 32,8% rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Dari sisi perilaku, praktek persalinan yang aman semakin meningkat, tetapi belum merata, yang ditunjukkan dengan data bahwa 10,32% persalinan belum ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- ✓ Solusi yang dilakukan:  
meningkatkan lagi kegiatan yang menunjang seperti terjaminnya kesehatan ibu hamil dan bayi untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.

### Misi 1 Sasaran Strategis 3

#### *Mengkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat*

Sasaran strategis *mengingkatkan tingkat Pendidikan masyarakat* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-



2024 yang terkait dengan upaya meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana keluarga sejahtera serta pengendalian kependudukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat. Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, dilakukan terhadap 1 indikator sasaran yang telah ditetapkan target pencapaiannya terhadap target tahun 2022 dari periode RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat* disajikan pada tabel 3.30 berikut dibawah ini:

**Tabel 3.30**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 3**

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian
1	Rata-Rata Lama Sekolah	7,53	7,98	7,83	98,12%	▲
2	Harapan Lama Sekolah	12,03	12,05	12,15	100,83%	✓

**Sumber:** BAPPEDA, 2022

**Ket:** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

## Analisis Kinerja Tahun 2022

Status pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 mencapai 67,41 poin atau mencapai 99,09 % dibandingkan target IPM Tahun 2021. Hal ini menunjukkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak yang diukur dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Daya Beli. Pada indeks Pendidikan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan kemajuan indeks Pendidikan.

### 1 Rata-rata lama sekolah (RLS)

Komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan diukur melalui tingkat pendidikan, menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS tahun 2022 sebesar 7,83 tahun atau setara dengan kelas VII, meningkat 0,3 tahun atau tumbuh 0,17% dari



2021 sebesar 7,53 tahun. RLS tahun 2022 mencapai 98,12 % dari target sebesar 7,73-8,23 tahun.

#### a. Perbandingan Realisasi RLS Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

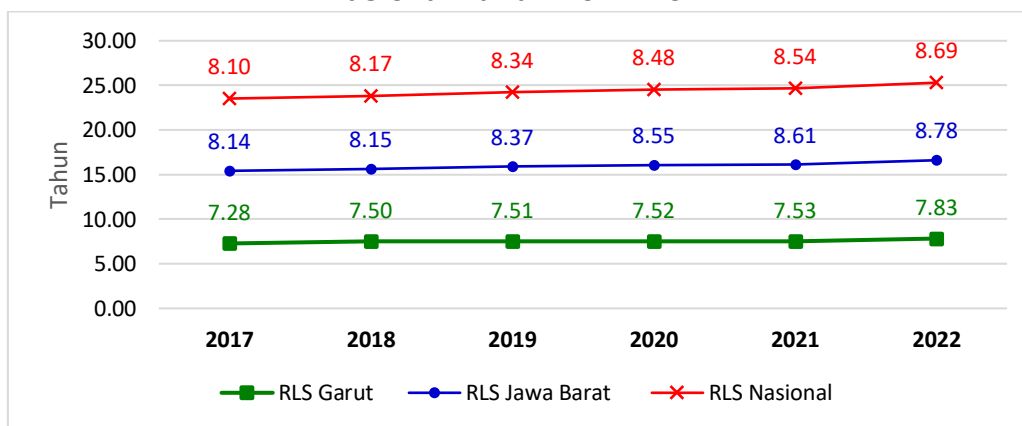
**Tabel 3.31**  
**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**

Uraian	Tahun						Δ 2021-2022	Δ 2017-2021
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
RLS Garut (tahun)	7,28	7,50	7,51	7,52	7,53	7,83	3,98 %	7,55 %
RLS Jawa Barat (tahun)	8,14	8,15	8,37	8,55	8,61	8,78	1,97 %	7,86 %
RLS Nasional (tahun)	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	1,76 %	7,28 %
Rangking RLS di Jawa Barat	20	18	19	20	20	20		
Rangking Pertumbuhan RLS di Jawa Barat	2	1	23	18	26	7		
Selisih dari RLS Jawa Barat (tahun)	-0,86	-0,65	-0,86	-1,03	-1,08	-0,95		
Selisih dari RLS Nasional (tahun)	-0,82	-0,67	-0,83	-0,96	-1,01	-0,86		

Sumber : BPS, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

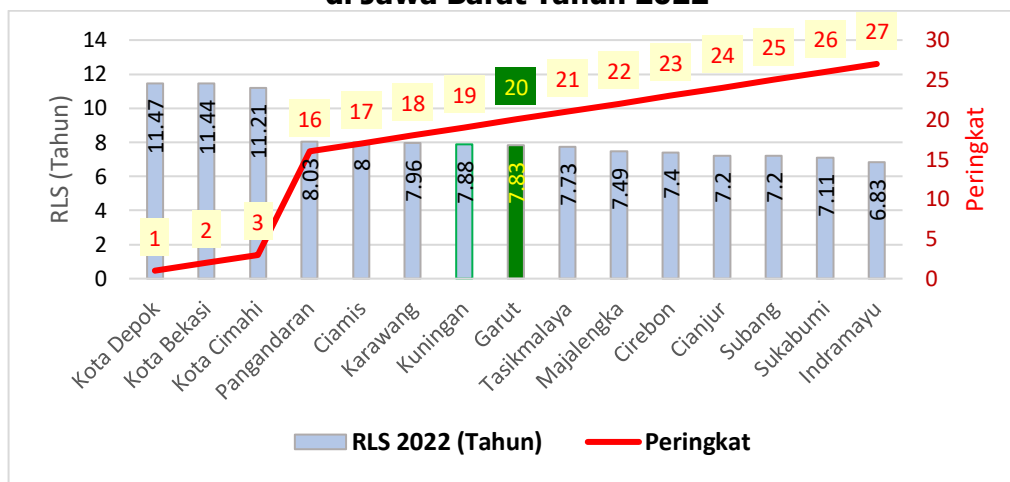
#### b. Perbandingan Realisasi RLS dengan Nasional

**Gambar 3.27 RLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 3.28**  
**Perbandingan RLS Kabupaten/Kota**  
**di Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber : BPS, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

### c. Analisis Kinerja

Capaian RLS Kabupaten Garut tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional yaitu masing-masing terpaut 0,95 tahun dan 0,86 tahun. Kondisi tahun 2022, dari sisi nilai RLS berada pada peringkat ke-20 dan dari sisi pertumbuhan RLS dibandingkan tahun 2021 berada pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2022 Kabupaten Garut menunjukkan peningkatan pertumbuhan RLS sebesar 3,98 % dan berada pada peringkat ke-7 dari 27 Kabupaten, serta berada diatas pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 1,97 % dan Nasional sebesar 1,76 %. Selama periode Tahun 2017-2022, pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 7,86 %, dan juga RLS Nasional sebesar 7,28 %. Hal inilah yang menyebabkan gap capaian RLS Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional semakin besar setiap tahunnya.

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian RLS kabupaten Garut tahun 2022 masih berada di peringkat 20 di atas Kabupaten Tasikmalaya sebesar 7,83 tahun, namun masih dibawah Kabupaten Karawang sebesar 7,96 tahun. Pada tahun 2022, RLS tertinggi adalah Kota Depok, yang mencapai 11,47 tahun, diikuti oleh Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.

#### STRATEGI PENINGKATAN NILAI RLS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT:

1. Akselerasi capaian RLS melalui pendidikan kesetaraan



2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)
3. Peningkatan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu
4. memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan Dasar.
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

## 2 Harapan lama sekolah (HLS)

Pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022 sebesar 12,15 tahun dengan capaian target 100,83%. Namun demikian, Capaian HLS tahun 2022 masih tertinggal 0,47 tahun dari HLS Jawa Barat (12,62 tahun) dan masih tertinggal 0,95 tahun dari HLS Nasional (13,10 tahun).

### a. Perbandingan Realisasi RLS Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

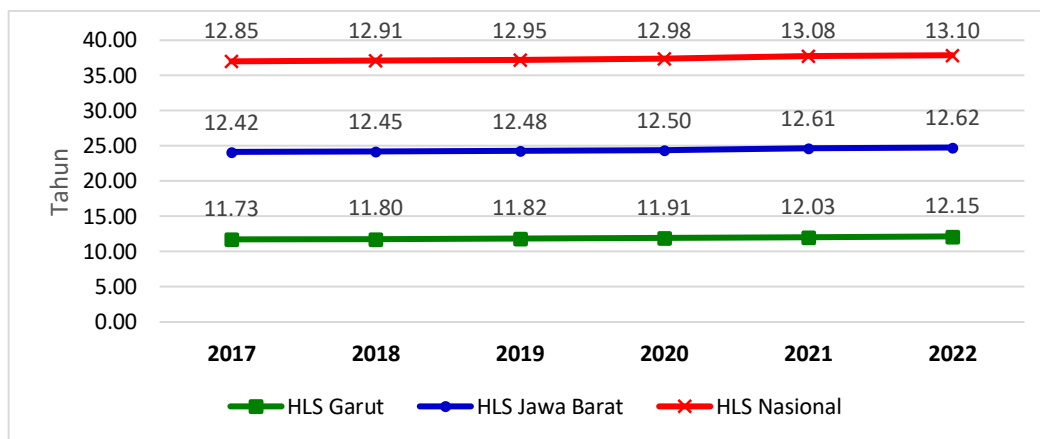
**Tabel 3.32**  
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**

Uraian	Harapan Lama Sekolah (HLS)						Δ 2021-2022	Δ 2017-2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
HLS Garut (tahun)	11,73	11,80	11,82	11,91	12,03	12,15	1,00%	3,58%
HLS Jawa Barat (tahun)	12,42	12,45	12,48	12,50	12,61	12,62	0,08%	1,61%
HLS Nasional (tahun)	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	0,15%	1,94%
Rangking HLS di Jawa Barat	26	26	26	25	24	22		
Rangking Pertumbuhan HLS di Jawa Barat	9	7	11	3	1	1		
Selisih dari HLS Jawa Barat (tahun)	-0,69	-0,65	-0,66	-0,59	-0,58	-0,47		
Selisih dari HLS Nasional (tahun)	-1,12	-1,11	-1,13	-1,07	-1,05	-0,95		

Sumber : BPS, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

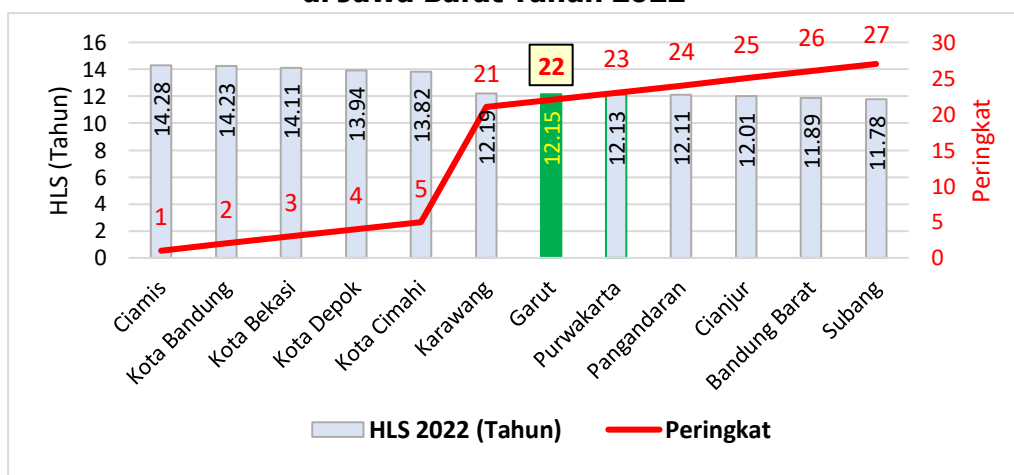
**b. Perbandingan Realisasi HLS dengan Nasional**

**Gambar 3.29**  
**HLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional**  
**Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 3.30**  
**Perbandingan HLS Kabupaten/Kota**  
**di Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber : Data BPS RI 2022, diolah Bappeda Kab. Garut

**c. Analisis Kinerja**

Kondisi tahun 2022, capaian HLS berada pada peringkat ke-22 dan mencatatkan pertumbuhan tertinggi (1,00%) jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pertumbuhan HLS Kabupaten Garut baik dari tahun 2021-2022 maupun selama periode tahun 2017-2022 berada di atas pertumbuhan HLS Jawa Barat dan HLS



Nasional sehingga gap capaian HLS Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional semakin kecil setiap tahunnya.

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian HLS kabupaten Garut tahun 2022 berada di peringkat 22 di atas Kabupaten Purwakarta sebesar 12,15 tahun. Pada tahun 2022, HLS tertinggi adalah Kabupaten Ciamis yang mencapai 14,28 tahun, diikuti oleh Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.

#### STRATEGI PENINGKATAN HLS DINAS PENDIDIKAN:

1. Peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD)
2. Peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan formal;
3. Peningkatan literasi dan numerasi peserta didik
4. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembinaan dan sosialisasi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
6. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

#### Misi 1 Sasaran Strategis 4

#### *Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran*

Sasaran strategis *Menurunnya kemiskinan dan pengangguran* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, dilakukan terhadap 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan target pencapaiannya, baik terhadap target tahun 2022, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Menurunnya kemiskinan dan pengangguran* disajikan pada tabel 3.33 berikut:

**Tabel 3.33**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 1.4**

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024
1	Persentase Penduduk Miskin	10,65	8.465	10.42	76.90	X	6,92-7,03
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,68	8.31	7.6	108.54	√	6,41-6,61

**Sumber :** BPS Kab. Garut Tahun 2022

Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = *not available*/ data tidak tersedia

### Analisis Kinerja Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *Menurunnya kemiskinan dan pengangguran* menunjukkan dari ke-2 indikator yang diukur, 1 indikator belum dapat mencapai target. Uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

#### 1. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 0,23% dari 10,65% menjadi 10,42% (Maret 2022). Angka ini masih lebih tinggi dari angka Provinsi (8,06%) dan Nasional (9,54%). Secara jumlah, penduduk miskin telah berkurang sekitar 4.690 jiwa menjadi 276,67 ribu jiwa pada tahun 2022. Selama periode 2020-2022, dari sisi persentase penduduk miskin berada pada peringkat ke-10 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

#### a. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.34**

#### Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	267.252	282.683	301.202	310.437	320.050	335.134
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	291,24	241,31	235,19	262,78	281,36	276,67
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	11,27	9,27	8,98	9,98	10,65	10,42**
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,72	1,49	0,87	0,97	1,40	1,81





Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,37	0,16	0,15	0,29	0,45

Sumber : Berita Resmi Statistik/2022 BPS Kabupaten Garut, per Maret Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

Perbandingan kondisi pencapaian indikator kemiskinan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut, secara umum pencapaian pada tahun 2022 belum dapat mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.

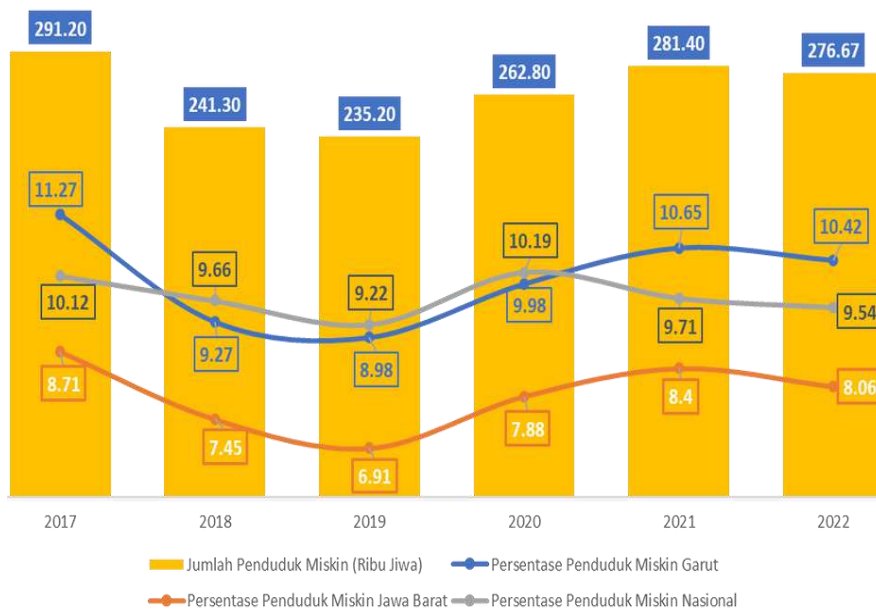
**Tabel 3.35**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan**  
**Tahun 2017-2024**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2017	279.573	291.240	95,83%	91,56%	10,42	11,27	91,84%	86,05%
2018	272.583	241.310	111,47%	108,11%	10,02	9,27	107,49%	103,06%
2019	265.769	235.190	111,51%	111,51%	9,63	8,98	106,75%	106,75%
2020	252.110 – 265.410	262.780	98,75%	63,26%	6,92-7,03	9,98	80,48%	56,92%
2021	240.960 – 254.380	281.360	86,40%	53,59%	8,98-9,48	10,65	84,62%	47,31%
2022	227.670- 230.670	276.670	79,27%	56,03%	8,41 - 8,52	10,42	76,90%	50,60%
2023	209.170- 212.170				7,66 - 7,77			
2024	190.670- 193.670				6,92 - 7,03			

Sumber : Target RPJMD Kab. Garut dan data realisasi BPS Kab. Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

## b. Perbandingan Realisasi Garut dengan Nasional

**Gambar 3.31**  
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Garut – Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Maret Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

## c. Analisis Kinerja

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2022 mengalami peningkatan Rp 9.613,- per kapita per bulan atau sebesar 4,71 % dari Rp 320.050,- per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 335.134,- per kapita per bulan pada tahun 2022. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2019-2021, garis kemiskinan Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Namun demikian, menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2015-2022. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2022 di Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi



masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 10,42% pada tahun 2022, berada di atas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 8,06 % dan Nasional sebesar 9,54 %. Hal ini perlu menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Garut.

Faktor penyebab belum tercapainya target:

- 1). Tingginya Jumlah Penduduk Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan penduduk menurun, pada akhirnya akan menyebabkan tingkat pendapatan yang diperoleh juga rendah.
- 2). Belum Terintegrasinya Penanganan Penduduk Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut

Solusi yang dilakukan:

- 1). Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Rumah Singgah pada Dinas Sosial;
- 2). Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan ;
- 3). Dinas Sosial memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif;
- 4). Melakukan koordinasi yang lebih intens antara SKPD terkait dalam penanganan/penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut;

## **2. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.200.346 orang, meningkat dari tahun 2020 sebanyak 1.156.180 orang. Persentase jumlah penduduk bekerja dari total angkatan kerja pada tahun 2021 meningkat dari 91,04% (1.052.573) pada tahun 2020 menjadi 91,32% (1.096.134) dimana angkatan kerja yang menjadi pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 8,68% menjadi 7,6% pada tahun 2022. Adapun dari sisi



jumlahnya naik dari 605 orang menjadi 104.212 orang. Adapun data target dan realisasi serta capaian TPT tersaji pada tabel 2.44 dibawah ini.

#### a. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.36**  
**Target dan Realisasi serta Capaian**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2023**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	4,47	4,36	4,25	9,78-10,48	8,96-9,46	8,21 - 8,41	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61
Realisasi (%)	7,86	7,07	7,28	8,96	8,68	7,6		
Capaian (%)	100,11	100,4 12	98,82	98,74	99,14	108,54		

Sumber: BPS, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

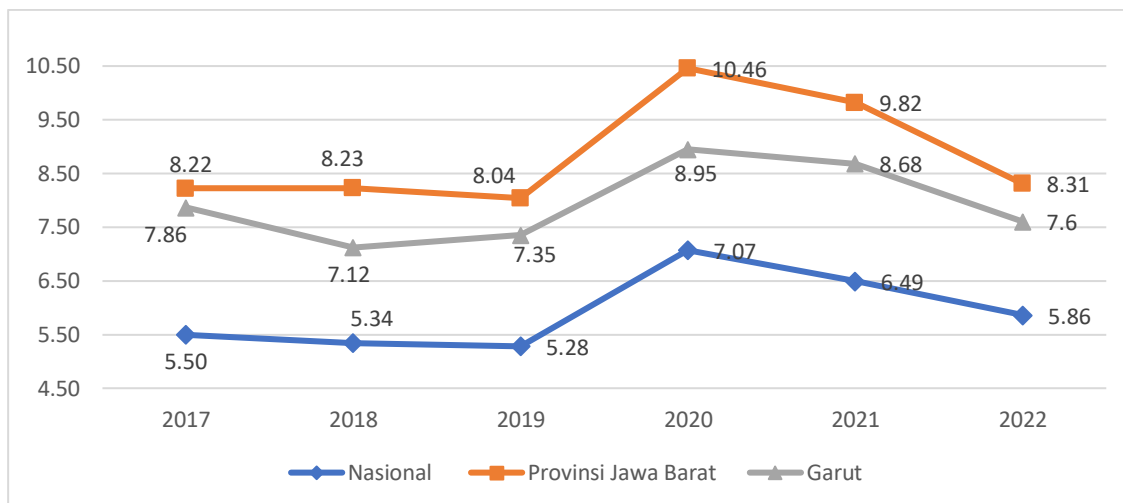
**Tabel 3.37**  
**Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Garut Tahun 2017-2022**

URAIAN INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,86	7,07	7,28	8,96	8,68	7,6
b. Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	89.111	77.437	84.045	103.607	104.212	101.135
c. Persentase Penduduk Bekerja	%	92,14	92,93	92,72	91,04	91,32	92,40
d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,92	60,13	62,70	61,11	62,76	68,84
e. Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.801.059	1.822.722	1.842.301	1.892.059	1.912.716	1.785.309
f. Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.133.248	1.095.981	1.155.071	1.156.180	1.200.346	1.330.355
g. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	1.044.137	1.018.544	1.071.026	1.052.573	1.096.134	1.229.218
h. Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	667.811	726.741	687.230	735.879	712.370	602.126

Sumber: BPS, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

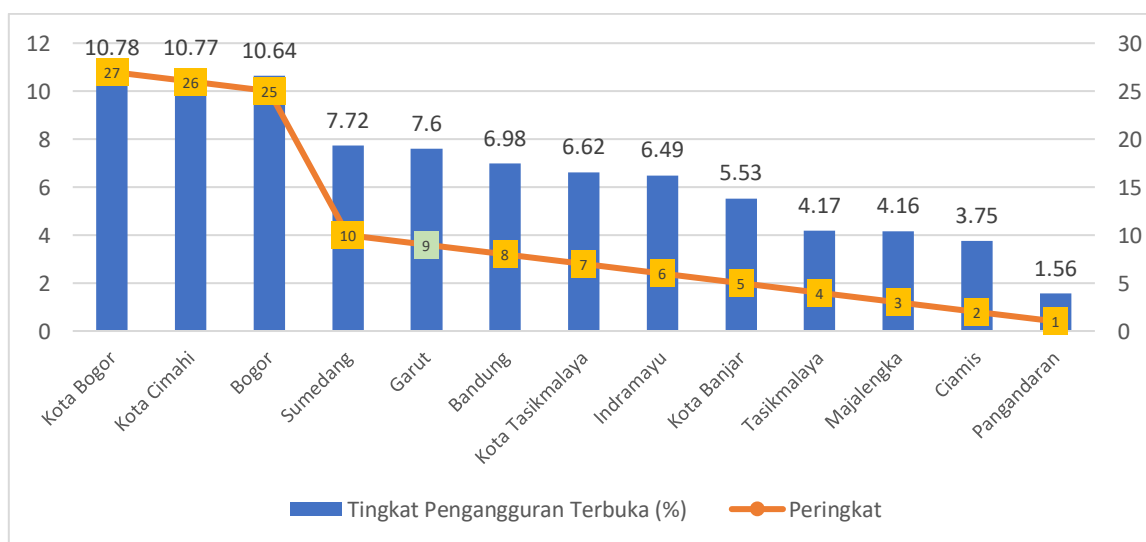
**b. Perbandingan Realisasi Garut dengan Nasional**

**Gambar 3.32**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2022

**Gambar 3.33**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat**  
**Tahun 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2022



### c. Analisis Kinerja

Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas. TPT merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Pencapaian TPT tahun 2022 sebesar 7,6% adalah sebesar 108,54 % terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2022 masih perlu terus diturunkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 5,86%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 8,31%.

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Garut tahun 2022 sama dengan kondisi pencapaian pada tahun 2021 yakni berada di peringkat 9.

Faktor yang mempengaruhi:

Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada "human capital" ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya

- 1) Pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
- 2) Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

**Misi 1 Sasaran Strategis 5*****Meningkatnya Pengendalian Penduduk***

Sasaran strategis *Meningkatnya Pengendalian Penduduk* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, dilakukan terhadap 1 indikator sasaran yang telah ditetapkan target pencapaiannya, baik terhadap target tahun 2022, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya pengendalian penduduk* disajikan pada tabel 3.38 berikut dibawah ini:

**a. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target**

**Tabel 3. 38**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 1.5**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024
1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,3%	1,1%	0,86%	121,82%	✓	1,1%

**Sumber :** BAPPEDA Garut Tahun 2022

**Ket :** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,

✗ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

**b. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.39**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2017–2022**  
**Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)**

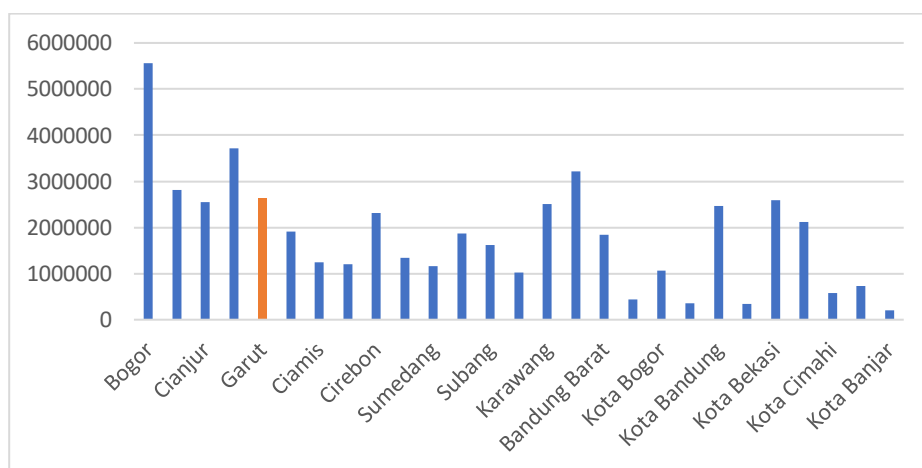
INDIKATOR	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)*	2.588.839	2.606.399	2.622.425	2.585.607	2.604.787	2.627.220
- Laki-Laki (Jiwa)	1.303.638	1.311.815	1.319.079	1.324.971	1.334.360	1.345.400
- Perempuan (Jiwa)	1.285.201	1.294.584	1.303.346	1.260.636	1.270.427	1.281.820
2. Sex Ratio (%)	101,43	101,33	101,21	105,1	105	105,12
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*	0,75	0,68	0,61	0,75	0,56	0,86
4. Kepadatan Penduduk	842	848	844,02	843,54	849,80	845,57

INDIKATOR	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(jiwa/km <sup>2</sup> )						
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	648.562	652.961	656.977	658.461	650.096	655.467
6. Rasio Ketergantungan Umur	57,83	57,75	57,65	57,50	47,23	47,27

Sumber: Kabupaten Garut Dalam Angka Tahun 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, yang dikelola dalam SIPD

### c. Perbandingan Realisasi Garut dengan Jawa Barat

**Gambar 3.34**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Jawa Barat Tahun 2022 (Ribuan Jiwa)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

### d. Analisis Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *Meningkatnya Pengendalian Penduduk* menunjukkan dari 1 indikator yang diukur, telah mencapai target yang ditetapkan, dengan skala intensitas kinerja terdiri dari skala nilai sangat tinggi. Uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

#### Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik diproyeksikan sebanyak 2.627.220 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.345.400 jiwa dan perempuan sebanyak 1.281.820 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,86%. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 menjadi rata-rata sebesar 8495,57 jiwa/ km<sup>2</sup>.





Berdasarkan data penduduk BPS, jumlah penduduk kabupaten Garut pada tahun 2022 termasuk ke dalam 5 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut.

Faktor penunjang terealisasinya target:

1. menurunnya angka total fertility rate didukung penuh oleh program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

Indikator ini memiliki tujuan langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2022 pencapaian peserta KB baru sampai Bulan Desember 2022 yang dilaporkan hasil pelayanan Klinik KB Pemerintah, Klinik KB Swasta, DPS, BPS dan Faskes lainnya sebanyak 94.205 akseptor. Dilihat dari masa pemakaian Alat kontrasepsi, pencapaian akseptor baru pada Bulan Desember 2022 adalah terdiri atas PB (Peserta) Non Hormonal sebesar 28.266 akseptor dan PB (Peserta) Hormonal sebesar 65.939 akseptor dari total pencapaian sebesar 94.500 akseptor.

2. Peningkatan Persentase jumlah keluarga pra sejahtera berbanding jumlah keluarga. Terwujudnya hal ini ditunjang dengan kegiatan:
  - a) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),
  - b) Bina Keluarga Remaja (BKR),
  - c) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R),
  - d) Bina Keluarga Lansia (BKL),
  - e) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
  - f) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
  - g) Sosialisasi Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin sebanyak 15 Kelompok. Advokasi dan Promosi IPK dengan keluaran terlaksananya edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga untuk Mengatasi Stunting yang menasar 1888 Keluarga yang Mempunyai Baduta dan Ibu Hamil di 42 Kecamatan dan 420 Keluarga dan Ibu Hamil.

*Mewujudkan Pelayananam  
Pub;ik yang Profesional dan  
Amanah Disertai Tata Kelola  
Pemerintahan Daerah yang  
Baik dan Bersih*



Misi kedua *Mewujudkan publik yang professional dan amanah disertai tata Kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih*, bertujuan untuk Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik. Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan.

Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 2 :

- a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :
- 3 indikator mencapai target



b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 2:

- 3 indikator mencapai skala nilai sangat tinggi



Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 2 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis *Meningkatnya pelayanan publik yang professional dan amanah* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta professional meningkat. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya pelayanan public yang professional dan amanah* pada tabel 3.40 berikut dibawah ini :

**Tabel 3. 40**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 2.1**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian Target Akhir 2020 (%)
1   Indek Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	√	B	100%

**Sumber :** Setda Kab Garut Tahun 2022

**Ket:** √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✘ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

### Analisis Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, indikator Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai Baik dengan perolehan Nilai 82,91 meningkat 0,37% dari Tahun 2021. Adapun perolehan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 82,30 dengan kategori B.

Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayan publik dan bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di suatu unit kerja serta melakukan perbaikan pada unit kerja yang dinilai. Persentase SKPD yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan tahun 2022 adalah 100% terhadap 75 SKPD yang ada di Kabupaten Garut.

**Gambar 3.35**  
**NILAI IKM KABUPATEN GARUT TAHUN 2022**



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Tahun 2022

**Misi 2 Sasaran Strategis 2**

*Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih*

Sasaran strategis *Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta professional dalam pelayanan public meningkat. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 3 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih* disajikan pada tabel 3.41 berikut:

**Tabel 3.41**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 2.2**

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022(%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	n/a	A	B	97,19	▲	A
2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	BB	√	BB
3	Nilai Evaluasi LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	100%	√	Sangat Tinggi

**Sumber :** Data Sementara BAPPEDA Kab. Garut Tahun 2022

**Ket:** √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

### **Analisis Kinerja Tahun 2022**

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih* menunjukkan dari 3 indikator yang diukur, keseluruhan indikator (100%) mencapai target yang ditetapkan dengan skala intensitas kinerja mencapai nilai sangat tinggi. Uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

#### **a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:

- Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
- Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD;
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan



d. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

**Tabel 3.42**  
**Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2021**  
**(Kabupaten Se-Jawa Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi)**

NO.	KABUPATEN	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Kabupaten Karawang	85,212	Baik	A
2.	Kabupaten Sumedang	82,330	Baik	A
3.	Kabupaten Tasikmalaya	78,018	Baik	A
4.	Kabupaten Purwakarta	77,523	Perlu Perbaikan	B
7.	Kabupaten Garut	75,701	Perlu Perbaikan	B
8.	Kabupaten Bandung	75,061	Perlu Perbaikan	B
9.	Kabupaten Sukabumi	71,040	Perlu Perbaikan	B
10.	Kabupaten Bogor	68,784	Perlu Perbaikan	B
11.	Kabupaten Majalengka	68,280	Perlu Perbaikan	B
12.	Kabupaten Cirebon	64,288	Perlu Perbaikan	B
13.	Kabupaten Ciamis	62,304	Perlu Perbaikan	B
14.	Kabupaten Subang	61,710	Perlu Perbaikan	B
15.	Kabupaten Pangandaran	58,049	Perlu Perbaikan	B
16.	Kabupaten Bandung Barat	57,673	Perlu Perbaikan	B
17.	Kabupaten Bekasi	56,448	Perlu Perbaikan	B
18.	Kabupaten Indramayu	55,449	Perlu Perbaikan	B
19.	Kabupaten Cianjur	49,446	Sangat Perlu Perbaikan	C



RATA-RATA NASIONAL	65,4534
STANDAR DEVIASI NASIONAL	12,4385

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.714-Bp2d/2022

kelemahan dan kekuatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. Kelemahan :

- i. Dimensi 1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan nilai 8,21 dari bobot 15;
- ii. Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah, dengan nilai 3,120 dari bobot 15;

2. Kekuatan :

- i. Dimensi 2 Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, dengan nilai 14,827 dari bobot 20;
- ii. Dimensi 3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan nilai 14, 882 dari bobot 15;
- iii. Dimensi 4 Penyerapan Anggaran, dengan nilai 20 dari bobot 20;

3. Solusi:

- i. Memperkuat dan Mempertajam Proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah dengan Kebijakan Working Collaborative serta Kebijakan Outcome Sharing dengan Strategi Allignment (Penyelarasan) Kinerja dan Crosscutting Kinerja antara SKPD agar tidak terjadi Tumpang Tindih (duplikasi) Program/Kegiatan/Sub-kegiatan dengan Fokus pada Tema Reformasi Birokrasi Tematik (Quick Wins) yaitu Penurunan Kemiskinan, Peningkatan Investasi dan Pengendalian Inflasi Daerah.
- ii. Memperkuat dan Memberdayakan secara penuh (Full Empowering) Peran dan Fungsi APIP selaku Aktor Utama Pengawal SPIP melalui fungsi Quality Assurance dan Consulting Agency, pada saat Uji keselarasan Dokumen perencanaan dengan Penganggaran (Reviu RKPD, Reviu KUA-PPAS dan Reviu RKA/DPA)
- iii. Memperkuat Kemandirian Keuangan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Program Pendataan Pajak dan Retribusi secara Optimal baik secara Makro dan Mikro dan Pengawasan Kepatuhan Pajak dan Retribusi yang Maksimal.

### c. Predikat Penilaian SAKIP Kabupaten

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Garut menunjukkan bahwa nilai sebesar 74,38 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan Sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
- Hasil evaluasi tahun 2022 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level SKPD.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.43**  
**Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,79
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,99
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,38
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber: ESR Menpan 2022.

### d. Predikat penilaian LPPD Kabupaten

Indikator Kinerja Nilai LPPD Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama,





yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017 didapatkan.

Pada tahun 2022, capaian Predikat penilaian LPPD Kabupaten mencapai sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan target RPJMD di tahun 2022 dengan predikat tinggi telah mencapai target dengan tingkat capaian kinerja 100%. Kondisi tersebut menyamai hasil dengan tahun sebelumnya yaitu sangat tinggi.

*Mewujudkan Pemerataan  
Pembangunan yang  
Berkeadilan serta Kamntapan  
Infrastruktur Sesuai Daya  
Dukung dan Daya Tampung  
Lingkungan serta Fungsi  
Ruang*



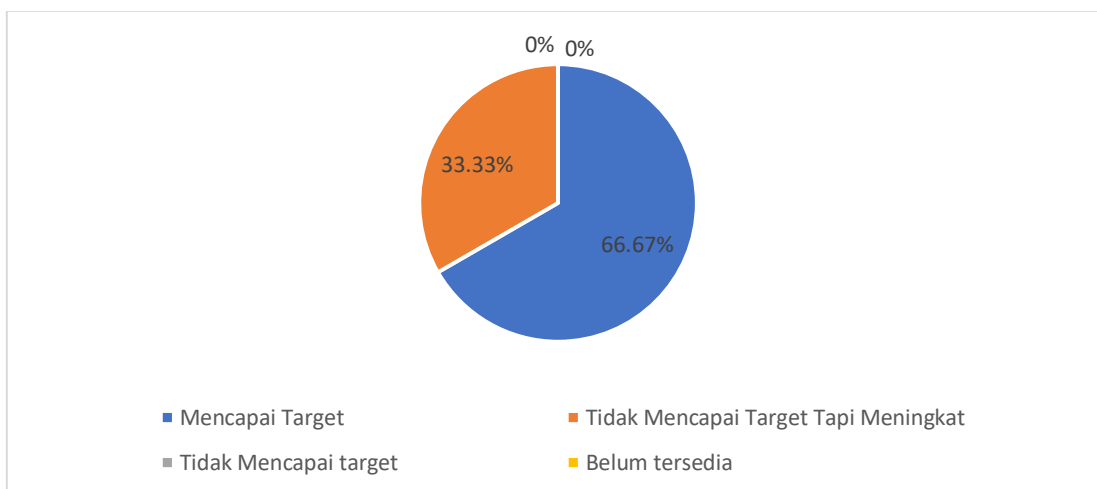
Misi ketiga *mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruk sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan serta fungsi ruang*, bertujuan untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas.

Dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka dilakukan **inovasi pelaksanaan kegiatan "Amazing Garut"** yang diarahkan pada pencapaian 5 Sukses Pembangunan, yaitu **Sukses 1** : Jalan *Mulus*, melalui rencana pembangunan jalan baru sepanjang 61 km; **Sukses 2**: Penataan Perkotaan (*Pengkolan Lenglang, Cileuncang Tuus, Taman Asri & Jalan Caang*); **Sukses 3**: Pengembangan Fasilitas Ekonomi (Penataan/Revitalisasi Pasar Tradisional); **Sukses 4**: Revitalisasi Bangunan Gedung Pemerintah; **Sukses 5**: *Cai Cur Cor* (Peningkatan Cakupan Air Bersih).

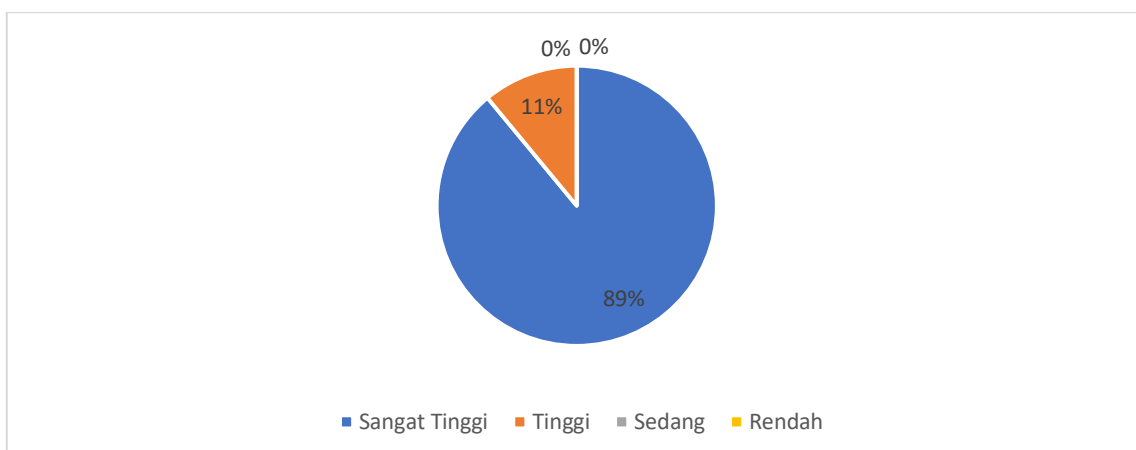
Untuk mencapai misi mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, telah ditetapkan sebanyak 7 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan.

Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 3 :

- a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :
  - 6 indikator (66.67%) mencapai atau melampaui target;
  - 3 indikator (33.33%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari tahun lalu;
  - 0 indikator (0%) tidak mencapai target.



b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 3 yaitu 8 indikator (89%) menunjukkan skala nilai sangat tinggi dan 1 indikator (11%) menunjukkan nilai tinggi .



Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 3 adalah sebagai berikut:

### Misi 3 Sasaran Strategis 1

*Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian*

#### Analisis Kinerja Tahun 2022

Sasaran strategis *meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga



sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya *mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang*. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran, yaitu persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian* disajikan pada tabel 3.44 berikut dibawah ini :

**Tabel 3.44**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 3.1**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian Target Akhir 2024 (%)
1 Prosentase Kemantapan Jalan	49,92%	52,61%	51,42%	97,74%	▲	57,92%	88,77%

**Sumber :** BAPPEDA Kab Garut Tahun 2022

**Ket:** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,

✗ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

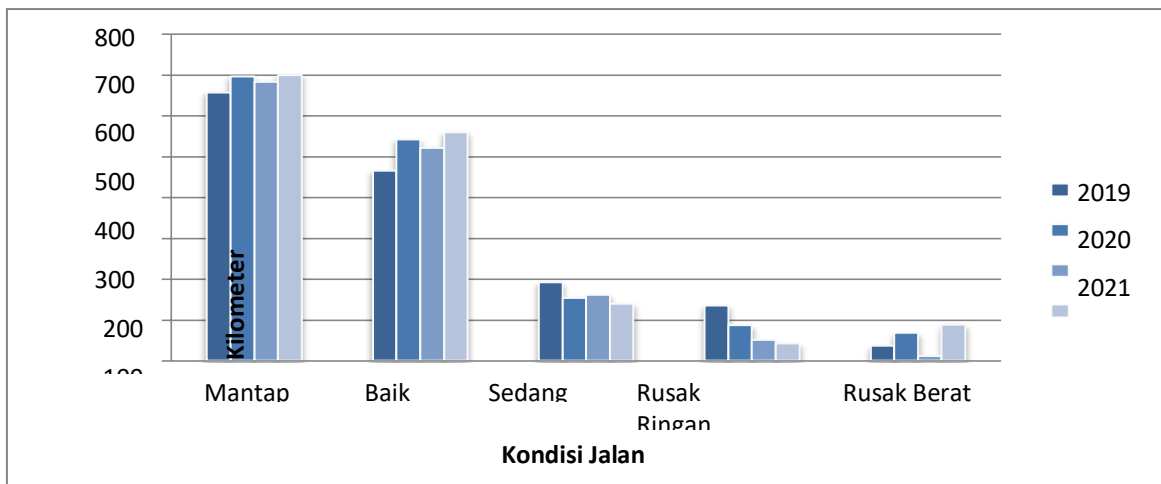
**a. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.45**  
**Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2019- 2022**

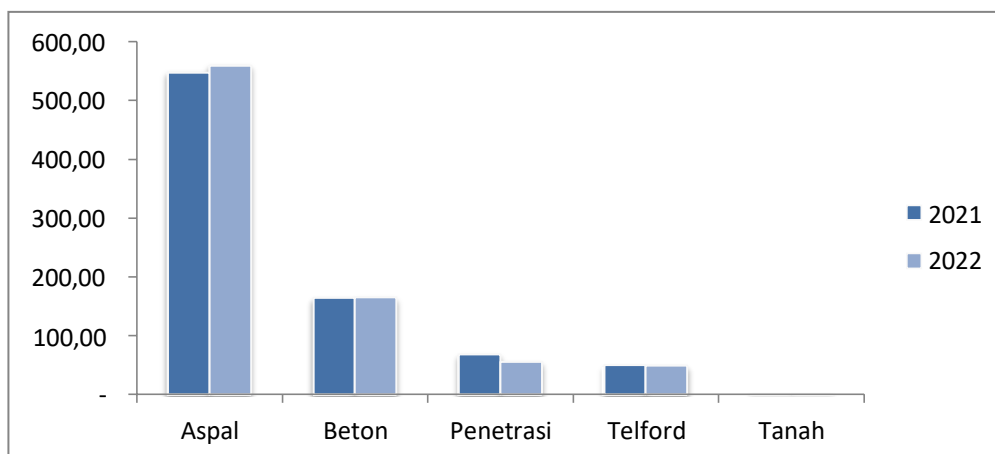
No	Kondisi	Panjang (Km)			
		2019	2020	2021	2022
1	Mantap (baik+sedang)	656,66	695,68	682,63	698,54
2	Baik	464,61	541,62	520,75	558,88
3	Sedang	192,05	154,06	161,88	139,66
4	Rusak Ringan	135,32	86,61	51,17	42,8
5	Rusak Berat	37,02	68,43	11,48	87,66
<b>Total</b>		<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	<b>829,00</b>

*Sumber: Bidang Bina Marga Dinas PUPR*

**Gambar 3.36**  
**Kondisi Jalan Kabupaten 2019-2022**



Sumber: Bidang Bina Marga Dinas PUPR



Sumber: Bidang Bina Marga Dinas PUPR

## b. Analisis Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian* menunjukkan dari 1 indikator yang diukur, dengan tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu dengan skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi. Uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

### Prosentase Jalan Kabupaten Mantap (Baik dan Sedang)

Tingkat kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pada tahun 2022 mengalami peningkatan sepanjang 58,57 km dari 1.947,84 km pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2022, kemantapan jalan



mencapai 51,42% dari target sebesar 52,61% dengan tingkat capaian sebesar 97,74%.

Kondisi mantap jalan kabupaten pada tahun 2022 mengalami peningkatan sepanjang 41,88 km (5,05%) dibandingkan dengan kondisi mantap jalan kabupaten pada tahun 2019 sepanjang 656,66 km atau sebesar 79,21%. Tingkat kemantapan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2022 sebesar 84,26%.

Rendahnya kemantapan jalan terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- 1). belum optimalnya pemeliharaan jalan dan kelengkapan jalan seperti drainase;
- 2). rendahnya kualitas konstruksi;
- 3). belum fungsionalnya jalan-jalan baru;
- 4). masih terbatasnya kapasitas jalan menuju destinasi wisata;
- 5). masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra pertanian;
- 6). masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra ekonomi produktif lainnya.

Apabila dibandingkan dengan kondisi kemantapan jalan Provinsi Jawa Barat, menargetkan kemantapan jalan di Jawa Barat meningkat menjadi 83,84 persen pada tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2022, kemantapan jalan provinsi mencapai 82,79 persen. Sejumlah upaya dilakukan Pemprov Jabar melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar, di antaranya meningkatkan jalan provinsi dan memperbaiki jembatan.

### Misi 3 Sasaran Strategis 2

#### *Meningkatnya kemajuan pembangunan desa*

Sasaran strategis *meningkatnya kemajuan pembangunan desa* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya *mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang*. Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, dilakukan terhadap 1 indikator sasaran yang telah ditetapkan target pencapaiannya, baik terhadap

target tahun 2022, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *meningkatnya kemajuan pembangunan desa* disajikan pada tabel 3.46 berikut dibawah ini:

**Tabel 3.46**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 3.2**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian Target Akhir 2024 (%)
1 Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	100%	94,77%	100	102,93%	✓	100%	100%

**Sumber : BAPPEDA Kab Garut Tahun 2022**

**Ket:** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,

✗ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Pada Tahun 2022, meningkatnya kemandirian ekonomi, lingkungan dan social maysarakat di ukur dengan menggunakan Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang. Dari hasil perhitungan oleh dinas terkait, Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang sebesar 100% atau mencapai 102,93% dari target Tahun 2022 sebesar 94,77%.

Perbandingan pada tahun sebelumnya, realisasi dari Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang pada Tahun 2021 sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, tergambar bahwa kinerja dinas terkait telah berhasil.

### Misi 3

### Sasaran Strategis 3

#### *Meningkatnya Pemenuhan Akses Layanan Sumbr Air Minum dan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan*

Sasaran strategis *Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 2 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan* disajikan pada tabel 3.47 berikut:



**Tabel 3.47**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 3.3**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian Target Akhir 2024 (%)
1 Cakupan Air Minum Layak	86,96%	89,27%	88,51%	99,15%	▲	90,74%	85,05%
2 Cakupan Sanitasi Layak	67,2 %	67,69%	67,69%	100%	✓	100%	67,03%

**Sumber :** Lapkin PUPR Kab Garut Tahun 2022

**Ket:** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

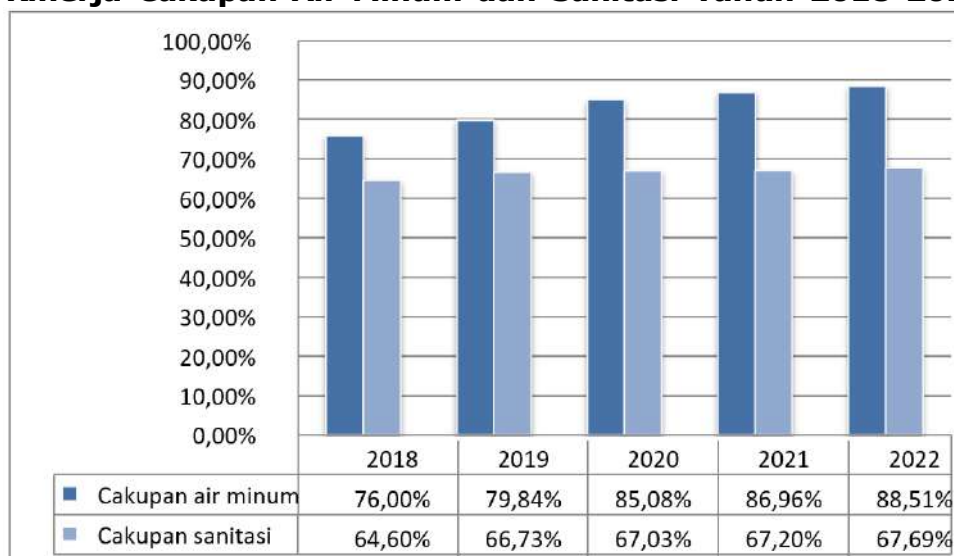
**a. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.48**  
**Kinerja Cakupan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan air minum layak	76%	79,84%	85,08%	86,96%	88,51%
2	Cakupan sanitasi layak	64,60%	66,73%	67,03%	67,20%	67,69%

**Sumber:** Bidang AMPLP Dinas PUPR

**Gambar 3.37**  
**Kinerja Cakupan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2018-2022**



**Sumber:** Bidang AMPLP Dinas PUPR





## **b. Analisis Kinerja Tahun 2022**

### ✓ **Cakupan Air Minum Layak**

Pencapaian kinerja cakupan air minum layak pada tahun 2022 sebesar 88,51% mengalami peningkatan 1,55% dari tahun 2021 yang mencapai 86,96%. Jumlah jiwa yang terlayani sampai tahun 2022 bertambah sebanyak 181.279 jiwa dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah terlayani sebanyak 2.186.750 jiwa. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini adalah :

- 1). pengelolaan pasca pembangunan tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilakukan;
- 2). belum dilakukan potensi menjalin kerjasama dengan non pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah menyebabkan tidak optimalnya kualitas pembangunan maupun kuantitas sumber air minum dan sanitasi;
- 3). belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber air untuk kebutuhan air baku;
- 4). belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan air minum. baik segi sumber daya manusia maupun keandalan suatu kelembagaan tersebut;
- 5). belum memiliki lokasi prioritas dalam rencanapembangunan. Ada kalanya masih dilakukan by project tanpa dilakukan studi awal yang matang disesuaikan dengan kondisi lahan dan keterkaitan dengan sektor lainnya;
- 6). masih rendahnya kualitas air baku dan tidak meratanya kuantitas dan ketersediaan air baku.

Solusi atas permasalahan tersebut:

Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman dengan Melaksanakan pembangunan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan lokasi prioritas (rawan air, kemiskinan, AKI/AKB dan stunting)

### ✓ **Cakupan Sanitasi Layak**

Adapun Pencapaian kinerja cakupan sanitasi layak pada tahun 2022 sebesar 67,69% mengalami peningkatan 0,49% dari tahun 2021 yang mencapai 67,20%. Jumlah rumah tangga yang terlayani sampai tahun 2022 bertambah sebanyak 23.821 rumah tangga dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah terlayani sebanyak 575484 rumah tangga.

Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini adalah penyelenggaraan pemenuhan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik :

- 1). masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah;
- 2). belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan;
- 3). angka BABS masih tinggi;
- 4). belum ada regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten;
- 5). kabupaten;
- 6). belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah.

Solusi:

Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan sistem air limbah yang layak dengan Melaksanakan pembangunan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan lokasi prioritas (rawan air, kemiskinan, AKI/AKB dan stunting).

### Misi 3 Sasaran Strategis 4

#### *Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman*

Sasaran strategis *meningkatkan kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *meningkatkan kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman* ini disajikan pada tabel 3.49 berikut ini:

**Tabel 3.49**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 4**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian Target Akhir 2024 (%)
1 Luas Kawasan Permukiman Layak Huni	6727	6673	6825	102,28%	√	6894	97,49%

**Sumber :** BAPPEDA Kab Garut Tahun 2022

**Ket:** √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✘ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia



## Analisis Kinerja Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan permukiman* menunjukkan dari 1 indikator yang diukur, sebanyak 1 indikator (100%) telah mencapai target. Uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

### a. Luas Kawasan Permukiman Layak Huni

Luas kawasan permukiman layak huni pada tahun 2021 telah mencapai target RPJMD yaitu sebesar 6727 hektar. Pada Tahun 2022 adanya peningkatan luas Kawasan permukiman layak huni menjadi 6825 hektar. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2022 capaian kinerja terhadap luas permukiman layak huni mencapai 102,28%. Adapun yang mempengaruhi peningkatan luas kawasan permukiman layak huni adalah Meningkatnya hunian dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Indikator penunjangnya yaitu adanya peningkatan penanganan rumah korban bencana dan terdampak program pemerintah, menurunnya luasan permukiman kumuh, dan tercapainya target penanganan rumah tidak layak huni.

**Tabel 3.50**  
**Faktor Peningkatan Luas Kawasan Permukiman Layak Huni**

No.	Sasaran		Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target) 2022	Realisasi 2022
	Uraian	Indikator			
1.	Meningkatnya hunian dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai	Prosentase penanganan rumah korban bencana dan terdampak program pemerintah	%	100	100
		Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	ha	1	1,3
		Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	1.112	1.496

Sumber: Lakip DisPerkim, 2022.

**Misi 3 Sasaran Strategis 5***Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir*

Sasaran strategis *Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya upaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 2 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir* disajikan pada tabel 3.51 berikut dibawah ini:

**Tabel 3.51**  
**Pengukuran Sasaran Strategis 3.5**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Perubahan 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian Target Akhir 2024 (%)
1 Persentase Luas Area Ynag Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	81,89%	80,7%	82,7%	102,48%	√	88,04%	93,01%
2 Persentase Luas Genangan Alr	70%	50%	60%	83,33%	√	0	-

**Sumber :** BAPPEDA Kab Garut Tahun 2022

**Ket:** √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✘ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

**Analisis Kinerja Tahun 2022**

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir* menunjukkan dari 2 indikator yang diukur telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kedua indikator tersebut pada skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi, dengan uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

**A. Persentase Luas Area Yang Terlayani Oleh Jaringan Irisagasi**

Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi. Target kinerja 80,70% dicapai dengan areal terlayani seluas 12.966 Ha, capaian tahun 2022 sebesar 82,70% diperoleh dari areal terlayani sampai dengan Tahun 2022 seluas 13.287,41 Ha.



**Tabel 3.52**  
**Luas Areal Irigasi Yang Terlayani**

No	Daerah Irigasi	Luas Areal		Areal Terlayani (Ha)
		Baku (Ha)	Potensial (Ha)	
1	Badama	555,00	431,44	458,99
2	Baranangsiang	882,00	556,67	729,41
3	Beulahnangka	459,00	433,03	379,59
4	Cadasgantung	321,00	121,45	265,47
5	Cianten	586,00	586,00	484,62
6	Ciawi	344,00	344,00	284,49
7	Cibedug	517,00	491,75	427,56
8	Cibuyutan Selatan	322,00	315,75	266,29
9	Cibuyutan Utara	463,00	460,63	382,90
10	Cicapar	386,00	348,16	319,22
11	Cijayana	286,00	285,81	236,52
12	Cikamiri	765,00	714,00	632,66
13	Cikamiri II	354,00	328,01	292,76
14	Cikuray	75,00	75,00	62,03
15	Cimanuk	874,00	772,54	722,80
16	Cimaragas	809,00	786,81	669,04
17	Cimarijawa	437,00	437,00	361,40
18	Ciojar	303,00	285,25	250,58
19	Cipacing	270,00	266,25	223,29
20	Cipancar	520,00	519,55	430,04
21	Cipancong	355,00	353,73	293,59
22	Cipandan	280,00	279,78	231,56
23	Cipeujeuh	437,00	337,09	361,40
24	Cirompang	847,00	815,05	700,47
25	Ciroyom	762,00	758,89	630,17
26	Cisalak	61,00	61,00	50,45
27	Cisangkan	118,00	101,22	97,59
28	Citameng I	507,00	488,00	458,99
29	Citameng II	341,00	340,89	729,41



No	Daerah Irigasi	Luas Areal		Areal Terlayani (Ha)
		Baku (Ha)	Potensial (Ha)	
30	Citameng III	151,00	126,50	419,29
31	Citameng IV	484,00	484,09	282,01
32	Citikey	375,00	374,58	124,88
33	Curuggebul	136,00	134,03	400,27
34	Leuwibitung	327,00	260,32	310,13
35	Leuwibolang	154,00	125,93	112,47
36	Parigi	408,00	405,07	270,43
37	Simpangsari	236,00	224,43	127,36
38	Sindujaya	560,00	546,20	337,42
<b>Jumlah</b>		<b>16.067,00</b>	<b>14.775,90</b>	<b>13.287,41</b>

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2022

Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak kinerja demi peningkatan luas Areal yang terlayani irigasi diantaranya melalui:

1. Meningkatkan keterampilan petugas pengelola OP lapangan;
2. Pemutakhiran panduan/manual Operasi (OP), dikaitkan fenomena ketersediaan air yang semakin menurun;
3. Banyak sarana dan prasarana jaringan irigasi yang di rehabilitasi;
4. Fasilitas bagi petugas OP lapangan yang memadai;
5. Teraplikasikannya garis sempadan sumber daya air khusus sempadan bangunan dan saluran jaringan irigasi.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di atas adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :

- Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis;
- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi Teknis Kabupaten.

Dengan semakin meningkatnya kemantapan jaringan irigasi pemerintah diharapkan dapat mendorong upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan.

## B. Persentase Luas Genangan Air

Kualitas pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Garut menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dilihat dari jaringan irigasi yang semakin baik setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas PUPR, di Perkotaan Garut memperlihatkan adanya penurunan waktu genangan air. Dimana sebelumnya ditargetkan 50% dari genangan air yang ada di Perkotaan Garut menurun, dan untuk ketercapaian kinerjanya sebesar 83,33% dengan besar realisasi 60%.

Adapun **strategi** dalam upaya menurunkan genangan air tersebut yaitu Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan di lapangan, Mulai pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya wilayahnya perkotaan terkadang tidak diiringi dengan pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan saluran dan pengelolaan persampahan, hal tersebut adakalanya menyebabkan mulai seringnya terjadi banjir perkotaan yang durasinya cukup lama walau curah hujan tidak terlalu tinggi. Selain hal tadi juga disebabkan oleh:

- belum optimalnya sistem drainase perkotaan;
- belum optimalnya upaya mengurangi run off pada kawasan terbangun;
- pengendalian ruang dan perizinan bangunan belum optimal dalam mengurangi run off.

### Gambar 3.38

#### Salah Satu Contoh Pembangunan Drainase Taman Kota (ujung merdeka) Kec. Tarogong Kidul



Sumber: Lakip PUPR, 2022

**Misi 3 Sasaran Strategis 6*****Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup***

Sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* pada tabel 3.53 berikut dibawah ini :

**Tabel 3.53**  
**Pencapaian Sasaran Strategis ke 6**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian Target Akhir 2024 (%)
1   Indek Qualityas Lingkungan Hidup	67,82	59,18	69,25	117,02%	✓	63,21	107,29%

**Sumber :** BAPPEDA Kab Garut Tahun 2022

**Ket:** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

**Analisis Kinerja Tahun 2022**

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir* menunjukkan dari 1 indikator yang diukur, sebanyak 1 indikator (100%) telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut pada skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi, dengan uraian hasil pengukuran sebagai berikut :

**Indeks Lingkungan Hidup**

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan mencapai 69,25 poin, meningkat dari tahun 2021 sebesar 67,82 poin, meliputi Indeks Kualitas Air sebesar 64,37 poin, Indeks Kualitas Udara sebesar 89,19 poin dan Indeks Tutupan Vegetasi sebesar 47,64 poin. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2017-2022.



**a. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

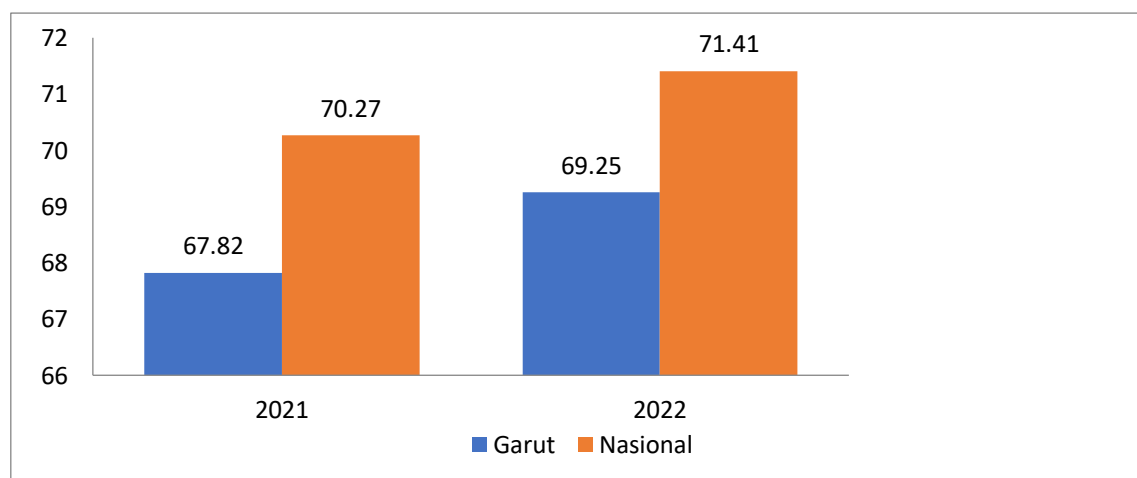
**Tabel 3. 54**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2022**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	56,41	56,22	67,82	69,25
2	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	n/a	1 dok KLHS RTRW	1 dok KLHS RPJMD	20	100	
4	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Persentase desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	25	
6	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	20	
7	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,115	0,115	0,115	0,148	
8	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	n/a	21	22,60	25,27	25,66	
9	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	4	
10	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

**b. Perbandingan Realisasi Garut dengan Nasional**

**Gambar 3.39**  
**Perbandingan IKLH Garut dan Nasional**



Sumber: Pengolahan Data, 2022

**c. Analisis Kinerja****Tabel 3.55**  
**Indeks Kualitas Air Tahun 2022**

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	21	72%	70	50,69
Ringan	8	28%	50	13,68
Sedang	0	0%	30	0,00
Berat	0	0%	10	0,00
<b>Nilai IKA</b>	<b>64,37</b>			

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, 2021

Tahun 2022, capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 89,18 poin dan apabila dibandingkan dengan target perubahan di tahun 2022 sebesar 79,25 poin telah mencapai target dengan tingkat capaian 112,53 %.

**Tabel 3.56**  
**Indeks Kualitas Udara Tahun 2022**

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO <sub>2</sub>	12.20	40,00	0,3050
SO <sub>2</sub>	5.69	20,00	0,2845
Rata-Rata			<b>0,2948</b>
Indeks Udara			<b>89.18</b>

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, 2021

Indeks Vegetasi Tutupan Lahan pada 2022 adalah 47,64 poin dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2021 sebesar 49,72 poin. Dalam Penentuan target, luas tutupan hutan yang digunakan adalah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan dalam perhitungan capaian data tutupan lahan yang digunakan adalah luasan berdasarkan citra satelit.

**Tabel 3.57**  
**Indeks Vegetasi Tutupan Lahan**

No	Kabupaten	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Luas Tutupan Hutan/Lahan (KM <sup>2</sup> )	Hutan/ Luas Wilayah	Indeks Tutupan Hutan/ Lahan
1	Garut	3.107,05	862,36	27,44%	47,64

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, 2022

Peningkatan capaian indikator kinerja tersebut disebabkan dengan **strategi** diantaranya oleh pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Kawasan Lindung.

### Misi 3 Sasaran Strategis

#### *Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*

Sasaran strategis *Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana* pada tabel 3.58 berikut dibawah ini:

**Tabel 3.58**  
**Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1.	Indek Risiko bencana (IRB)	Poin	131,65	185	200	164,91	117,55 %	✓	194

**Sumber :** BAPPEDA Kab Garut Tahun 2022

**Ket:** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

### **Analisis Kinerja Tahun 2022**

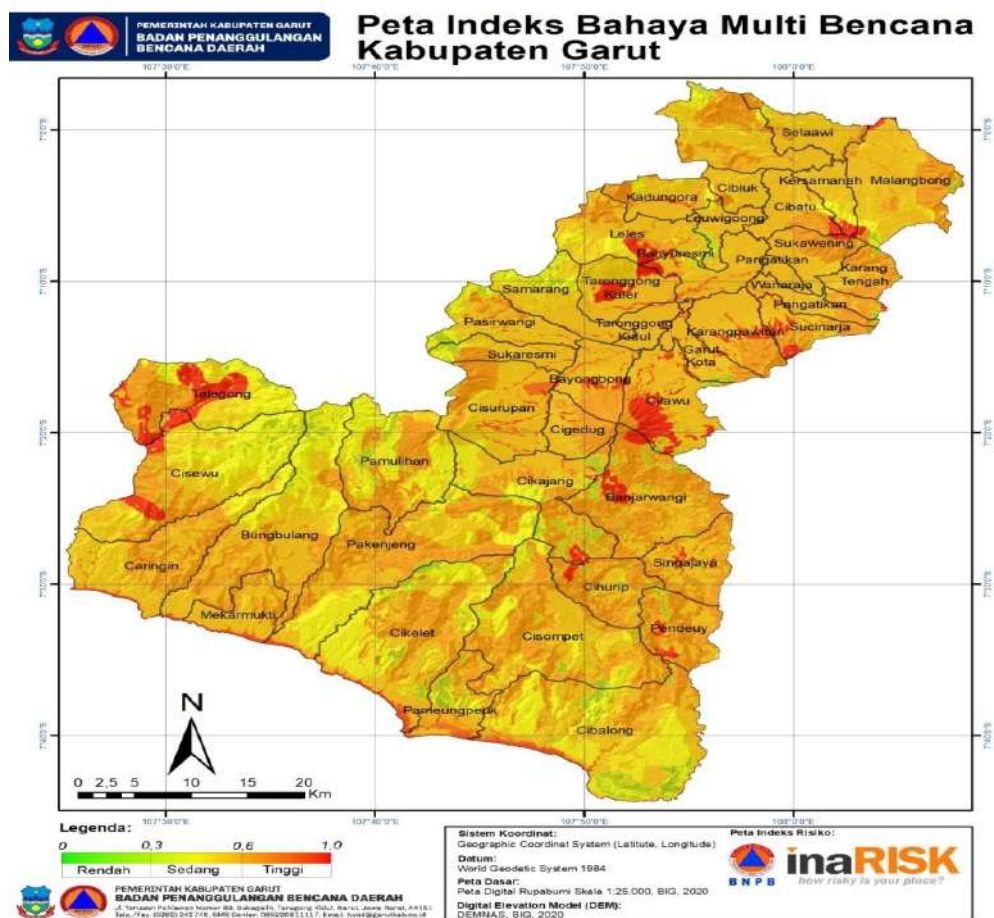
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana* menunjukkan dari 1 indikator yang diukur, sebanyak 1 indikator (100%) telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut pada skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi, dengan uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

### **Indeks Risiko Bencana**

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Metodologi untuk menterjemahkan berbagai indeks tersebut ke dalam peta dan kajian diharapkan dapat menghasilkan tingkat risiko dan peta risiko untuk setiap bahaya bencana yang ada pada suatu daerah. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Bedasarkan table di atas, menunjukkan adanya peningkatan realisasi yang signifikan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 164,91 poin, sehingga dapat diartikan bahwa Kabupaten Garut pada Tahun 2022 minim berisiko terhadap bencana dengan capaian kinerja 117,55% melampaui target yang di tentukan target Perubahan yaitu sebesar 200 poin.

**Gambar 3. 40**



*Meningkatkan Kemandirian  
Ekonomi Masyarakat Berbasis  
Ekonomi Masyarakat Berbasis  
Lokal dan Industri Pertanian  
Serta Pariwisata yang Berdaya  
Saing disertai Pengelolaan  
Sumber Daya Alam secara  
Berkelanjutan*



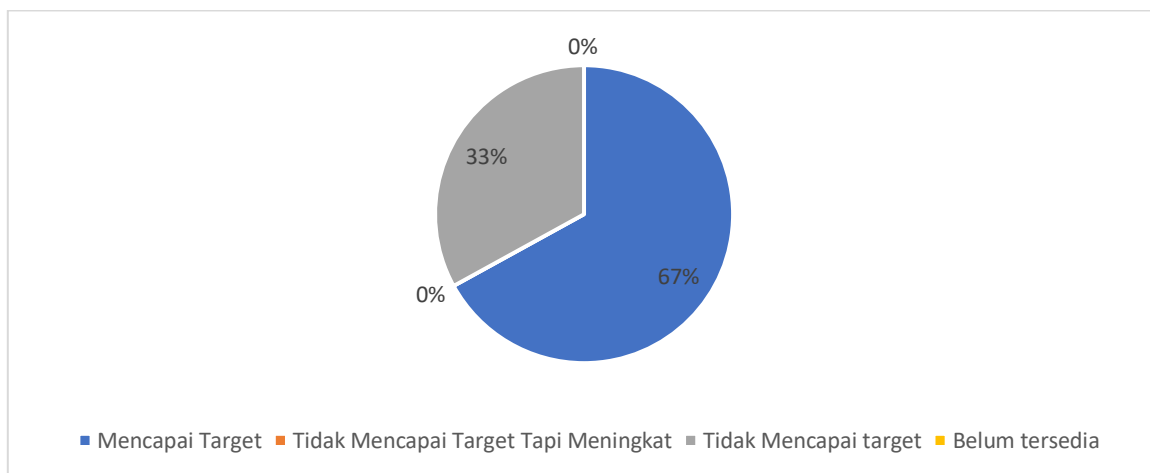
## Misi 4

Misi keempat *Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan* bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan.

Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 4 :

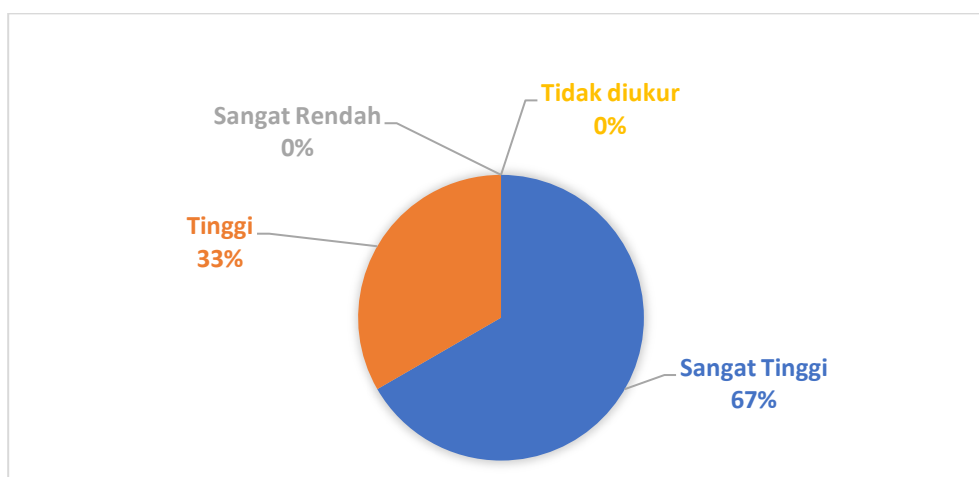
a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :

- 1) Terdapat sebanyak **2 indikator (67%)** melampaui target;
- 2) Terdapat sebanyak **0 indikator (0%)** tidak mencapai target tapi meningkat dari tahun lalu.
- 3) Terdapat sebanyak **1 indikator (33%)** tidak mencapai target.

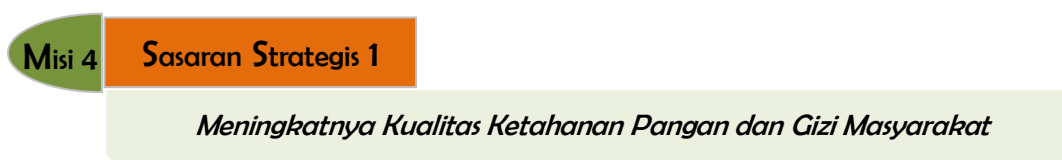


b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 4 :

- 1) Terdapat sebanyak **2 indikator (67%)** dalam skala nilai Sangat Tinggi;
- 2) Terdapat sebanyak **1 indikator (33%)** dalam skala nilai Sedang.



Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 4 adalah sebagai berikut:



Sasaran strategis *meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya *Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang*



*berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.* Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat* disajikan pada tabel 3.59 berikut dibawah ini:

**Tabel 3.59**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 1 pada misi 4**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Perubahan 2022	Realisasi 2022	% Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	79,9	80	83,1	103,88	✓	82

**Sumber :** BAPPEDA Kab Garut Tahun 2022

*Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia*

## Analisis Kinerja Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat* menunjukkan dari 1 indikator yang diukur telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut pada skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi, dengan uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

### 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Skor PPH pada Tahun 2022 sebesar 83,1. Angka tersebut telah melampaui target RPJMD 2022 yaitu 80 dengan capaian kinerja sebesar 103,88%. Apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya, Tahun 2021 skor PPH untuk Kabupaten Garut sebesar 79,9. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang baik, yaitu sebesar 0,06%.



**Keberhasilan dalam ketercapaian target indikator Pola Pangan Harapan, ditunjukkan pada tabel di bawah :**

**Tabel 3.60**  
**Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Garut**  
**Tahun 2021 s.d. Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun Lalu 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya ketersediaan energi dan protein perkapita	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita						
		- Ketersediaan energi perkapita	5.925	6.000	6.000	100	6.000	137,23
		- Ketersediaan protein perkapita	177,8	124,4	182,7	146	126,3	140,5
2	Meningkatnya akses serta pengendalian distribusi dan harga pangan	1. Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV)						
		- Beras	< 9	< 9	< 8	100	< 6	60,00
		- Cabe merah	< 28	< 28	< 27	100	< 25	86,21
		- Bawang merah	< 18	< 18	< 17	100	< 15	78,95
3	Meningkatnya konsumsi energi Dan protein perkapita	1. Konsumsi energi dan protein perkapita						
		- Konsumsi energi perkapita	2.257	2.165	2.268	104	2.175	102,02
		- Konsumsi protein perkapita	61	61,5	61,8	100,4	59,5	100,84
4	Meningkatnya keamanan pangan	1. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	78,28	78	78,26	100,3	79	98,04

Sumber: DKP, Tahun 2022



**Misi 4 Sasaran Strategis 2*****Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal***

Sasaran strategis *meningkatnya pendapatan potensi local* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya *Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan*. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal* disajikan pada tabel 3.61 berikut dibawah ini :

**Tabel 3.61**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 2 pada Misi 4**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1.	PDRB Per Kapita	Juta	23,36	23,385	25,346	108,39	✓	26,58

Sumber : BAPPEDA Kab Garut Tahun 2022

Ket: ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

**a. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

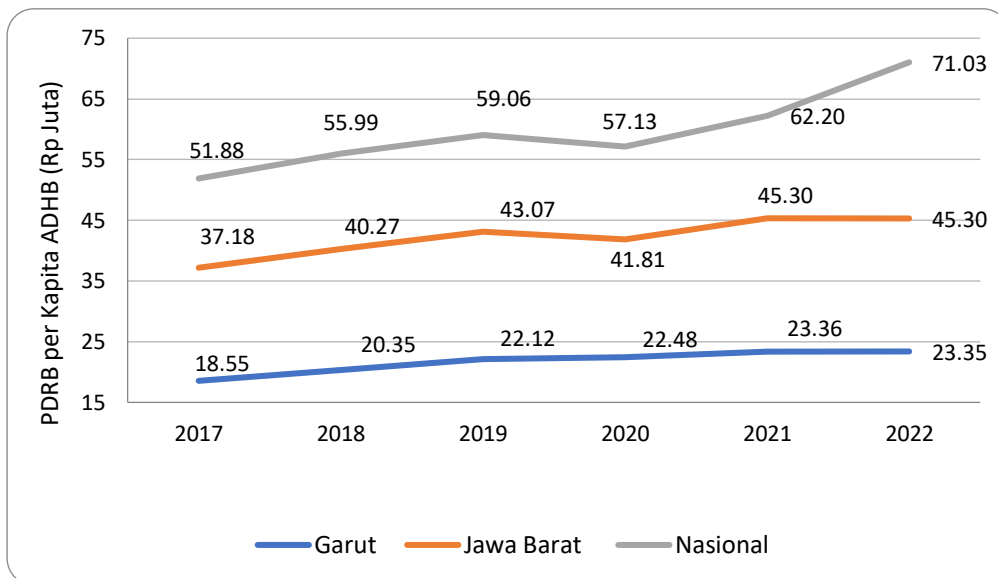
**Tabel 3.62**  
**Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Juta)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	adh Berlaku	adh Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2018	20,35	14,282	2.606.399	9,68	4,26
2019	22,12	14,939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22,48	14,949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23,36	15,349	2.604.787	3,90	2,68
2022	25,35	15,991	2.627.220	8,52	4.18

Sumber : RKPD 2022, data yang dikelola dalam SIPD.

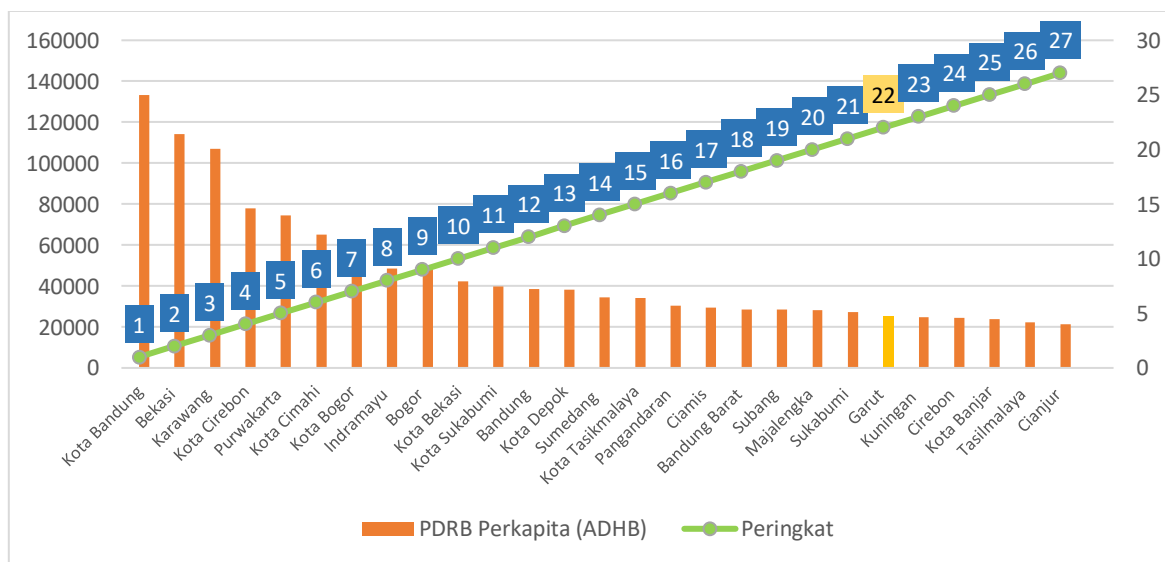
**b. Perbandingan Realisasi Garut dengan Nasional**

**Gambar 3.41**  
**Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku**  
**Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 3.42**  
**Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

### c. Analisis Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *meningkatnya pendapatan potensi lokal* menunjukkan dari 1 indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut pada skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi, dengan uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

#### **PDRB Per kapita**

Pada tahun 2022, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 8,52% atau dari semula Rp 23,36 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 23,36 juta pada tahun 2022 dan mencapai 103,89% dari target RPJMD tahun 2022 sebesar Rp 23,385 juta. PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Garut tidak mutlak merata.

Pencapaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode 2018-2022 terus mengalami peningkatan, kondisi tersebut juga terjadi pada capaian Nasional maupun Provinsi, dan capaian kabupaten Garut masih tergolong rendah atau hanya mencapai 23,36 Juta dari capaian Jawa Barat sebesar Rp.45,30 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp.62,20 juta.

Pencapaian PDRB per kapita adh berlaku kabupaten Garut tahun 2022 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, hanya berada di peringkat 22 diatas Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Cianjur.

Misi 4

Sasaran Strategis 3

*Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah*

Sasaran strategis *meningkatnya realisasi investasi daerah* ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang terkait dengan upaya *Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai*



*pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.* Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *meningkatnya realisasi investasi daerah* disajikan pada tabel 3.63 berikut dibawah ini :

**Tabel 3.63**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 3 pada Msi 4**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1.	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp	1,29	1,47	1,165	79,25%	<b>X</b>	1,52-1,53

**Sumber :** Bappeda Kab Garut Tahun 2022

**Ket:** ✓ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

### Analisis Kinerja Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis *meningkatnya realisasi investasi daerah* menunjukkan dari 1 indikator yang diukur telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut pada skala intensitas kinerja bernilai sangat rendah, dengan uraian hasil pengukuran sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp,165 triliun, turun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp Rp 1,11 triliun. Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2020-2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.64**  
**Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2020-2022**

No	Sektor	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
I	<b>Sektor Primer</b>	<b>10.325.262.000</b>	<b>27.495.961.450</b>	<b>131.105.667.771</b>	
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	-	-	8.837.900.000	346.500.000
2	Peternakan	3.825.262.000	14.701.003.000	119.517.767.711	239.850.908.390
3	Perikanan	-	12.494.958.450	2.500.000.000	8.270.200.000
4	Pertambangan	6.500.000.000	300.000.000	250.000.000	-
II	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>228.149.979.346</b>	<b>360.876.787.997</b>	<b>709.699.945.420</b>	<b>597.724.131.438</b>
1	Industri	24.258.108.481	10.000.000	1.615.400.000	11.068.400.000



No	Sektor	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
	Makanan				
2	Industri Tekstil	101.500.000.000	219.146.176.000	10.116.342.177	313.120.887.414
3	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	88.078.697.288	139.792.845.997	697.898.903.243	272.753.453.688
4	Industri Kayu	1.750.000.000	-	-	-
5	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	200.000
6	Industri Karet dan Plastik	5.419.116.000	-	-	-
7	Industri Mineral dan Non Logam	-	-	-	-
8	Industri Logam, Mesin & Elektronik				100.000.000
8	Ind.Kimia dan Farmasi	561.250.000	-	69.300.000	-
9	Industri Lainnya	6.481.816.250	1.927.766.000	-	681.190.336
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>1.132.369.051.149</b>	<b>365.271.976.840</b>	<b>449.278.377.309</b>	<b>319.048.768.923</b>
1	Listrik, Gas dan Air	384.130.128.291	118.400.256.420	81.003.137.352	37.569.472.157
2	Konstruksi	27.484.569.130	1.252.000.000	215.539.000.000	69.670.800.000
3	Perdagangan & Reparasi	154.124.723.744	43.014.058.877	11.596.239.997	37.799.300.000
4	Hotel & Restoran	116.372.109.154	2.455.000.000	57.618.419.961	57.580.951.194
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	-	200.150.661.543	33.500.000	110.014.845.572
6	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	205.168.860.521	127.878.088.018	78.061.200.000	1.791.000.000
7	Jasa Lainnya	245.088.660.309	-	5.426.879.999	4.622.400.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.370.844.292.495</b>	<b>1.113.847.290.239</b>	<b>1.290.083.990.44</b>	<b>1.165.240.508.751</b>

Sumber : DPMPT Kabupaten Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD.

Jumlah perizinan yang diterbitkan DPMPT tahun 2022 melalui OSS-RBA sebanyak 23.210 perizinan, naik signifikan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 815 perizinan. Perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang selama ini dikelola oleh DPMPT dan paling berkontribusi terhadap jumlah perizinan yang diterbitkan DPMPT kewenangannya dilimpahkan kepada Camat, sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan.

**Tabel 3.65**  
**Data Jumlah Penerbitan Perizinan di Kabupaten Garut Tahun 2020-2022**

No	Jenis Perizinan	Jumlah Penerbitan Perizinan			
		2019	2020	2021	2022*
1	Izin Prinsip Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal	2182	-	-	n/a
2	Izin Prinsip Penanaman Modal Perubahan	-	-	-	n/a
3	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	-	-	n/a
4	Izin Lokasi	19	8	6	n/a
5	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	77	52	39	n/a
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	441	262	-	n/a
7	Izin Gangguan (IG)	-	-	336	n/a
8	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	-	215	53	n/a
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	92	82	n/a
10	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	n/a
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	35	33	15	n/a
12	Izin Trayek Angkutan Perdesaan/Angkutan Kota	192	178	92	n/a
13	Izin Usaha Angkutan	-	-	-	n/a
14	Izin Reklame	20	20	16	n/a
15	Izin Mendirikan Klinik	-	-	-	n/a
16	Izin Operasional Klinik	30	30	17	n/a
17	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	3	n/a
18	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	1	-	n/a
19	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan	2	33	24	n/a
20	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	8	7	8	n/a
21	Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah	-	-	-	n/a
22	Izin Lingkungan	108	60	-	n/a
23	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kecuali Minyak Pelumas atau Oli Bekas	-	-	-	n/a
24	Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	9	14	17	n/a
25	Izin Usaha Industri	-	4	9	n/a
26	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	-	4	8	n/a
27	Izin Usaha Budidaya Perikanan	-	-	2	n/a
28	Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	-	n/a
29	Izin Sewa Tanah Dan Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Orang dan Kendaraan, Bangunan rumah, Toko dan Kios yang ada di Bantaran Irigasi	-	-	-	n/a
30	Izin menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan	19	19	-	n/a
31	Surat Izin Apotek	40	40	68	n/a
32	Surat Izin Toko Obat	8	8	11	n/a
33	Surat Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	1	n/a
34	Surat Izin Laboratorium Klinik Umum	-	-	-	n/a
35	Izin Usaha Budidaya Peternakan	-	-	1	n/a
36	Tanda daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	-	-	-	n/a
37	Tanda daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	-	-	2	n/a
38	Tanda daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	-	-	3	n/a



No	Jenis Perizinan	Jumlah Penerbitan Perizinan			
		2019	2020	2021	2022*
39	Izin Usaha Tanaman Pangan			2	n/a
40	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	-	730
Jumlah		3.559	1.080	815	-

Sumber : DPMPT Kabupaten Garut, Tahun 20220, yang dikelola dalam SIPD.

Adapun **faktor pendorong** terkait pelaksanaan kegiatan/program pada Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Adanya forum PTSP sebagai salah satu sarana koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain;
2. Adanya aplikasi perizinan online yang terus dikembangkan;
3. Komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi pelayanan publik;
4. Dukungan OPD Teknis terkait Perizinan.

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya bahan-bahan promosi investasi
2. Kompetensi pegawai yang menangani pelayanan perizinan sangat terbatas
3. Masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait perizinan

Dengan tidak tercapainya program/kegiatan ini, berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat/pelaku usaha secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan forum PTSP Provinsi dan kabupaten/kota lain
2. Meningkatkan koordinasi dan rapat secara berkala dengan dinas teknis dan aparat kecamatan terkait perizinan dan penanaman modal
3. Meningkatkan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pelaku UMKM.

## D Capaian Prestasi dan Penghargaan

Penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam tahun 2022 diantaranya:



**Tabel 3.66**  
**Capaian Prestasi dan Penghargaan**

<b>NO</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>	<b>SKPD</b>
1	PEMBICARA pada W20 2022 (Bapak Bupati Garut)		
2	ANUGERAH KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) 2022	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)	BKD
3	Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara 2022 (BKD GARUT)	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)	BKD
4	World Athletics Certification System untuk Untuk Stadion RAA Adiwijaya	World Athletics	PUPR
5	Penghargaan Nilai Reformasi Birokrasi (B) dan SAKIP (BB)	MenpanRB	
6	Opini Laporan Keuangan WTP	BPK	
7	Komitmen dalam "Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer bulan Juli-Oktober 2022	Mentri Kesehatan	DINKES
8	Pembicara pada Rakontek Kesmas 2022 (Tim Puskesmas Banjarwangi)	Ditjen Kesmas	DINKES
9	Sanitarian Terbaik	Mentri Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	DINKES
10	Pemda yang berkomitmen melaksanakan penanggulangan kebutaan akibat katarak	Mentri Kesehatan	DINKES
11	RSUD dengan 75,13% Penggunaan/Belanja Alkes Dalam Negeri tertinggi se Provinsi Jabar	Ditjen Kefarmasian dan Alkes - Menkes	RSUD
12	Terbaik III Anugrah Media Humas (AMH) 2022 Kategori Siaran Pers (Media	Menkominfo	DISKOMINFO





	Online)		
13	OKKPD Terbaik Pembinaan Keamanan Pangan Tingkat Nasional	Nasional	DKP
14	Surak Ibra - Warisan Budaya Tak Benda	Mendikbud Riset dan Teknologi	DISPARBUD
15	Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Menteri Koperasi dan UKM	DISKOP UKM
16	Penyuluh Berprestasi	Menteri Pertanian	DISTAN
17	Lomba Cipta Media Pembelajaran (LCMP) Nasional 2022		
18	Juara 1 CABOR Pencak Silat OOSN	Olimpiade Olahraga Nasional	

Sumber: BAPPEDA Kab. Garut, 2022

## E. Evaluasi Internal Terkait Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut

### 1. Evaluasi Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD

Evaluasi terhadap hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Garut, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, hasil pengukuran tingkat pencapaian terhadap 11 (sebelas) indikator tujuan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2022, sampai triwulan IV Tahun 2022, belum dapat disajikan seluruhnya dikarenakan data yang belum tersedia. Pada tahun 2021, hasil pengukuran terhadap 5 (lima) tujuan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan menggunakan 11 (sebelas) indikator tujuan pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2021, adalah sebagai berikut :
  - 1). Sebanyak 6 indikator (54,54%) mencapai atau melampaui target, yaitu indeks kesalehan sosial masyarakat, persentase penduduk bekerja, indeks reformasi birokrasi, indeks daya saing infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup, dan indeks risiko bencana;



- 2). Sebanyak 4 indikator (36,36%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks daya beli;
  - 3). Sebanyak 1 indikator (9,09%) tidak mencapai target, yaitu jumlah penduduk miskin.
2. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan terhadap 17 sasaran strategis dengan menggunakan 23 indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran tingkat pencapaian terhadap 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2022, sampai triwulan IV Tahun 2022, belum dapat disajikan seluruhnya dikarenakan data yang belum tersedia. Pada tahun 2021, hasil pengukuran terhadap 17 (tujuh belas) sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dengan menggunakan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2021, adalah sebagai berikut :
- 1). Sebanyak 14 indikator (60,87%) mencapai atau melampaui target, yaitu Indeks kesalehan Sosial Masyarakat, Harapan Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai Evaluasi SAKIP, Nilai Evaluasi LPPD, Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang, Luas Kawasan Permukiman Layak Huni, Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, Skor PPH, dan PDRB per kapita;
  - 2). Sebanyak 3 indikator (13,04%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, dan Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA);
  - 3). Sebanyak 6 indikator (26,09%) tidak mencapai target, yaitu Persentase penduduk miskin, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Persentase Kemantapan Jalan, Cakupan Air Minum Layak, Cakupan Sanitasi Layak, dan Persentase Penurunan Luas Genangan Air.
3. Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2022 dengan



RKPD Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari sebanyak 1.058 kegiatan APBD Tahun 2022, yang terdapat pada RKPD Tahun 2022 sebanyak 1.059 kegiatan atau mencapai 99,91%.

4. Perbandingan pagu indikatif RPJMD Tahun 2022 terhadap realisasi APBD TA. 2022, dari total pagu indikatif RPJMD Tahun 2022 sebesar Rp. 5.968.171.984.319,00 melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2022, sampai Triwulan IV Tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.688.455.777.826,00 atau sebesar 78,56%%.
5. Rata-rata tingkat capaian RPJMD s.d. Triwulan IV Tahun 2022 adalah 81,71% untuk target kinerja dan 47,41%% untuk target anggaran.
6. Capaian rata-rata RKPD Kabupaten Garut pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah 95,25% untuk target kinerja, dan 94,91% untuk target anggaran. Realisasi RKPD sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.
7. Terdapat kegiatan yang ada dalam RKPD tetapi tidak ada dalam APBD yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada saat tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan, sehingga terdapat program, kegiatan maupun sub kegiatan yang mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan antara realisasi dokumen rencana dengan realisasi dokumen anggaran. Pencapaian kinerja program perangkat daerah sampai triwulan IV tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 4.688.455.777.826,00 atau mencapai 95,25% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2022, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,91% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2022, dengan rincian untuk setiap prioritas pembangunan sebagai berikut :



- 1). Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, mencapai sebesar 103,98% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 99,62%;
  - 2). Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi, mencapai sebesar 98,06% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 96,96%;
  - 3). Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga, mencapai sebesar 91,85% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 94,66%;
  - 4). Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, mencapai sebesar 95,54% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 92,73%;
  - 5). Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya, mencapai sebesar 93,10% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 94,55%;
  - 6). Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, mencapai sebesar 86,21% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 90,08%;
  - 7). Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, mencapai sebesar 97,40% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 97,52%;
  - 8). Peningkatan investasi dan pendapatan daerah, mencapai sebesar 88,87% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 92,66%.
8. Dari sebanyak 412 program dalam RKPD tahun 2022 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.094.111.912.397,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat dalam RKPD Tahun 2022



sebanyak 336 program atau 81,53% dengan dukungan anggaran sebanyak Rp. 2.830.407.463.242,00 atau 55,56% dari total RKPD Tahun 2022. Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dari sebanyak 411 program dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.919.944.484.758,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat sebanyak 336 program atau 81,75% dengan dukungan anggaran sebanyak Rp. 2.711.263.331.217,00 atau 55,11% dari total APBD Tahun Anggaran 2022 dan sudah direalisasikan sampai triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp. 2.609.414.880.199,00 atau 96,24%.

9. Dalam mendukung prioritas pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022, dari sebanyak 412 program dalam RKPD Tahun 2022 dengan total pagu indikatif RKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 5.094.111.912.397,00, yang mendukung langsung terhadap prioritas Nasional sebanyak 336 program atau 81,55% dengan dukungan pagu indikatif Rp. 2.830.407.463.242,00 atau 55,56%. Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dari sebanyak 411 program dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.919.944.484.758,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas Nasional sebanyak 336 program atau 81,75% dengan dukungan anggaran sebanyak Rp. 2.711.263.331.217,00 atau 55,11%, dan sudah direalisasikan sampai triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp. 2.609.414.880.199,00 atau 96,24%.

Berdasarkan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD, upaya tindak lanjut yang diperlukan diantaranya untuk adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi yang diperoleh menjadi salah satu dasar untuk melakukan Perubahan RKPD, Perubahan Renja Perangkat Daerah , KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Format evaluasi hasil Renja SKPD harus diisi dengan benar sesuai dengan tata cara pengisiannya agar data dan informasi yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut perlu melakukan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan dan



melaporkannya secara tertib kepada kepala daerah melalui Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan;

4. Setiap bidang perencanaan di lingkungan Bappeda menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi untuk mendorong konsistensi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
5. Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

## F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

- **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 mencakup:**

### a. Aspek perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Garut telah memiliki sasaran dan indikator kinerja lebih berorientasi hasil, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pemimpin daerah bersama para Kepala PD dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja.

Kabupaten Garut telah menyusun *Cascading* kinerja dan hasilnya telah digunakan untuk penyesuaian dokumen perencanaan termasuk keselarasan program kegiatan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu:

- ✓ Hasil reviu keselarasan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis
- ✓ Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART pada perjanjian kinerja bupati yaitu pada sasaran "Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan Permukiman" hanya menggunakan indikator "luas permukiman layak huni"
- ✓ Ukuran kinerja individu belum selaras dengan ukuran kinerja organisasi

### b. Pengukuran Kinerja



Pemerintah Kabupaten Garut dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh PD dengan menggunakan aplikasi E-SAKIP dan pengukuran kinerja individu melalui aplikasi E-KINERJA. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan pengukuran kinerja di antaranya:

- Monitoring kinerja belum dituangkan pada laporan kinerja sehingga hasil dari pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menentukan strategi dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan;
- Aplikasi E-SAKIP belum dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh PD, sehingga monitoring dan evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- Aplikasi E-KINERJA dan E-SAKIP belum diintegrasikan

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Kabupaten Garut telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat organisasi PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* pemda. Pada laporan kinerja Pemda dan PD telah menyampaikan hambatan dan strategi untuk perbaikan kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk pelaporan kinerja yaitu:

- Laporan kinerja pada sebagian besar PD belum memberikan analisis yang memadai atas perbandingan capaian kinerja pemda dengan kinerja provinsi dan nasional
- Laporan kinerja belum menyajikan data tentang refofusing anggaran sehingga belum tampak implementasi dan performance-based budgeting yang telah dilakukan.

#### **d. Evaluasi Internal**

Inspektorat Kabupaten Garut telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada PD dan telah menyusun pedoman evaluasi internal sesuai dengan PermenpanRB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:



- Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya digunakan sebagai pemberian reward dan punishment
  - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum terimplementasi secara maksimal di level PD
  - Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD.
- **Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 sebagai berikut :**
- a. Menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi
  - b. Mengintegrasikan aplikasi E\_SAKIP dan E-KINERJA dan mendorong agar PD dan individu menggunakannya sehingga terwujudnya perbaikan kinerja berkelanjutan di level Pemda, PD, dan individu
  - c. Menyusun laporan kinerja berkala (triwulan) atas hasil monitoring kinerja agar dapat menentukan strategi dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan
  - d. Mendorong dilakukannya monitoring dan evaluasi kinerja dan PD secara berkala/periodik sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target kinerja daerah. Berikutnya hasil capaian kinerja tersebut dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment
  - e. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja
  - f. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor di inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP.





### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam tahun anggaran 2022, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.4.670.657.405.901,40 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.626.954.746.948,10 atau 99,06%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.4.684.404.923.196,61, maka realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,23%. Belanja Daerah dimaksud dipergunakan untuk:

**Tabel 3.67**  
**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

KODE	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	REALISASI TA 2021
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
4.1.01.	Pajak Daerah	156,311,500,000.00	157,571,464,634.00	100.81	126,527,804,958.00
4.1.02.	Retribusi Daerah	22,150,188,325.40	15,711,817,595.00	70.93	15,259,959,070.00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,044,369,160.00	7,044,369,160.00	100.00	6,455,066,625.00
4.1.04.	Lain - Lain PAD yang Sah	298,937,311,907.00	305,711,115,021.10	102.27	412,540,546,265.61
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>484,443,369,392.40</b>	<b>486,038,766,410.10</b>	<b>100.33</b>	<b>560,783,376,918.61</b>
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>4.2.01.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>				
4.2.01.01.	Dana Bagi Hasil Pajak	127,728,253,238.00	129,254,394,668.00	101.19	139,697,220,120.00
4.2.01.02.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	111,038,803,527.00	132,610,716,585.00	119.43	248,139,310,049.00
4.2.01.03.	Dana Alokasi Umum	1,665,908,667,000.00	1,657,145,048,168.00	99.47	1,665,908,667,000.00
4.2.01.04.	Dana Alokasi Khusus	1,031,181,861,000.00	964,264,074,173.00	93.51	659,141,183,682.00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>2,935,857,584,765.00</b>	<b>2,883,274,233,594.00</b>	<b>98.21</b>	<b>2,712,886,380,851.00</b>
<b>4.2.02.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
4.2.02.01.	Dana Transfer Lainnya	530,371,893,000.00	530,022,372,200.00	99.93	549,086,677,200.00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>530,371,893,000.00</b>	<b>530,022,372,200.00</b>	<b>99.93</b>	<b>549,086,677,200.00</b>
<b>4.2.03.</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
4.2.03.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	270,388,964,314.00	269,534,660,055.00	99.68	216,472,865,839.00
4.2.03.02.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan)	404,564,228,837.00	398,433,094,737.00	98.48	306,126,489,384.00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>674,953,193,151.00</b>	<b>667,967,754,792.00</b>	<b>98.97</b>	<b>522,599,355,223.00</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>4,141,182,670,916.00</b>	<b>4,081,264,360,586.00</b>	<b>98.55</b>	<b>3,784,572,413,274.00</b>
<b>4.3.</b>	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
4.3.01.	Pendapatan Hibah	38,825,055,689.00	46,365,278,610.00	119.42	20,133,542,423.00



4.3.03.	Lain - lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	6,206,309,904.00	13,286,341,342.00	214.08	318,915,590,581.00
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>45,031,365,593.00</b>	<b>59,651,619,952.00</b>	<b>132.47</b>	<b>339,049,133,004.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,670,657,405,901.40</b>	<b>4,626,954,746,948.10</b>	<b>99.06</b>	<b>4,684,404,923,196.61</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.01.	Belanja Pegawai	1,779,790,468,944.20	1,678,298,468,729.00	94.30	1,711,698,801,354.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,191,358,135,018.73	1,142,664,116,391.00	95.91	1,088,825,013,582.00
5.1.04.	Belanja Subsidi	951,000,000.00	951,000,000.00	100.00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	395,928,841,186.00	380,148,919,928.00	96.01	477,437,424,029.00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	26,238,195,000.00	25,874,389,999.00	98.61	11,042,257,615.00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3,394,266,640,148.93</b>	<b>3,227,936,895,047.00</b>	<b>95.10</b>	<b>3,289,003,496,580.00</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	28,823,821,290.00	21,374,678,883.00	74.16	34,923,261,221.00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123,372,268,779.00	115,797,914,649.00	93.86	114,413,219,545.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156,653,893,243.63	149,847,397,573.00	95.66	204,878,310,049.00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	418,336,007,552.80	394,817,632,912.00	94.38	184,540,470,291.00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19,107,713,631.00	19,106,154,881.00	99.99	20,042,025,322.00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>746,293,704,496.43</b>	<b>700,943,778,898.00</b>	<b>93.92</b>	<b>558,797,286,428.00</b>
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	47,841,981,894.04	28,771,620,642.00	60.14	39,452,922,903.00
	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>47,841,981,894.04</b>	<b>28,771,620,642.00</b>	<b>60.14</b>	<b>39,452,922,903.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4,188,402,326,539.40</b>	<b>3,957,652,294,587.00</b>	<b>94.49</b>	<b>3,887,253,705,911.00</b>
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>				
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	17,892,168,753.00	17,422,666,527.00	97.38	13,045,583,078.00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	713,649,989,466.00	713,300,459,889.00	99.95	749,302,866,592.00
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>731,542,158,219.00</b>	<b>730,723,126,416.00</b>	<b>99.89</b>	<b>762,348,449,670.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>4,919,944,484,758.40</b>	<b>4,688,375,421,003.00</b>	<b>95.29</b>	<b>4,649,602,155,581.00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(249,287,078,857.00)</b>	<b>(61,420,674,054.90)</b>	<b>24.64</b>	<b>34,802,767,615.61</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	264,287,078,857.00	264,287,078,856.61	100.00	240,634,311,241.00
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>264,287,078,857.00</b>	<b>264,287,078,856.61</b>	<b>100.00</b>	<b>240,634,311,241.00</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	15,000,000,000.00	14,999,999,620.00	100.00	11,150,000,000.00
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>15,000,000,000.00</b>	<b>14,999,999,620.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11,150,000,000.00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>249,287,078,857.00</b>	<b>249,287,079,236.61</b>	<b>100.00</b>	<b>229,484,311,241.00</b>



SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	187,866,405,181.71	264,287,078,856.61
--	------	--------------------	--------------------

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 17 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap indikator sasaran strategis disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.68**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	82,234,870,773	79,073,109,767	96,16
2	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	287,421,614,905	267,501,572,000	93,07
3	Meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat	521,715,742,300	513,385,406,655	98,40
4	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	26,821,099,298	26,519,386,842	98,88
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	27,867,002,550	27,120,685,007	97,32
6	Meningkatnya pelayanan public yang professional dan amanah	64,131,792,191	61,972,450,180	96,63
7	Meningkatnya tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih	3,059,346,176,086	2,906,487,527,791	95,00
8	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	328,319,304,717	314,303,342,309	95,73
9	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	6,145,605,099	6,110,830,706	99,43
10	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	35,610,407,504	35,420,259,340	99,47



No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian (%)
11	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	76,435,865,700	75,299,324,823	98,51
12	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	171,220,130,621	165,140,458,412	96,45
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	10,911,650,349	10,856,605,831	99,50
14	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	68,648,556,969	61,831,584,209	90,07
15	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	10,911,650,349	10,856,605,831	99,50
16	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	121,450,598,763	112,706,866,883	92,80
17	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1,842,632,750	1,671,514,000	90,71
<b>Grand Total</b>		<b>4,901,034,700,924</b>	<b>4,676,257,530,586</b>	<b>95,41%</b>

Sumber: Pengolahan Bappeda, 2022

Berikut disajikan perbandingan rata-rata capaian kinerja sasaran terhadap tingkat realisasi keuangan untuk setiap sasaran untuk menggambarkan tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis yang direalisasikan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.69**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)
	<b>MISI 1</b>	<b>7</b>	<b>105,78</b>	<b>913.600.160.271</b>	<b>96,57%</b>
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1	100	79,073,109,767	96,16



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)
2	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1	100.03	267,501,572,000	93,07
3	Meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat	2	99.48	513,385,406,655	98,40
4	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	2	92.72	26,519,386,842	98,88
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	1	127.91	27,120,685,007	97,32
	<b>MISI 2</b>	<b>4</b>	<b>99.53</b>	<b>2.968.453.977.971</b>	<b>95.04 %</b>
6	Meningkatnya pelayanan publik yang professional dan amanah	1	100	61,972,450,180	96,63
7	Meningkatnya tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih	3	99.06	2,906,487,527,791	95,00
	<b>MISI 3</b>	<b>10</b>	<b>104.28</b>	<b>668.962.405.630</b>	<b>95.94%</b>
8	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	1	97.74	61,972,450,180	95,73
9	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	1	102.93	2,906,487,527,791	99,43
10	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	2	99.57	61,972,450,180	99,47
11	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	1	102	2,906,487,527,791	98,51
12	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	2	92.91	165,140,458,412	96,45
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	117,02	10,856,605,831	99,50
14	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	1	117.55	61,831,584,209	90,07
	<b>MISI 4</b>	<b>3</b>	<b>97.17</b>	<b>125.234.986.714</b>	<b>93.32%</b>
15	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	1	103.88	10,856,605,831	99,50



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)
16	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1	18.39	112,706,866,883	92,80
17	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1	79.25	1,842,632,750	90,71
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>101.69</b>	<b>4,676,257,530,586</b>	<b>95.21</b>

Sumber: Pengolahan Bappeda, 2022

Apabila dilakukan perbandingan antara tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian realisasi keuangan untuk setiap sasaran strategis sebagaimana disajikan pada tabel 3.69, maka dapat diperoleh gambaran terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran.

**Tabel 3.70**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
	<b>MISI 1</b>	<b>7</b>	<b>105,78</b>	<b>96,57%</b>	<b>Efisien</b>
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1	100	96,16	Efisien
2	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	1	100.03	93,07	Efisien
3	Meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat	2	99.48	98,40	Efisien
4	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	2	92.72	98,88	Tidak Efisien
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	1	127.91	97,32	Efisien
	<b>MISI 2</b>	<b>4</b>	<b>99.53</b>	<b>94,91%</b>	<b>Efisien</b>
6	Meningkatnya pelayanan public yang professional dan amanah	1	100	96,63	Efisien
7	Meningkatnya tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih	3	99.06	95,00	Efisien
	<b>MISI 3</b>	<b>10</b>	<b>104.28</b>	<b>95.94%</b>	<b>Efisien</b>



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
8	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	1	97.74	95,73	Efisien
9	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	1	102.93	99,43	Efisien
10	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	2	99.57	99,47	Efisien
11	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	2	102	98,51	Efisien
12	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	2	92.91	96,45	Efisien
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	117,02	99,50	Efisien
14	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	1	117.55	90,07	Efisien
	<b>MISI 4</b>	<b>3</b>	<b>97.17</b>	<b>93.32%</b>	<b>Efisien</b>
15	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	1	103.88	99,50	Efisien
16	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1	18.39	92,80	Efisien
17	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1	79.25	90,71	Efisien
	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>101.69</b>	<b>95.21</b>	<b>Efisien</b>

Sumber: Pengolahan Bappeda, 2022



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**



# BAB IV

## PENUTUP



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban tahun kelima atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Garut periode 2019–2024 :

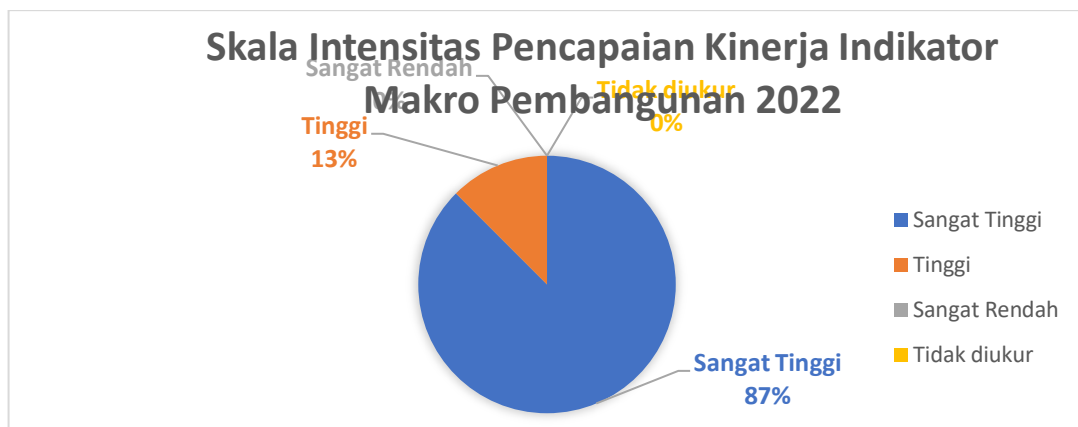
***Garut yang Bertaqwa, Maju, Dan Sejahtera***

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, disajikan informasi atas berbagai upaya pelaksanaan pembangunan Kabupaten Garut yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dilihat dari tingkat capaian atas indikator target tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, diinformasikan pula anggaran dan realisasi yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis, keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun upaya pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

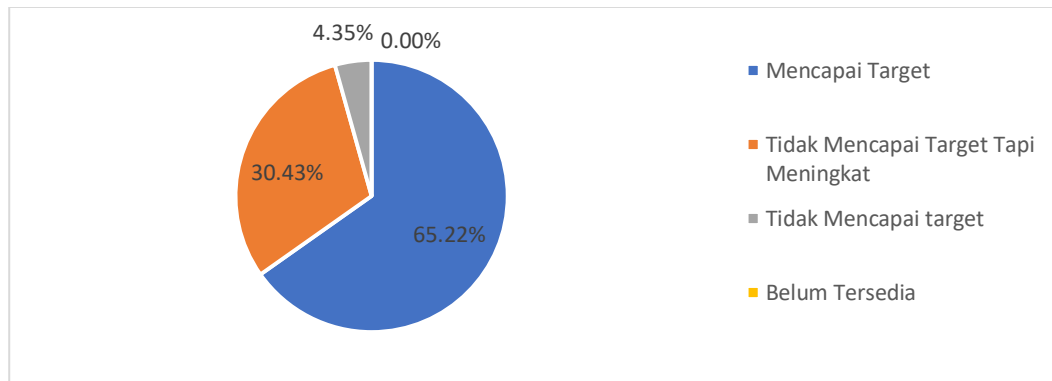
Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 8 indikator makro pembangunan, Sebanyak 5 indikator (62,5%) mencapai atau melampaui target; Sebanyak 2 indikator (25%) tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu; Sebanyak 1 indikator (12,5%) tidak mencapai target;



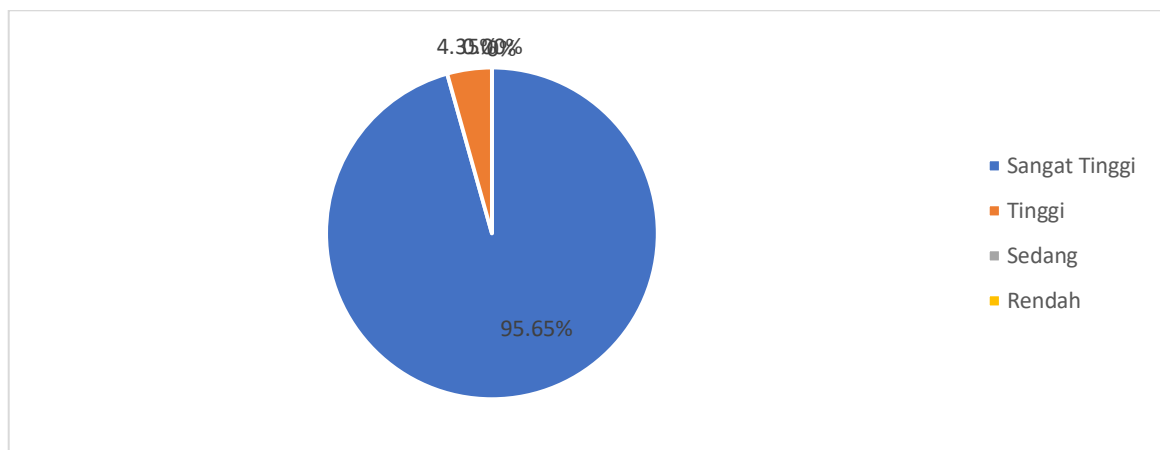
Dari sisi gradasi nilai (skala intensitas) kinerja indikator makro tujuan yang ditargetkan pada tahun 2022 Sebanyak 7 indikator (87%) berada dalam skala nilai Sangat Tinggi, Sebanyak 1 indikator (13%) berada dalam skala nilai Tinggi;



Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan 17 sasaran dengan 23 indikator sasaran, menunjukkan sebanyak 15 indikator (65,22%) mencapai atau melampaui target, sebanyak 7 indikator (30.43%) tidak mencapai target tetapi meningkat (lebih baik) dibandingkan dengan tahun lalu, dan sebanyak 1 indikator (4.35%) tidak mencapai target dan sebanyak 0 indikator (0%) tidak dapat diukur.



Skala intensitas ketercapaian sasaran strategis, menunjukkan sebanyak 22 indikator (95,65%) dalam skala nilai Sangat Tinggi, 1 indikator (4,35%) dalam skala nilai Tinggi, 0 indikator (0%) dalam skala nilai Sedang, 0 indikator (0%) dalam skala nilai Sangat Rendah, 1 indikator (0%) tidak dapat di ukur.



Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan, sehingga menjadi bahan evaluasi yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih produktif, efektif dan efisien.

Dalam tahun anggaran 2022, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.4.670.657.405.901,40 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.626.954.746.948,10 atau 99,06%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.4.684.404.923.196,61, maka realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,23%.



Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2022 antara lain masih rendahnya kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk dapat mewujudkan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan masih perlunya penajaman penetapan program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*) untuk mewujudkan prioritas pembangunan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana hasil evaluasi AKIP 2022 untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi
2. Mengintegrasikan aplikasi E\_SAKIP dan E-KINERJA dan mendorong agar PD dan individu menggunakannya sehingga terwujudnya perbaikan kinerja berkelanjutan di level Pemda, PD, dan individu
3. Menyusun laporan kinerja berkala (triwulan) atas hasil monitoring kinerja agar dapat menentukan strategi dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan
4. Mendorong dilakukannya monitoring dan evaluasi kinerja dan PD secara berkala/periodik sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target kinerja daerah. Berikutnya hasil capaian kinerja tersebut dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment
5. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja
6. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor di inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP.



Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 ini. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut. Dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dari seluruh *stakeholders* sangat diharapkan demi peningkatan kinerja Kabupaten Garut di masa mendatang dalam upaya ***Mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.***



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2021-2022							Keterangan	Status Capaian
			Realisasi	Target Seteran Perubahan 2022		Realisasi	Standar Nasional	% Capaian Thd Target			
			2021	Range	Median	2022					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,45	67,52-68,54	68,0	67,41	72,91	99,09	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan	▲	
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	1,1	1,1	0,86	1,17	121,82	Mencapai Target	√	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,58	4,31 - 5,4	4,855	5,08	5,3	104,63	Mencapai Target	√	
4	Persentase Penduduk Miskin	%	10,65	8,41 - 8,52	8,465	10,42	9,57	76,90	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan	▲	
5	Pendapatan Per Kapita	Rp (Juta)	23,356	23,25-23,52	23,385	25,346	71	108,39	Mencapai Target	√	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,68	8,21 - 8,41	8,31	7,6	5,86	108,54	Mencapai Target	√	
7	Indeks Gini	Poin	0,322	0,36 - 0,362	0,361	0,302	0,381	116,34	Mencapai Target	√	
8	Inflasi	%	1,17	2,5-4,5	3,5	6,65	5,47	10,00	Tidak Mencapai Target	X	

Sumber : BPS, Kabupaten Garut Dalam Angka 2022 dan 2023, Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022 dan 2023

Rekap Tingkat Ketercapaian Indikator Makro:	Jumlah	Persentase (%)
Mencapai Target	5	62,5
Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan	2	25
Tidak Mencapai target	1	12,5
	8	100

**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Garut**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2022		% Capaian 2021	% Capaian 2022	Keterangan
						Range	Median			
<b>Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA</b>										
<b>Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya</b>										
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	Mencapai Target
	2. Indeks Kesehatan	Poin	79,09	79,37	79,77	79,62 - 79,82	79,72	99,82	100,06	Mencapai Target
	3. Indeks Pendidikan	Poin	58,15	58,52	59,85	59,13 - 61,02	60,075	99,63	99,63	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan
	4. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	262,8	281,4	276,67	227,67 - 230,67	229,17	86,38	79,27	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan
	5. Persentase penduduk bekerja	%	91,04	91,32	92,4	91,59-91,79	91,69	100,58	100,77	Mencapai Target
<b>Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih</b>										
2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	B	B	100	100	Mencapai Target
<b>Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang</b>										
3.1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1. Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	80,86	77,19	78,06	77,48		102,23	100,75	Mencapai Target
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,22	67,82	69,25	59,18		117,70	117,02	Mencapai Target
	2. Indeks Risiko Bencana	Poin	205,52	185	164,91	200		108,87	117,55	Mencapai Target
<b>Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan</b>										
4.1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,26	3,58	5,08	4,31 - 5,4	4,855	92,27	104,63	Mencapai Target
	2. Indeks Daya Beli	Poin	62,84	63,17	64,17	65,39 - 66,1	65,745	98,52	97,60	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan

Rekap Tingkat Ketercapaian Indikator Tujuan:	Jumlah	Persentase (%)
Mencapai Target	8,00	72,73
Tidak Mencapai Target Tapi Meningkatkan	3,00	27,27
Tidak Mencapai target	0,00	0,00
Belum tersedia	0,00	0,00
	11,00	100,00



Status Capaian	Perbandingan dengan tahun lalu (2021)						Target Akhir RPJMD (Tahun 2024)		% Capaian 2022 Thd Target Akhir RPJMD	Perbandingan Nilai 2022 dengan Nasional			Perbandingan Pertumbuhan 2022 dengan Nasional		
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Selisih dari realisasi	Capaian 2021	Capaian 2022	Selisih dari capaian tahun	Range	(Nilai Tengah)		Nilai Garut 2022	Nilai Nasional 2022	Selisih Nilai	Pertumbuhan Garut 2022	Pertumbuhan Nasional 2022	Selisih Pertumbuhan
√	Baik	Baik	0	100,00	100,00	0,00	Baik								
√	79,37	79,77	0,4	99,82	100,06	0,24	80,04 - 80,24	80,14	99,54	79,77	79,77	0			
▲	58,52	59,85	1,33	99,63	99,63	0,00	61,79 - 63,68	62,735	95,40	59,85	65,36	-5,51			
▲	281,4	276,67	-4,73	86,38	79,27	-7,11	190,67-193,67	192,17	56,03						
√	91,32	92,4	1,08	100,58	100,77	0,19	93,39-93,59	93,49	98,83	92,4	94,14	-1,74			
√	B	B	0	100,00	100,00	0,00	BB		98,41	B					
√	77,19	78,06	0,87	102,23	100,75	-1,47	95,33		81,89						
√	67,82	69,25	1,43	117,70	117,02	-0,69	63,21		109,56	69,25	72,42	-3,17			
√	185	164,91	-20,09	108,87	117,55	8,68	194		114,99	164,91	134,16	30,75			
√	3,58	5,08	1,5	92,27	104,63	12,36	4,87 - 5,57	5,22	97,32	5,08	5,31	-0,23			
▲	63,17	64,17	1	98,52	97,60	-0,91	68,45 - 69,09	68,77	93,31	64,17	74,35	-10,18	1,59	1,19	0,4

**Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET SETELAH PERUBAHAN 2022		REALISASI 2022	% CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN
				Range	(Nilai Tengah)			
<b>Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbud</b>								
1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	<b>Baik</b>	Baik		Baik	100	100,00
1.1.2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	<b>71,59</b>	71,76 - 71,89	71,825	71,85	100,03	100,03
1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	<b>7,53</b>	7,73 - 8,23	7,98	7,83	98,12	99,48
	2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	<b>12,03</b>	12,01 - 12,09	12,05	12,15	100,83	
1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1. Persentase penduduk miskin	Tahun	<b>10,65</b>	8,41 - 8,52	8,465	10,42	76,90	92,72
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<b>8,68</b>	8,21 - 8,41	8,31	7,6	108,54	
1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	<b>0,56</b>	1,1	1,1	0,86	121,82	121,82
<b>Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih</b>								
2.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	<b>Baik</b>	Baik		Baik	100	100
2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	<b>B</b>	A		B*	97,19	99,06
	2. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	<b>BB</b>	BB		BB	100	
	3. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	<b>Tinggi</b>	Tinggi		Tinggi*	100	

<b>Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang</b>								
3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Persentase kemandapan jalan	%	<b>49,92</b>	52,61		51,42	97,74	97,74
3.1.2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	<b>100</b>	97,15		100	102,93	102,93
3.1.3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Cakupan air minum layak	%	<b>86,96</b>	89,27		88,51	99,15	99,57
	2. Cakupan sanitasi layak	%	<b>67,2</b>	67,69		67,69	100,00	
3.1.4. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana	Luas Kawasan permukiman layak huni	Ha	<b>6.727</b>	6.673		6.825	102,28	102
3.1.5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1. Persentase Luas Areal Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	<b>81,89</b>	80,7		82,7	102,48	92,91
	2. Persentase penurunan luas genangan air	%	<b>70</b>	50		60	83,33	
3.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	<b>67,82</b>	59,18		69,25	117,02	117,02
3.2.2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	<b>185</b>	200		164,91	117,545	117,55
<b>Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan</b>								
4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	<b>79,7</b>	80		83,1	103,88	103,88
4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	Juta Rp	<b>23,356</b>	23,25-23,52	23,385	25,346	108,39	108,39
4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	<b>1,29</b>	1,46-1,48	1,47	1,165	79,25	79,25
<b>Rata-Rata</b>								<b>102,04</b>

Rekap Tingkat Ketercapaian	Jumlah Indikator	Persentase (%)
Mencapai Target	16,00	69,57
Tidak Mencapai Target	6,00	26,09
Tidak Mencapai target	1,00	4,35
Belum tersedia	0,00	0,00
Jumlah	23,00	100,00

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			5.756.193.000.000		1.498.946.263.609		1.630.093.666.071
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	3.174.332.000.000		1.061.592.014.667	100%	1.105.275.461.521
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Operator yang dibina	Orang				80 Orang	451.135.523
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional koordinator wilayah. Jumlah tenaga kerja honorer dan TTK(36 TTK SMA, 1 TTK D2, 6 TTK D3, 82 TTK S1, 1 TKK S2, 38 Non PNS Orang, 104 operator aset )	bulan				14 bulan	1.100.526.424.109
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan jasa pengamanan kantor	Bulan				12 Bulan	117.580.000
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian dan penjenjangan karir pegawai	dok				1 dok	93.196.930
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buah				69 Buah	2.354.303.455

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan peralatan kantor	Jenis				7 Jenis	867.485.400
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Daya Listrik, Biaya Air Minum, Sambungan Telpon, dan akses internet	Bulan				12 Bulan	270.653.597
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis dan lama penyediaan jasa service serta tersedianya suku cadang	Unit				7 Unit	594.682.507
1	01	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Persentase SD yang Memenuhi Rasio Kelas Siswa 1:28 (SPM)</b>	73%	2.464.495.000.000		412.455.048.742	73%	499.019.804.550
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Survey Sarana dan Monev PIP	Sekolah				1577 Sekolah	323.993.632.300
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Dokumen Monitoring pengelolaan dana PIP Jumlah Dokumen Survey Kelayakan penerima bantuan yang disusun jumlah unit komputer"	Dokumen				2 Dokumen	95.736.800.050
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	"Jumlah alat permainan edukatif luar dan dalam PAUD sesuai standar yang ditambah Jumlah Laptop Lembaga PAUD yang ditambah"	Paket;Unit				126 Paket; Unit	60.575.172.100
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lulusan kelompok belajar DAN Jumlah peserta didik yang menerima BOP Daerah Kesetaraan Paket B dan C	Orang				40831 Orang	18.714.200.100
1	01	04			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Guru Bersertifikat</b>	70%	117.366.000.000		24.899.200.200	100%	25.798.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Calon Kepala Sekolah	Orang				28 Orang	25.798.400.000
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			2.148.486.083.732		460.870.748.205		323.011.273.608
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan</b>	100%	1.130.721.650.471		262.848.613.760	100%	288.926.800.325
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja PD	9 dokumen				150 dokumen	103.463.400
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah UPT yang membuat laporan keuangan akhir tahun	unit				68 unit	139.904.237.909
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah	12 bulan				12 bulan	34.935.000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan	orang				6 orang	50.000.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	bulan				12 bulan	862.117.736
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan	unit				1 unit	473.589.280
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan				12 bulan	706.229.484

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik daerah	bulan				12 bulan	943.060.700
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</b>	100%	905.469.799.571		172.452.687.729	100%	217.114.840.539
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	90 %				70 %	44.514.834.377
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan kesehatan	100 %				100 %	119.143.870.762
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah paket sistem informasi yang dikembangkan	paket				1 paket	232.269.400
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase permintaan perizinan fasyankes rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya ditindak lanjuti	persen				100 persen	250.000.000
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Fasilitas Tenaga Kesehatan yang Melakukan Uji Kompetensi</b>	100%	104.360.427.959		24.495.033.716	65%	14.520.285.560
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Anjab ABK , Perbup Rekrutmen Pegawai BLUD	dokumen				2 dokume n	13.563.485.560

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nakes yang sesuai standar kompetensi	%				100 %	700.000.000
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Sarana Kefarmasian Yang Sesuai Standar</b>	100%	3.969.005.730		447.853.800	74%	617.502.000
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang memenuhi persyaratan dalam proses perizinan	100 %				100 %	238.960.000
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang diawasi	200 unit				200 unit	171.390.000
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan (TPM) : jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diawasi	14 unit				14 unit	50.000.000
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dalam perizinan	100 %				100 %	157.152.000
1	02	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Desa Siaga Aktif/Sehat</b>	75%	3.965.200.000		626.559.200	70%	4.211.063.300



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan minimal 80 % posyandu aktif	100 %				100 %	736.678.000
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan media promosi kesehatan	1 paket				1 paket	100.000.000
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa/kelurahan siaga aktif meningkat satu tingkat strata di atasnya	13 desa/ke l				13 desa/ke l	75.000.000
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			1.060.113.760.919		260.291.901.406		270.769.961.023
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kualitas tempat dan pelayanan rumah sakit	100%	860.806.801.211		232.562.985.496	67%	265.886.574.234
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase gaji dan tunjangan ASN yang di bayarkan tepat waktu	%				100 %	43.246.704.830
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan BLUD	100				100	222.639.869.404
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Kelas B	100%	199.306.959.708		27.728.915.910	100%	4.883.386.789

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Tersedia	100 %				100 %	4.883.386.789
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
1	03				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			3.161.664.000.000		397.192.404.708		656.369.411.153
1	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi SAKIP	100%	143.414.000.000		27.292.394.060	BB nilai	29.549.844.931
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah sesuai ketentuan	30 Dok				6 Dok	2.400.000
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %				100 %	27.783.710.355

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100				100	185.459.886
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100				100	466.353.030
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah	90				80	197.700.000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100				100	413.208.460
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100				100	501.013.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase tampungan air yang tersedia	100%	442.368.000.000		52.832.222.581	57%	165.479.540.214
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampungan air baku yang dibangun	63 Unit				17 Unit	87.375.183.700
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dibangun, direhab dan dipelihara	327 Km				117 Km	78.104.356.514
1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase peningkatan Cakupan air Minum layak	91%	186.880.000.000		26.149.140.600	89%	27.530.956.800
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani/terpasang SPAM	SR				10230 SR	27.530.956.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan sanitasi layak	69%	124.100.000.000		11.720.949.800	68%	9.979.594.800
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mempunyai pengolahan air limbah domestik	15430 RT/ KK				3600 RT/K K	9.979.594.800
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penurunan luas genangan air	60%	139.561.000.000		6.330.765.838	50%	20.820.814.000
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase perkotaan dan lingkungan yang direhab dan dibangun	86,64 Km				26 Km	20.820.814.000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	10%	279.025.000.000		52.149.480.414	8%	43.977.400.496

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi klasifikasi bangunan	515 Unit				103 Unit	43.977.400.496
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase luas bangunan dan lingkungan yang tertata</b>	<b>30%</b>	<b>126.200.000.000</b>		<b>11.284.628.350</b>	<b>12%</b>	<b>13.315.100.301</b>
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas bangunan dan lingkungan yang ditata	7500 M2				1500 M2	13.315.100.301
1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase kemandapan jalan</b>	<b>58%</b>	<b>1.692.221.000.000</b>		<b>203.937.837.865</b>	<b>53%</b>	<b>341.443.245.111</b>
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun, direkonstruksi, direhab dan dipelihara	1493 Km				548 Km	341.443.245.111

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DAN BERSERTIFIKAT</b>	31%	6.700.000.000		1.185.068.000	23%	1.176.914.500
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapat pelatihan dan bersertifikat	980 Orang				120 Orang	400.000.000
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan sistem informasi jasa konstruksi	28 Dok				6 Dok	638.702.500
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan evaluasi	260 Proyek				60 Proyek	138.212.000
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang</b>	85%	21.195.000.000		4.309.917.200	84%	3.096.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang	70 Dok				19 Dok	2.768.550.000
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	5 Dok				1 Dok	99.050.000
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	5 Dok				1 Dok	228.400.000
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
1	04				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			1.814.739.649.000		287.101.931.079		88.103.930.571
1	04	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase disiplin aparatur	100%	34.775.000.000		7.548.119.391	100%	9.000.125.871



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja sesuai ketentuan	%				100 %	55.000.000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya adminitrasi keuangan Perangkat Daerah yang baik dan sesuai ketentuan	%				100 %	7.081.789.084
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah yang baik dan sesuai ketentuan	%				100 %	149.448.000
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian yang baik dan sesuai ketentuan	%				100 %	92.363.409
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik dan sesuai ketentuan	%				100 %	566.971.378
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya ASN untuk menunjang terlaksananya urusan pemerintah yang baik dan sesuai ketentuan	%				100 %	181.577.050
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang yang baik dan sesuai ketentuan	%				100 %	299.226.950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan fasilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	%				100 %	573.750.000
1	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Presentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah</b>	100%	44.603.000.000		19.269.038.329	100%	21.349.997.700
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentasi rumah korban bencana dan/atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun dan direhabilitasi	%				100 %	21.349.997.700
1	04	03			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh</b>	74,89%	43.282.000.000		18.836.797.900	86 Ha	708.712.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Yang tertangani	%				100 %	708.712.000
1	04	04			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</b>	26.990 Unit	56.045.000.000		3.079.999.800	31530 Unit	1.565.000.000
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni Yang diperbaiki	Ha				2116 Ha	1.565.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Luas Kawasan Permukiman yang dilengkapi dengan PSU yang representatif	6.870.44 Ha	1.636.034.649.000		238.367.975.659	660 Ha	55.480.095.000
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Ha				21 Ha	55.480.095.000
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	10				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>			650.000.000		167.077.000		350.000.000
2	10	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	Luas pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	360.000 unit	150.000.000		0	3400 M2	50.000.000
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data luas tanah yang sesuai dengan peruntukan izin lokasi yang diterbitkan	Dokumen				1 Dokumen	50.000.000
2	10	04			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	400.000.000		167.077.000	100%	195.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	Kasus				5 Kasus	195.000.000
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Kesesuaian pemanfaatan Tanah dengan izin membuka tanah</b>	100%	100.000.000		0	100%	105.000.000
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi Perencanaan Penggunaan Tanah yang dibangun	Aplikasi				1 Aplikasi	105.000.000
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			76.503.000.000		13.157.009.893		15.716.748.979
1	05	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ( SatpolPP )</b>	100%	36.162.000.000		6.933.727.133	100%	7.266.983.753
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan ( Satpol PP )	%				100 %	40.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD ( Satpol PP )	%				100 %	5.293.272.168

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP )	%				100 %	291.236.800
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ( Satpol PP )	%				100 %	297.353.396
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP )	%				100 %	985.635.100
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%				100 %	57.606.289
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%				100 %	301.880.000
1	05	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi</b>	<b>100%</b>	<b>40.341.000.000</b>		<b>6.223.282.760</b>	<b>50%</b>	<b>8.449.765.226</b>
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas	Jenis				3 Jenis	5.836.285.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	Jenis				3 Jenis	2.544.964.326
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SatplPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang				2 Orang	68.515.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			72.360.000.000		12.899.337.831		11.794.230.126
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketepatan penyelesaian perencanaan	100%	30.319.000.000		5.615.038.959	80%	6.335.429.204
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan penyelesaian perencanaan	%				100 %	48.320.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %				100 %	5.656.918.604
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya keseragaman aparatur pada Dinas pemadam kebakaran	Stell				108 Stell	224.704.400
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan				12 Bulan	124.671.600
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%				80 %	115.581.600
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Petugas Kebersihan yang tersedia	Bulan				36 Bulan	105.837.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang	Unit				18 Unit	59.396.000
1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Layanan Pencegahan Pemadaman Penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak di kabupaten Garut</b>	100%	42.041.000.000		7.284.298.872	80%	5.458.800.922
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang siap siaga menangani kejadian kebakaran	Orang				88 Orang	5.158.800.922
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Bangunan				50 Bangunan	50.000.000
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100 %				100 %	200.000.000
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100 %				100 %	50.000.000
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			73.012.000.000		10.642.338.797		13.085.157.768
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat	100%	28.544.000.000		4.374.184.097	78 poin	7.947.472.768
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	persen				100 per se n	60.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	persen				100 per se n	3.644.907.739
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen				100 per se n	111.895.932
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen				100 per se n	154.140.170
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen				100 per se n	376.944.889



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan barang milik daerah	persen				100 persen	3.238.559.490
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen				100 persen	143.220.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen				100 persen	217.804.548
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana</b>	40%	44.468.000.000		6.268.154.700	0,42 Poin	5.137.685.000
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah daerah kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	persen				100 persen	601.325.000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pengurangan dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu	persen				100 persen	2.737.760.000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen				100 persen	1.423.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	persen				60 persen	375.000.000
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
1	06				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			197.523.000.000		17.943.057.568		23.529.365.157
1	06	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya penyelenggaraan administrasi Dinas sosial yang transparan dan akuntabel</b>	100%	91.016.000.000		9.545.021.432	82%	6.450.303.480
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	%				81.35 %	298.638.480
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN dan laporan administrasi keuangan dinas	%				83 %	4.796.835.175
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	%				80 %	148.987.909
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN	%				82 %	21.468.300
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan administrasi	%				82 %	405.557.286
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas ASN pada bidang Sosial	%				81 %	285.050.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	%				82.45 %	336.211.430

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	%				81.35 %	157.554.900
1	06	02			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>292 orang</b>	<b>21.057.000.000</b>		<b>5.211.675.456</b>	<b>24%</b>	<b>2.333.482.500</b>
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi pekerja sosial masyarakat dalam pemberdayaan sosial.	%				30.31 %	2.333.482.500
1	06	03			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Meningkatnya penanganan/pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan</b>	<b>3513 orang</b>	<b>2.041.000.000</b>		<b>237.101.900</b>	<b>30%</b>	<b>146.738.000</b>
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Meningkatnya warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	59 %				30.25 %	146.738.000
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>533 orang</b>	<b>33.840.000.000</b>		<b>883.926.500</b>	<b>30%</b>	<b>998.107.700</b>
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%				32.06 %	998.107.700
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya</b>	<b>3513 orang</b>	<b>28.971.000.000</b>		<b>873.009.900</b>	<b>17%</b>	<b>11.736.783.727</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaksanaan verifikasi data DTKS dan BANSOS	%				33.33 %	11.736.783.727
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial</b>	<b>3513 orang</b>	<b>18.046.000.000</b>		<b>1.192.322.380</b>	<b>100%</b>	<b>1.813.949.750</b>
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bantuan bagi korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasarnya.	3450 %				100 %	856.035.550
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Desa/Kelurahan yang mengikuti pemberdayaan terhadap kesiapsiagaan bencana Kab. Garut	%				29.28 %	957.914.200
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Meningkatnya pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan</b>	<b>50%</b>	<b>2.552.000.000</b>		<b>0</b>	<b>75%</b>	<b>50.000.000</b>
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya pemeliharaan makam pahlawan nasional Kab Garut	2 %				75 %	50.000.000
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	07				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			<b>127.331.076.319</b>		<b>18.164.849.604</b>		<b>18.277.186.081</b>
2	07	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>45.215.408.618</b>		<b>8.654.568.554</b>	<b>84%</b>	<b>12.132.696.681</b>
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	Dokumen				2 Dokumen	69.539.100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan	Bulan				14 Bulan	5.827.117.712
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Jasa Pengamanan Gedung	Bulan				12 Bulan	158.328.023
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian	Buah				75 Buah	224.900.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Alat Rumah Tangga	Jenis				4 Jenis	286.402.889
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan kebutuhan Kantor	Bulan				12 Bulan	610.115.400
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	Gedung				1 Gedung	152.808.807
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Bulan				12 Bulan	4.803.484.750
2	07	03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten</b>	50%	17.949.398.200		2.172.173.750	46%	1.877.907.700
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang terampil (UPT-BLK)/ Jumlah Peserta Pemagangan	Orang				180 Orang	1.283.895.550

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang di Bina, Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan dan Tersertifikasi, LPK Terakreditasi, Instruktur yang mengikuti Bimtek Sertifikasi Metodologi	Orang/Le mbaga				100 Orang /Lembaga	288.719.950
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang aktif dan mempunyai Ijin LPK	LPK				60 LPK	54.896.200
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang				32 Orang	250.396.000
2	07	04			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan</b>	10%	56.578.356.800		6.829.275.800	10%	3.305.511.550
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja melalui PKSPK	Orang				51.944 Or ang	3.022.555.900
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Rumah Informasi Kerja	Kecamata n				4 Kecamatan	282.955.650
2	07	05			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Prosentase Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pertahun</b>	100%	7.587.912.701		508.831.500	85%	961.070.150
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepesertaan BPJS	Orang				800 Orang	569.949.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kepesertaan BPJS	perusahaan				150 perusahaan	391.120.750
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
3	32				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>			999.799.700		37.999.900		48.999.900
3	32	03			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Prosentase peningkatan taraf hidup transmigran	80%	999.799.700		37.999.900	60%	48.999.900
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi	Lokasi				1 Lokasi	48.999.900
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	09				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>			100.332.000.000		16.384.580.429		17.511.022.700
2	09	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100%	29.916.000.000		5.476.972.893	100%	6.471.693.450
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen				7 Dokumen	59.273.000
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan yang disusun	Dokumen				43 Dokumen	5.530.447.362

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun	Dokumen				1 Dokumen	112.395.932
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							109.708.000
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan kebutuhan kantor	Jenis				7 Jenis	189.928.266
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah daerah yang diadakan	Jenis				8 Jenis	245.790.980
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan	Jenis				5 Jenis	136.413.910
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah daerah yang terpelihara	Unit				29 Unit	87.736.000
2	09	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>ketersediaan energi perkapita</b>	<b>6.050 kkal/kapita/hari</b>	<b>6.864.000.000</b>		<b>1.188.854.661</b>	<b>6000 kkal/kapita/hari</b>	<b>3.383.339.000</b>
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	unit				5 unit	3.383.339.000
2	09	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)</b>	<b>62,5 Gram/kap/hari</b>	<b>56.671.000.000</b>		<b>8.870.731.822</b>	<b>&lt; 8</b>	<b>7.292.690.250</b>



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Efisiensi distribusi pangan	%				33 %	293.389.000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	Ton				427.5 Ton	6.000.000.000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Ratio konsumsi protein nabati terhadap total konsumsi ideal	%				12.6 %	999.301.250
2	09	04			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase penanganan daerah rawan pangan</b>	<b>9%</b>	<b>2.963.000.000</b>		<b>310.439.000</b>	<b>8%</b>	<b>163.300.000</b>
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Lokasi				3 Lokasi	163.300.000
2	09	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan</b>	<b>80%</b>	<b>3.918.000.000</b>		<b>537.582.053</b>	<b>77%</b>	<b>200.000.000</b>
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan (Sertifikasi dan Registrasi)	Sertifikat				15 Sertifikat	200.000.000
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			589.917.000.000		53.169.156.040		93.515.488.936
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100%	91.870.000.000		20.313.273.505	100%	21.801.111.431
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	29 dokumen				7 dokumen	101.000.000
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN	270 ASN				281 ASN	19.932.440.590
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia	Dokumen				1 Dokumen	185.809.885
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	326 kegiatan				1 kegiatan	112.951.000
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 Jenis koran				6 Jenis koran	286.344.106
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung yang dibangun	1 unit				1 unit	772.671.000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang disediakan	3 jenis				3 jenis	181.714.850

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BAngunan Lainnya	Gedung				1 Gedung	228.180.000
2	11	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>12.150.000.000</b>		<b>836.869.400</b>	<b>100%</b>	<b>2.800.000.000</b>
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Pendukungnya yang Disusun	7 Dokumen				2 Dokumen	400.000.000
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang Disusun	23 Dokumen				6 Dokumen	2.400.000.000
2	11	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indek Kualitas Lingkungan</b>	<b>63,21</b>	<b>63.775.000.000</b>		<b>3.556.093.195</b>	<b>59.18 Poin</b>	<b>2.708.594.500</b>
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin				59.18 Poin	2.033.594.500
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaku usaha dan / atau kegiatan	Pelaku Usaha				10 Pelaku Usaha	75.000.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang direhabilitasi	Ha				12.8 Ha	600.000.000
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)</b>	<b>17%</b>	<b>47.663.000.000</b>		<b>1.400.227.000</b>	<b>0,15%</b>	<b>967.580.896</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau	%				0.146 %	967.580.896
2	11	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Indek Kualitas Lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>1.400.000.000</b>		<b>0</b>	<b>59.18 Poin</b>	<b>106.405.500</b>
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha dan / atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3	Pelaku usaha				20 Pelaku usaha	106.405.500
2	11	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>13</b>	<b>2.575.000.000</b>		<b>396.675.000</b>	<b>2 dokumen pembinaan dan pengawasan</b>	<b>400.000.000</b>
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan yang Disusun	10 Dokumen				2 Dokumen	400.000.000
2	11	07			<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>1.324.000.000</b>		<b>0</b>	<b>1 Lokasi</b>	<b>75.000.000</b>
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Belum adanya pengakuan masyarakat hukum adat secara legal formal	Dokumen				1 Dokumen	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Belum adanya pengakuan masyarakat hukum adat secara legal formal	Lokasi				1 Lokasi	35.000.000
2	11	08			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan</b>	100%	1.986.000.000		0	25%	95.000.000
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Desa/Kecamatan				5 Desa/Kecamatan	95.000.000
2	11	09			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan kemitraan lingkungan</b>	80%	1.855.000.000		198.733.000	20%	75.000.000
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	Lokasi				10 Lokasi	75.000.000
2	11	10			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup</b>	100%	980.000.000		80.000.000	100%	75.000.000
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan lingkungan yang berupa sengketa lingkungan	kasus				5 kasus	75.000.000
2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Sampah</b>	55%	364.339.000.000		26.387.284.940	35%	64.411.796.609

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Dokumen evaluasi capaian Jakstrada	Dokumen				1 Dokumen	64.411.796.609
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	12				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			93.391.000.000		13.764.832.965		16.593.810.082
2	12	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	82.028.000.000		12.090.221.701	100%	13.679.377.222
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen				3 Dokumen	98.580.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tahun				1 Tahun	7.016.258.892
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %				100 %	459.041.341

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jenis				20 Jenis	4.760.935.664
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen				90 Persen	525.677.400
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %				100 %	608.543.925
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tahun				1 Tahun	210.340.000
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Adminduk</b>	<b>100%</b>	<b>6.626.000.000</b>		<b>1.018.805.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.055.556.800</b>
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		%				100 %	1.055.556.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	100%	1.749.000.000		303.244.000	100%	150.589.900
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%				100 %	150.589.900
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh SKPD	100%	2.988.000.000		352.562.264	100%	1.708.286.160
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan				4 Laporan	1.544.112.360
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Alat Pembaca KTP-el	Buah				3 Buah	114.200.000
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Tenaga Operator yang Terlatih	Lokasi				40 Lokasi	49.973.800



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			93.297.000.000		20.281.397.120		23.610.982.482
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat - DPMD	85%	27.303.000.000		6.258.441.881	84,013 P oin	6.054.039.165
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%				100 %	165.000.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%				100 %	5.135.039.165
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah	%				100 %	110.391.621
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD	%				100 %	140.189.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	%				100 %	220.580.659
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik	%				100 %	84.466.200
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik	%				100 %	175.472.120
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	%				100 %	22.900.000
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas</b>	<b>20%</b>	<b>8.895.000.000</b>		<b>2.007.563.265</b>	<b>10%</b>	<b>2.200.782.300</b>
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	100 %				100 %	2.200.782.300
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin</b>	<b>20%</b>	<b>1.400.000.000</b>		<b>249.596.000</b>	<b>2%</b>	<b>629.727.800</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	%				37.05 %	629.727.800
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>36.576.000.000</b>		<b>7.913.688.004</b>	<b>60%</b>	<b>9.012.938.817</b>
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %				100 %	9.012.938.817
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>19.123.000.000</b>		<b>3.852.107.970</b>	<b>100%</b>	<b>5.713.494.400</b>
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	%				8.26 %	5.713.494.400
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			13.615.000.000		1.305.118.130		3.523.800.000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Mentor	1.535.000.000		304.619.830	100%	950.000.000
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							650.000.000
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							250.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Mentor	970.000.000		175.500.000	100%	412.900.000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							238.900.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							174.000.000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Mentor	300.000.000		135.000.000	100%	538.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							338.500.000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							200.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Nilai Indikator KLA	Utama Ka tegori	705.000.000		49.999.700	100%	50.000.000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Nilai Indikator KLA	Madya Kategori	7.855.000.000		349.998.700	Madya Kategori	957.500.000
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi KLA di lokasi P2WKSS	Orang				220 Orang	178.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak yg dibentuk	Kecamatan				5 Kecamatan	778.750.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Nilai Indikator KLA	Madya Kategori	2.250.000.000		289.999.900	madya kategori	614.900.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Pelatihan bagi petugas di lapangan	Orang				310 Orang	337.550.000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							175.044.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							102.306.000
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			139.417.000.000		21.012.563.444		38.936.653.436
2	14	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	100%	46.278.000.000		6.563.443.344	100%	11.069.650.886

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							400.500.000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7.791.713.274

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							149.068.382
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Perlengkapan dan Pakaian Aparatur	%				100 %	617.664.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							279.320.800
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.028.815.100



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							173.250.629
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							629.318.701

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Jumlah Kecamatan yang Mempunyai Data dan Informasi KKBPK dan PPPA	100%	18.422.000.000		3.548.497.800	100%	13.374.390.000
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100 %				100 %	338.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Bulanan Dibanding Dengan Jumlah Kecamatan	100 %				100 %	13.035.890.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	100%	64.927.000.000		8.912.372.300	100%	11.960.612.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							1.798.015.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							3.674.561.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan KIE Program Bangga Kencana oleh Kader Pos KB Desa	Kegiatan				6 Kegiatan	3.315.285.900
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							3.172.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Keluarga Pra KS berbanding jumlah keluarga	84%	9.790.000.000		1.988.250.000	100%	2.532.000.250
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							2.272.000.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							260.000.000
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	15				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			284.577.880.500		43.535.091.157		46.350.433.563
2	15	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub</b>	100%	231.083.180.500		37.237.895.727	100%	40.867.364.729
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan	35 Dokumen				7 Dokumen	174.998.800
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji, Tunjangan, Jasa Tenaga Perhubungan dan Tenaga Administrasi	2310 Orang				462 Orang	16.973.385.629
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum kepegawaian	171 Item				101 Item	454.472.300
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	17 Unit				3 Unit	157.294.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kebersihan dan pembayaran rekening listrik yang disediakan	60 Bulan				12 Bulan	23.039.283.000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	297 Unit				64 Unit	67.930.750
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas</b>	<b>100%</b>	<b>52.894.700.000</b>		<b>6.152.749.430</b>	<b>77%</b>	<b>5.423.243.194</b>
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	titik				800 titik	3.400.787.000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen pengelolaan terminal penumpang type C	Dokumen				1 Dokumen	100.000.000
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah lokasi pengawasan penyelenggaraan parkir umum	Wilayah				2 Wilayah	50.000.000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan pendukung pengujian kendaraan bermotor	set				11739 set	399.477.400
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	377 Unit				97 Unit	1.222.555.980
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dokumen audit dan inspeksi keselamatan jalan	5 Dokumen				1 Dokumen	136.585.814
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang	10 Unit				2 Unit	50.128.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan tidak dalam trayek yang terkendali	Unit				206 Unit	63.709.000
2	15	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Persentase sarana pelayaran yang laik layar</b>	100%	600.000.000		144.446.000	89%	59.825.640
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keselamatan angkutan laut	Unit				700 Unit	59.825.640
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			119.067.000.000		22.347.902.950		14.492.254.038
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran</b>	100%	32.367.000.000		6.909.293.533	92%	7.623.159.138
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi	HOK				168 HOK	49.740.000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Orang				65 Orang	6.298.065.808

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	Orang Security				5 Orang Security	187.587.386
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	Jenis				15 Jenis	276.975.149
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pembelian Kendaraan Roda 2	Unit				1 Unit	280.880.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	orang				9 orang	417.760.795
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung				4 Gedung	112.150.000
2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>prosentase informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat</b>	100%	12.893.000.000		2.100.225.389	65%	1.863.851.700
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok informasi masyarakat dan metra	Angka				84 Angka	1.863.851.700
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut</b>	1,63 Poin	73.807.000.000		13.338.384.028	1,05 Angka	5.005.243.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan sub domain	%				89 %	3.465.679.675
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aplikasi terintegrasi	%				90 %	1.539.563.525
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			4.720.000.000		234.675.800		395.302.075
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	100%	4.720.000.000		234.675.800	79%	395.302.075
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi statistik sektoral	Aplikasi				1 Aplikasi	395.302.075
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			3.422.000.000		472.167.500		308.000.000
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	550	3.422.000.000		472.167.500	350 Angka	308.000.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang menerapkan Kebijakan tata kelola keamanan informasi dan Persandian	%				95 %	308.000.000
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			45.366.961.584		11.547.189.961		11.156.135.037
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	29.174.997.584		7.489.453.307	100%	7.207.586.036
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi Perkantoran	45 Dokum en				8 Dokume n	81.160.000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi Perkantoran	254 Orang				45 Orang	5.058.335.337
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi Perkantoran	0 orang				6 orang	185.239.886
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi Perkantoran	200 Orang				65 Orang	10.860.500
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi Perkantoran	12 Jenis				2 Jenis	507.027.813

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi Pernatoran	13 M2				498 M2	688.491.100
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi Perkantorann	Orang				5 Orang	204.301.400
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							472.170.000
2	17	02			<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Jumlah Pendirian dan Perijinan Koperasi baru	147 Angka	262.388.000		58.670.000	25 Koperasi	300.000.000
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi baru	146 Koperasi				25 Koperasi	300.000.000
2	17	03			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang diawasi	147 Angka	2.039.230.000		386.140.000	5%	346.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang diawasi	25 %				5 %	346.700.000
2	17	04			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase KSP/ USP Sehat	50 Angka	1.019.020.000		145.500.000	5%	118.900.000
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP sehat	30 %				5 %	118.900.000
2	17	05			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase pertumbuhan koperasi aktif	1.574 Angka	2.970.580.000		712.593.100	1%	800.121.700
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesadaran Masyarakat terhadap Perkoperasian	6 %				1 %	800.121.700
2	17	06			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Prosentase pertumbuhan omset usaha koperasi	50 Angka	2.039.230.000		296.533.460	2%	477.437.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesadaran masyarakat terhadap Perkoperasian	6 %				1 %	477.437.500
2	17	07			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Jumlah wirausaha baru	1.000 Angka	1.019.020.000		1.200.999.700	1000 Angka	1.262.346.201
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Baru	6000 WUB				1000 WUB	1.262.346.201
2	17	08			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Jumlah UKM yang meningkat omsetnya	1.000 Angka	6.842.496.000		1.257.300.394	750 Angka	643.043.600
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang naik omsetnya	4750 Usaha Mikro				750 Usaha Mikro	643.043.600
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	18				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			61.401.000.000		7.891.529.869		17.778.317.274

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	45.897.000.000		6.760.546.831	95%	15.491.285.174
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%				100 %	181.891.300
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan	0 %				100 %	4.977.411.579
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	95 %				90 %	185.459.886



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai disiplin dalam berpakaian serta pegawai dengan kompetensi baik	95 %				85 %	35.311.200
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	95 %				95 %	444.226.504
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	95 %				90 %	9.204.019.350
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa pelayanan kantor	95 %				95 %	381.415.355

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	100 %				100 %	81.550.000
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Indeks kepastian hukum berusaha	Baik	2.566.000.000		138.221.823	Baik Kate gori	523.295.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Regulasi Penanaman Modal	12 %				85 %	323.295.000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	2 Dokume n				2 Dokume n	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	20%	6.636.000.000		251.039.750	20%	850.000.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal	4 %				85 %	850.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	100%	2.038.000.000		180.297.800	100%	218.625.500
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	90 %				85 %	218.625.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	33%	2.064.000.000		338.102.765	33%	470.111.100
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	%				2 %	470.111.100
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks kemudahan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi	100%	2.200.000.000		223.320.900	Baik Kate gori	225.000.500
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	80 %				80 %	225.000.500
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			563.267.000.000		35.281.440.224		39.709.691.600
2	19	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran</b>	100%	12.300.000.000		8.953.562.729	100%	8.596.249.880
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen standar pelayanan minimal	Dokumen				100 Doku men	190.000.000
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan				12 Bulan	5.855.659.355
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Keamanan SOR Ciateul, Gedung Bela Diri, Stadion Sepak Bola dan Aquatic	Bulan				12 Bulan	500.000.000
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bulan				12 Bulan	45.000.000
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	497.090.525
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%				100 %	373.000.000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	615.000.000
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%				100 %	520.500.000
2	19	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Persentase pemuda yang berwirausaha</b>	35%	23.255.000.000		5.271.557.772	0,17%	4.644.321.720

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prsentase pemuda yang berwirausaha	%				100 %	3.374.321.720
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prsentase Kepemudaan yang Dibina	%				100 %	1.270.000.000
2	19	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan</b>	<b>100%</b>	<b>518.132.000.000</b>		<b>20.896.577.423</b>	<b>60%</b>	<b>25.687.120.000</b>
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana olahraga yang memenuhi setandar	%				100 %	16.200.200.000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor dan Atlet Yang Mengikuti POPKAB	100 %				100 %	602.356.850
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah mendali yang diperoleh	%				100 %	859.950.000
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Kegiatan dan SSB Yang Telah Dibina	100 %kegiatan				100 %kegiatan	8.024.613.150
2	19	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>9.580.000.000</b>		<b>159.742.300</b>	<b>100%</b>	<b>782.000.000</b>
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pemberdayaan Gugus Dharma Pramuka	n/a %				100 %	782.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			48.799.000.000		8.164.907.752		8.035.461.165
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100%	35.096.000.000		6.887.563.577	100%	7.059.461.165
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Dokumen				10 Dokumen	50.000.000
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan				12 Bulan	5.477.612.763
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa keamanan kantor/dinas	orang				4 orang	150.000.000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas	Buah				60 Buah	55.020.000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	jenis				9 jenis	405.949.162
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tahun				1 Tahun	438.921.150

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Telepon, air dan listrik	Jenis Pembayaran				3 Jenis Pembayaran	202.432.090
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Gedung kantor yang baik	Unit				1 Unit	279.526.000
2	23	02			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Persentase tingkat kunjungan pemustaka di perpustakaan</b>	85%	13.322.000.000		1.228.044.175	80%	726.000.000
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterpakaian Koleksi Perpustakaan	Tahun				1 Tahun	576.000.000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka dalam satu tahun	Tahun				1 Tahun	150.000.000
2	23	03			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Presentase Tingkat Kunjungan Pemustaka di Perpustakaan</b>	90%	381.000.000		49.300.000	1 Jenis	250.000.000
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keanekaragaman koleksi naskah kuno dan koleksi etnis nusantara	Tahun				1 Tahun	250.000.000
2	24				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>			5.744.000.000		675.784.780		574.997.660



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	prosentase pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan	65%	4.220.000.000		476.224.380	60%	424.997.660
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan pengelolaan kearsipan	SKPD				33 SKPD	324.997.660
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pemeliharaan arsip daerah	Tahun				1 Tahun	100.000.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		20%	1.524.000.000		199.560.400	100%	150.000.000
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun							50.000.000
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Penyelamatan dan Pelestarian Arsip guna sejarah	Tahun				1 Tahun	100.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			88.845.714.072		14.929.655.149		18.561.225.418
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	54.901.144.322		11.687.196.759	100%	13.228.121.168

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pencapaian kinerja SAKIP SKPD	bulan				12 bulan	117.809.737
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan administasi keuangan perangkat daerah	bulan				12 bulan	11.431.479.131
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administasi umum perangkat daerah	bulan				12 bulan	445.128.224
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	unit				2 unit	516.236.600
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang pelayanan kantor	bulan				12 bulan	340.294.495
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	bulan				12 bulan	377.172.981
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Persentase produksi perikanan tangkap</b>	<b>1.447 ton</b>	<b>14.097.055.000</b>		<b>1.424.252.440</b>	<b>0,50%</b>	<b>1.195.243.000</b>
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Produksi perikanan tangkap pada Perairan Umum Daratan (PUD)	kecamatan				6 kecamatan	900.243.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan usaha nelayan dan masyarakat pesisir	kecamatan				6 kecamatan	245.000.000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	unit				1 unit	50.000.000
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	<b>64.368 ton</b>	<b>13.347.485.375</b>		<b>1.332.547.650</b>	<b>1,00%</b>	<b>3.187.194.482</b>
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatkan produksi UPT Perikanan (Balai benih Ikan)	kecamatan				2 kecamatan	340.000.000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan	kecamatan				5 kecamatan	2.847.194.482
3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Lokasi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>	<b>6 kecamatan</b>	<b>1.095.126.250</b>		<b>63.832.900</b>	<b>6 Kecamatan</b>	<b>50.000.000</b>
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan dan bantuan sarana prasarana patroli pengawasan Pokmaswas	- Kecamatan				8 Kecamatan	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	721 ton	5.404.903.125		421.825.400	3%	900.666.768
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan produksi dan mutu produksi hasil perikanan	kelompok				20 kelompok	117.000.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan pemasaran hasil produksi perikanan	unit				1 unit	783.666.768
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			59.592.720.000		4.267.176.300		11.626.491.170
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	7.31 Ton	38.220.126.250		3.391.499.100	3%	5.061.918.170
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) komoditas peternakan	Tahun				1 Tahun	599.709.470
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		kecamatan				14 kecamatan	4.462.208.700
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prasarana yang dibangun/ dikembangkan	864 Ton	16.386.468.750		552.463.000	10%	5.670.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan prasarana pertanian dan pendukung usaha peternakan dan pembibitan ternak	Unit				7 Unit	2.670.000.000
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Kawasan yang dibangun	Unit				1 Unit	3.000.000.000
3	27	04			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase penurunan jumlah kasus penyakit ternak</b>	5%	4.010.125.000		323.214.200	5%	806.923.000
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi dan pengobatan penyakit ternak	bulan				12 bulan	100.000.000
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		bulan				12 bulan	50.000.000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		unit				1 unit	519.943.000
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		bulan				12 bulan	136.980.000
3	27	07			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan pembinaan kelompok dan Pelaku usaha peternakan</b>	10%	976.000.000		0	10%	87.650.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan terhadap Peternak dan pelaku usaha peternakan	Bulan				12 Bulan	87.650.000
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			41.320.000.000		13.024.501.356		14.085.317.852
2	22	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</b>	100%	37.160.000.000		8.273.642.305	100%	9.597.699.877
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang Mendapat gaji dan TKD	64 orang				64 orang	6.635.078.617
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat Daerah	94 %				100 %	443.799.492
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	1.339.578.000
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan kantor	6 %				100 %	673.658.318
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa pemeliharaan operasional kantor	32 %				100 %	505.585.450

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase seni budaya daerah yang dimanfaatkan	12	1.380.000.000		4.416.193.651	69%	3.927.617.975
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan kebudayaan yang dilakukan masyarakat	10 %				100 %	145.750.000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	200 %				100 %	3.781.867.975
2	22	04			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Terselenggaranya Kegiatan Kajian Icon Garut	200 Orang	540.000.000		199.389.200	50 orang	250.000.000
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kajian Icon Garut	Dokumen/ Laporan				1 Dokumen/ Laporan	250.000.000
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	8	1.840.000.000		135.276.200	3 CB	210.000.000
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	persentase cagar budaya yang dilestarikan	10 %				100 %	210.000.000
2	22	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	200 Orang	400.000.000		0	35%	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Permuseuman yang terdidik	Orang				55 Orang	100.000.000
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
3	26				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>			65.135.000.000		33.066.021.828		17.804.607.860
3	26	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik</b>	100%	330.000.000			100%	149.340.360
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan kantor	6 %				100 %	149.340.360
3	26	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah DTW yang ditata/ dibangun	12	62.900.000.000		31.376.292.928	4 DTW	14.686.115.300
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik yang ditata	6 dan 30 %				100 %	14.686.115.300
3	26	03			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase destinasi wisata yang dipromosikan/ dipasarkan</b>	72%	685.000.000		822.015.300	76%	1.789.152.200
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase media promosi yang digunakan	7 %				100 %	1.789.152.200



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terdidik	68%	1.220.000.000		867.713.600	76%	1.180.000.000
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terlatih/Terdidik	750 %				100 %	1.180.000.000
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			396.598.000.000		61.741.772.296		95.281.597.609
3	27	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	100%	125.301.000.000		23.801.888.713	100%	30.303.499.579
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%				100 %	229.400.000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%				100 %	26.450.674.007
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%				100 %	185.239.886
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%				100 %	779.586.000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%				100 %	1.046.636.450
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%				100 %	192.844.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%				100 %	465.385.336

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	%				100 %	953.733.900
3	27	02			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya</b>	<b>8,07 kw/h a</b>	<b>64.588.000.000</b>		<b>9.459.671.288</b>	<b>0,125 poin</b>	<b>12.639.114.040</b>
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	poin				0.125 poin	10.784.559.340
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	poin				0.125 poin	1.854.554.700
3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya</b>	<b>2,44 Poin</b>	<b>178.839.000.000</b>		<b>25.736.050.695</b>	<b>0,103 angka</b>	<b>44.135.400.600</b>
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	poin				0.103 poin	200.000.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	poin				0.103 poin	43.935.400.600
3	27	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana</b>	<b>419,28 kw</b>	<b>3.786.000.000</b>		<b>242.211.500</b>	<b>10%</b>	<b>2.007.720.080</b>
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	%				10 %	2.007.720.080
3	27	06			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan</b>	<b>16,45 Ton</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>206.210.000</b>	<b>50%</b>	<b>296.500.000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%				50 %	296.500.000
3	27	07			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi</b>	10%	23.084.000.000		2.295.740.100	20%	5.899.363.310
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%				9.87 %	5.899.363.310
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
3	29				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			77.266.000.000		16.392.282.159		18.577.765.448
3	29	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	76.433.000.000		16.349.146.959	100%	18.474.234.448
3	29	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	62.957.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	29	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	15.966.085.493
3	29	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	148.567.909
3	29	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	192.336.950
3	29	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	403.022.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	29	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	635.678.000
3	29	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	263.267.096
3	29	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%				100 %	802.320.000
3	29	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	Presentase perusahaan yang berizin	26%	833.000.000		43.135.200	25%	103.531.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang berizin	%				25 %	103.531.000
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			276.658.000.000		9.168.128.362		8.703.479.050
3	30	02			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	73%	2.533.000.000		7.453.406.350	18 Pelaku Usaha	465.000.000
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku Usaha				18 Pelaku Usaha	465.000.000
3	30	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	17	254.348.000.000		957.388.400	5 buah	5.564.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	buah				5 buah	5.564.200.000
3	30	04			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13%	11.110.000.000		70.949.300	10%	105.000.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%				10 %	105.000.000
3	30	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7	3.839.000.000		289.659.400	3 Produk	1.851.880.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Produk				3 Produk	1.851.880.000
3	30	06			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/ atau jasa	42%	2.667.000.000		210.565.650	42%	123.084.000
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/ atau jasa	%				41.8 %	123.084.000
3	30	07			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Jumlah produk yang dipromosikan	59	2.161.000.000		186.159.262	12 Jenis	594.315.050



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk yang dipromosikan	Jenis				12 Jenis	594.315.050
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			57.274.400.000		4.196.702.473		4.634.967.900
3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Pertambahan jumlah industri kecil	3%	56.011.000.000		4.116.397.573	1%	4.510.789.900
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil	%				1 %	4.510.789.900
3	31	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	40 IKM	618.000.000		19.999.900	10%	60.799.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	%				10 %	60.799.000
3	31	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Na	25%	645.400.000		60.305.000	0,18%	63.379.000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Na	%				0.18 %	63.379.000
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
4	01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			600.734.000.000		71.968.557.841		96.735.740.786
4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%	317.668.000.000		43.432.524.397	85%	52.465.690.301

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	%				90 %	143.481.500
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%				90 %	28.231.915.029
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%				90 %	1.277.173.695
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian yang terlaksana	%				90 %	431.026.200
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan	%				90 %	3.832.862.958
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana	%				90 %	1.632.322.100
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan	%				90 %	2.260.909.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%				90 %	6.652.600.000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terkelola	%				85 %	1.109.396.369
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	kerumahtanga an sekretariat daerah yang terfasilitasi	%				90 %	1.983.466.150
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Terwujudnya kelembagaan yang efektif efisien dan terukur serta tepat fungsi	%				90 %	1.215.258.100
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	%				90 %	3.695.278.600
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Prosentase Koordinasi Pemerintahan</b>	<b>95%</b>	<b>265.439.000.000</b>		<b>25.462.662.179</b>	<b>95%</b>	<b>40.366.374.376</b>
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	tatakelola kebijakan tata pemerintah yang dilaksanakan	%				90 %	1.749.611.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	tata kelola kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	%				90 %	36.575.113.755
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	Perda				12 Perda	1.619.751.500
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	kerjasama daerah yang terfasilitasi	%				90 %	421.897.821
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>pengendalian perkembangan usaha BUMD</b>	<b>80%</b>	<b>17.627.000.000</b>		<b>3.073.371.265</b>	<b>90%</b>	<b>3.903.676.109</b>
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	tata kelola kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	%				90 %	1.197.976.350
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program	%				90 %	1.007.442.469
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	umlah laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan perundang-undangan	Laporan				1 Laporan	1.332.621.090

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	kebijakan sumberdaya alam yang dievaluasi	%				90 %	365.636.200
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
4	02				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			340.718.000.000		57.014.133.899		71.951.795.772
4	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pelayanan dalam urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	220.326.000.000		39.584.614.391	100%	47.749.142.266
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi Kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 Perse n				100 Perse n	312.964.097
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Perse n				100 Perse n	5.696.733.512
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Perse n				100 Perse n	192.265.337
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Perse n				100 Perse n	479.417.350

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 Perse n				100 Perse n	2.798.740.045
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen				100 Perse n	2.275.033.000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Perse n				100 Perse n	738.954.200
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Perse n				100 Perse n	708.420.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Perse n				100 Perse n	32.618.089.580
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 Perse n				100 Perse n	1.928.525.145
4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Dukungan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>120.392.000.000</b>		<b>17.429.519.508</b>	<b>80%</b>	<b>24.202.653.506</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persen				100 Perse n	3.697.054.500
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen				100 Perse n	2.435.789.000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen				100 Perse n	535.286.600
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen				100 Perse n	3.628.254.232
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen				100 Perse n	4.544.685.374
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Persen				100 Perse n	9.361.583.800
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
5	01				<b>PERENCANAAN</b>			<b>69.693.000.000</b>		<b>13.791.136.721</b>		<b>15.234.645.151</b>



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90%	44.558.000.000		8.912.679.637	90%	9.803.896.314
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rancangan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	100 %				100 %	81.357.900
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	100 %				100 %	7.846.420.349
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.	90 %				90 %	112.595.932
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan.	90 %				90 %	844.004.433
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.	90 %				90 %	358.340.450
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan.	90 %				90 %	325.857.650

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan.	90 %				90 %	235.319.600
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan.</b>	<b>100%</b>	<b>11.933.000.000</b>		<b>2.471.929.750</b>	<b>100%</b>	<b>2.773.889.300</b>
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan	100 %				100 %	2.092.859.500
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai kebutuhan.	100 %				100 %	90.689.800
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	100 %				100 %	590.340.000
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Masyarakat serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.</b>	<b>100%</b>	<b>13.202.000.000</b>		<b>2.406.527.334</b>	<b>100%</b>	<b>2.656.859.537</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100 %				100 %	1.082.453.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100 %				100 %	735.852.537
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100 %				100 %	838.554.000
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>2.623.000.000</b>		<b>97.925.000</b>		<b>535.817.500</b>
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti</b>	<b>85%</b>	<b>2.623.000.000</b>		<b>97.925.000</b>	<b>85%</b>	<b>535.817.500</b>
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan.	100 %				100 %	276.020.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif.	85 %				85 %	259.797.500
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
5	02				<b>KEUANGAN</b>			3.667.716.780.558		823.402.647.298		852.830.054.721
5	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat</b>	100%	58.911.731.810		12.937.820.092	81%	12.314.371.448
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%				100 %	407.772.800
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%				100 %	8.151.692.946
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%				100 %	800.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	%				100 %	1.175.130.500
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik	%				100 %	365.000.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik	%				100 %	1.015.142.002
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	%				100 %	399.633.200
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>3.594.482.468.748</b>		<b>807.476.496.405</b>	<b>100%</b>	<b>835.732.732.273</b>
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%				100 %	2.433.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	%				95 %	1.066.882.400
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%				100 %	760.000.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	%				95 %	831.472.849.873
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir</b>	<b>95%</b>	<b>14.322.580.000</b>		<b>2.988.330.801</b>	<b>85%</b>	<b>4.782.951.000</b>
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Data Aset SKPD yang Akurat	%				85 %	4.782.951.000
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
5	02				<b>KEUANGAN</b>			<b>106.477.340.881</b>		<b>16.183.714.114</b>		<b>24.424.168.911</b>
5	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja sesuai Ketentuan (BAPENDA)</b>	<b>100%</b>	<b>78.871.468.574</b>		<b>12.387.718.484</b>	<b>100%</b>	<b>16.020.903.879</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	%				100 %	51.224.500
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen keuangan SKPD	%				100 %	13.002.053.580
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%				100 %	193.091.337
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana prasarana Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Pendapatan Daerah	%				100 %	204.352.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				90 %	652.711.404
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah	%				100 %	1.011.140.448
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				100 %	215.412.910
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Pendapatan Daerah	%				100 %	690.917.700
5	02	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>27.605.872.307</b>		<b>3.795.995.630</b>	<b>100%</b>	<b>8.403.265.032</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	%				100 %	8.403.265.032
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
5	03				<b>KEPEGAWAIAN</b>			65.846.000.000		13.755.331.352		16.237.170.263
5	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	100%	42.469.000.000		10.130.924.404	100%	11.617.328.208
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan AKIP	Laporan				4 Laporan	71.706.600
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan				1 Laporan	9.185.917.694
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis				10 jenis	903.723.250
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin	unit				3 unit	814.010.400
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa Kantor	jenis				3 jenis	324.134.314
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana penunjang kantor	jenis				4 jenis	317.835.950



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Prosentase Terpenuhinya Formasi Aparatur	82%	23.377.000.000		3.624.406.948	82%	4.619.842.055
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan ASN	Orang				1500 Orang	1.691.134.005
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi PNS	Orang				5246 Orang	860.056.200
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Peningkatan Kapasitas PNS	Orang				493 Orang	1.612.384.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kinerja	Kegiatan				10 Kegiatan	456.267.850
5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			48.471.000.000		7.380.063.794		8.328.022.395
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS	88%	48.471.000.000		7.380.063.794	82%	8.328.022.395
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kebijakan				1 Kebijakan	325.002.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan	Orang				1498 Orang	8.003.020.395
6					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
6	01				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			163.651.000.000		26.529.300.922		30.162.821.160

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Sangat Baik	115.271.000.000		19.104.122.822	Baik Indeks	20.063.835.310
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	15 Jenis Dokumen				15 Jenis Dokumen	137.471.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	386 Orang				97 Orang	16.577.380.338
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Keamanan	24 Orang				6 Orang	148.567.909
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Aspek Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis				2 Jenis	1.523.104.000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis				7 Jenis	1.101.345.500
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis				1 Jenis	148.881.400
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis				4 Jenis	321.385.163
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Jenis				3 Jenis	105.700.000
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV, dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	Sangat Baik	42.937.000.000		6.304.033.700	Baik	8.832.750.500
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Pengawasan Internal	6 Jenis				6 Jenis	7.234.500.500
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pengawasan Tertentu	8 Jenis				8 Jenis	1.598.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan</b>	91%	5.443.000.000		1.121.144.400	87%	1.266.235.350
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan	4 Rumusa n				1 Rumusa n	327.339.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	16 Kejiata n				4 Kegiatan	938.896.350
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			4.028.000.000		2.176.750.182		2.471.834.028
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	920.000.000		1.758.289.182	100%	1.929.155.428
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen				1 Dokume n	5.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen				2 Dokume n	1.477.200.028
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	5.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	Dokumen				1 Dokume n	80.151.800
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis				2 Jenis	84.450.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis				3 Jenis	33.247.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis				2 Jenis	244.105.900
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	149.000.000		172.706.000	100%	160.602.600
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Kegiatan				2 Kegiatan	137.552.600
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan PATEN	%				100 %	23.050.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	1.192.000.000		34.735.000	100%	41.389.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan				1 Laporan	41.389.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.439.000.000		90.720.000	100%	129.855.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				1 Laporan	99.950.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	%				100 %	29.905.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		93.950.000	100%	174.432.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%				100 %	174.432.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		26.350.000	100%	36.400.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang diberikan pengawasan dan pembinaan	%				100 %	36.400.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			20.111.000.000		4.686.544.402		3.203.976.238
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	18.079.000.000		3.989.706.502	100%	2.594.083.338
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	4 laporan				1 laporan	5.143.400
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	tahun				1 tahun	2.134.649.368
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 laporan				1 laporan	130.121.575
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 laporan				1 laporan	61.503.600
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	jenis				3 jenis	47.589.595

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4 laporan				1 laporan	215.075.800
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>510.000.000</b>		<b>409.962.300</b>	<b>100%</b>	<b>245.537.100</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan				1 laporan	58.200.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PATEN	laporan				1 laporan	187.337.100
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>1.194.000.000</b>		<b>86.875.500</b>	<b>100%</b>	<b>94.800.000</b>
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterampilan Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	tahun				1 tahun	94.800.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>74.000.000</b>		<b>200.000.100</b>	<b>100%</b>	<b>218.081.800</b>
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	4 laporan				1 laporan	218.081.800
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>100%</b>	<b>254.000.000</b>		<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>51.474.000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 laporan				1 laporan	51.474.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			14.569.000.000		4.863.514.503		2.633.565.850
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	11.143.000.000		4.300.664.003	100%	2.168.234.650
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	16.188.400
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	1.861.090.850
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	6.502.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	158.865.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	73.834.800
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	31.962.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	19.791.200
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	645.000.000		278.273.500	100%	117.685.500
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%				100 %	78.478.800
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%				100 %	39.206.700
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	1.212.000.000		29.250.800	100%	6.300.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	%				100 %	6.300.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.241.000.000		41.731.700	100%	57.169.500
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%				100 %	47.355.600



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%				100 %	9.813.900
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.000.000	100%	225.162.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%				100 %	225.162.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		13.594.500	100%	59.014.200
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	%				100 %	59.014.200
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			8.445.000.000		2.463.221.385		2.566.036.920
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah ditingkat Kecamatan</b>	100%	5.017.000.000		1.804.916.485	100%	1.914.375.920
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasi Administrasi Pelayanan Perknotoran	%				100 %	8.877.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan				12 Bulan	1.630.758.750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel				26 Stel	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Item				11 Item	91.467.425
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%				100 %	105.020.400
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan	Bulan				12 Bulan	23.342.345
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	Unit				8 Unit	39.910.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>375.000.000</b>		<b>347.204.000</b>	<b>100%</b>	<b>299.145.100</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan				3 Kegiatan	125.237.100
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan				1 Laporan	173.908.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	1.531.000.000		33.376.100	100%	15.030.100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Kegiatan				1 Kegiatan	15.030.100
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.194.000.000		77.724.800	100%	88.031.200
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan				1 Laporan	88.031.200
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		200.000.000	100%	212.246.500
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kali				1 Kali	212.246.500
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		0	100%	37.208.100
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kali				3 Kali	37.208.100
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			4.856.000.000		2.826.161.141		2.782.546.693

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	2.333.000.000		2.191.904.941	100%	2.117.192.893
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	laporan				1 laporan	8.056.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan	dokumen				1 dokume n	1.891.193.693
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	laporan				1 laporan	14.002.500
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	ersentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	%				100 %	82.746.973
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan				1 laporan	35.312.600
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran STNK desn servis kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	unit				11 unit	57.630.977
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				1 laporan	28.250.150
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>% Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Pub;ik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	84.000.000		223.956.700	100%	79.029.100
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	laporan				1 laporan	67.631.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	laporan				1 laporan	11.397.700
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	929.000.000		27.022.500	100%	51.005.600
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	laporan				1 laporan	10.710.100
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	laporan				1 laporan	40.295.500
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.182.000.000		155.760.000	100%	256.660.300
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	laporan				2 laporan	202.720.300
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	%				100 %	53.940.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.000.000	100%	237.709.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	laporan				1 laporan	237.709.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		27.517.000	100%	40.949.800
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	laporan				1 laporan	40.949.800
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			6.456.000.000		2.425.953.577		2.280.480.562
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	3.740.000.000		1.839.240.467	100%	1.755.563.162
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				2 Laporan	11.846.250
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan				2 Laporan	1.480.013.706
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan				2 Laporan	13.851.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				7 Laporan	161.892.256
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				3 Laporan	12.699.800
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				3 Laporan	23.810.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				2 Laporan	51.449.950
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	84.000.000		237.658.310	100%	114.704.600
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan				1 Laporan	107.539.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	7.165.600
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	812.000.000		33.405.900	100%	5.799.700
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan				1 Laporan	5.799.700
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentasi penanganan gangguan Trantibum</b>	100%	1.492.000.000		170.059.700	100%	203.522.800
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Laporan				2 Laporan	189.930.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan				2 Laporan	13.592.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat</b>	100%	74.000.000		100.000.000	100%	140.224.900
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan				3 Laporan	140.224.900
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>prosentase Desa yang berkinerja baik</b>	100%	254.000.000		45.589.200	100%	60.665.400
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan				3 Laporan	60.665.400
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			8.273.000.000		2.807.372.176		2.482.025.648
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	4.744.000.000		2.346.817.176	100%	2.153.749.148
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	17.136.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	1.657.293.851
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	9.620.200
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	179.563.055
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	219.684.130



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	50.915.012
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%				100 %	19.536.900
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>326.000.000</b>		<b>254.323.500</b>	<b>100%</b>	<b>105.476.700</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	83.803.400
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Publik Yang Sesuai Standar Pelayanan	%				100 %	21.673.300
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>954.000.000</b>		<b>47.245.300</b>	<b>100%</b>	<b>14.601.400</b>
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	14.601.400
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>1.921.000.000</b>		<b>57.529.200</b>	<b>100%</b>	<b>67.973.400</b>
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	57.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	10.973.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		96.000.000	100%	100.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%				100 %	100.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan</b>	100%	254.000.000		5.457.000	100%	40.225.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	40.225.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			9.477.000.000		2.425.216.414		2.677.097.196
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	100%	3.832.000.000		1.835.004.814	100%	2.172.821.196
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen				1 Dokumen	7.354.300
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akhir Tahun	Laporan				1 Laporan	1.646.452.336
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah laporan kepegawaian perangkat daerah	Laporan				2 Laporan	9.427.900
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ) peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Item				7 Item	175.812.370

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Mebel sesuai Kebutuhan	Jenis				9 Jenis	73.500.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	49.793.740
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	210.480.550
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	304.000.000		260.478.200	100%	120.319.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Keagamaan (MTQ)	Laporan				1 Laporan	72.719.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan di Kecamatan	Laporan				7 Laporan	47.600.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan</b>	100%	3.675.000.000		18.599.000	100%	43.196.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Dokumen				1 Dokumen	15.810.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Dokumen				1 Dokumen	27.386.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.338.000.000		95.448.900	100%	123.118.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan harmonisasi dengan tokoh agama	%				100 %	123.118.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.000.000	100%	200.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kali				1 Kali	200.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		15.685.500	100%	17.643.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kali				4 Kali	17.643.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			9.017.000.000		2.146.148.600		2.574.898.585
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	2.650.000.000		1.705.808.700	100%	2.274.298.835
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen				1 Dokumen	20.712.200
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Dokumen				1 Dokumen	1.453.011.885
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				3 Orang	19.600.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Item				3 Item	51.889.760

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Unit				4 Unit	591.338.750
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan	Bulan				12 Bulan	21.050.440
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit				3 Unit	116.695.800
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	177.000.000		235.413.900	100%	70.811.750
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Fasilitasi Kegiatan Olahraga	Kali				4 Kali	50.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	20.811.750
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	3.919.000.000		87.192.000	100%	30.300.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Dokumen				1 Dokumen	18.010.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kali				5 Kali	12.290.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.943.000.000		21.050.000	100%	39.630.500
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	Kali				12 Kali	18.800.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	Kali				4 Kali	12.953.000
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kali				5 Kali	7.877.500
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		96.684.000	100%	128.739.400
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kali				12 Kali	128.739.400
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		0	100%	31.118.100
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen RPTK	Dokumen				1 Dokumen	31.118.100
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			16.555.000.000		1.993.199.596		1.989.451.506

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	13.919.000.000		1.642.268.196	100%	1.771.921.406
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100 %				100 %	9.629.600
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	1.433.482.506
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	8.127.500
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	%				100 %	163.923.700
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %				100 %	80.960.500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan				1 Laporan	36.052.600
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	39.745.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	177.000.000		277.169.400	100%	83.661.900
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kali				3 Kali	58.661.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan, Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %				100 %	25.000.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>1.161.000.000</b>		<b>25.150.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.710.800</b>
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%				100 %	6.710.800
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>970.000.000</b>		<b>39.070.000</b>	<b>100%</b>	<b>53.128.900</b>
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%				100 %	44.444.100
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%				100 %	8.684.800
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>74.000.000</b>		<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>25.089.500</b>
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kegiatan				3 Kegiatan	25.089.500



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		9.542.000	100%	48.939.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%				100 %	48.939.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			8.285.000.000		3.973.491.881		2.036.986.527
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100%	5.059.000.000		3.524.733.481	100%	1.745.202.927
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	%				100 %	10.700.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	%				100 %	1.396.899.557
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	7.803.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	142.623.900
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berkondisi Baik	%				100 %	124.700.920
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	42.662.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentse Sarana dan Prasarana Aparatur yang berkondisi Baik	%				100 %	19.813.550
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>387.000.000</b>		<b>261.268.500</b>	<b>100%</b>	<b>77.936.500</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	%				100 %	70.786.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%				100 %	7.150.500
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>986.000.000</b>		<b>35.274.900</b>	<b>100%</b>	<b>12.600.000</b>
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Masyarakat Desa/Kelurahan Yang di Berdayakan	%				100 %	12.600.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>1.525.000.000</b>		<b>38.360.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.114.300</b>
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%				100 %	38.936.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	12 Kali				12 Kali	7.178.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		99.999.600	100%	116.501.500
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%				100 %	116.501.500
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		13.855.400	100%	38.631.300
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	%				100 %	38.631.300
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			16.287.000.000		2.398.657.893		4.396.344.937
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan Kecamatan</b>	100%	10.796.000.000		1.771.187.793	100%	3.899.753.437
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen				1 Dokumen	15.322.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	1.597.530.517
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel				22 Stel	30.029.400
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	eksemplar				132 eksemplar	75.980.400
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		item				3 item	2.096.499.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	bulan				12 bulan	51.343.220
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor	unit				2 unit	33.048.600
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	250.000.000		363.818.000	100%	222.391.200
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Kali				12 Kali	50.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan di wilayah kecamatan	bulan				12 bulan	172.391.200
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	2.981.000.000		36.591.100	100%	28.111.500
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Monitoring Kegiatan RPTK	Laporan				12 Laporan	16.727.500
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang kegiatannya difasilitasi kecamatan	kader PKK				1 kader PKK	11.384.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	100%	2.186.000.000		27.061.000	100%	46.088.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kali				12 Kali	46.088.800
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.000.000	100%	200.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam, koordinasi terkait covid	Tahun				1 Tahun	200.000.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			13.962.000.000		2.402.377.893		4.231.800.070
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	11.359.000.000		1.820.710.093	100%	3.668.112.170
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	10.104.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	1.517.347.820
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	7.352.100
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	115.186.690
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%				100 %	1.948.429.400
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	32.992.160
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	36.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	433.000.000		245.399.300	100%	136.753.700
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	50.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Publik Yang Sesuai Standar	%				100 %	86.753.700
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	630.000.000		26.068.500	100%	45.149.100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	28.192.500
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah	%				100 %	16.956.600
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumn	100%	1.212.000.000		88.200.000	1 Tahun	125.309.900
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Trantibum yang Ditangani	Tahun				1 Tahun	103.200.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%				100 %	22.109.900
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		190.700.100	100%	224.189.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%				100 %	224.189.200
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>100%</b>	<b>254.000.000</b>		<b>31.299.900</b>	<b>100%</b>	<b>32.286.000</b>
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	%				100 %	32.286.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			<b>19.254.000.000</b>		<b>4.598.090.241</b>		<b>3.624.777.187</b>
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>12.409.000.000</b>		<b>3.953.231.441</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>3.090.110.387</b>
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	Dokumen				1 Dokumen	7.606.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan				12 Bulan	2.098.240.522
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Item				0 Item	66.337.763
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD	Persen				85 Persen	823.687.650
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	Persen				100 Persen	41.523.652
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Berkondisi baik/layak pakai	Persen				90 Persen	52.714.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	1.538.000.000		408.221.000	100%	243.757.500
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Kali Kegiatan				12 Kali Kegiatan	87.757.500
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan PATEN	Persen				100 Perse n	156.000.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	3.414.000.000		29.333.100	100%	26.142.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi dalam rangka Pemberdayaan .Desa	Kali Kegiatan				12 Kali Kegiatan	11.142.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tk Kecamatan yang diberdayakan	Persen.				100 Perse n.	15.000.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.819.000.000		40.134.700	100%	64.767.300
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterampilan Umum	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kejadian				6 Kejadian	64.767.300
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		167.170.000	100%	200.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Persen.				95 Persen.	200.000.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			6.793.000.000		2.485.774.703		3.535.935.716
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	3.541.000.000		1.910.538.953	100%	3.051.341.016
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	laporan				1 laporan	13.366.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	dokumen				1 dokumen	1.591.383.485
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	laporan				1 laporan	15.250.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan				1 laporan	107.467.675
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				1 Laporan	1.280.267.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				1 laporan	24.706.856
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedungan				1 Gedung	18.900.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	244.000.000		287.235.750	1 laporan	102.099.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	laporan				1 laporan	90.252.400
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	laporan				1 laporan	11.847.500
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	1.063.000.000		0	100%	40.996.800
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	laporan				1 laporan	9.867.300
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	laporan				1 laporan	31.129.500
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.617.000.000		94.360.000	100%	115.890.500
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	laporan				1 laporan	115.890.500
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		180.440.000	100%	200.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	laporan				1 laporan	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		13.200.000	100%	25.607.500
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	laporan				1 laporan	25.607.500
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			11.983.000.000		2.380.370.262		4.511.644.378
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9.798.000.000		1.900.465.262	100%	4.087.184.928
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	bulan				12 bulan	8.354.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji	bulan				14 bulan	1.686.799.278
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	dokumen				1 dokume n	4.950.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah laporan	bulan				12 bulan	10.601.500
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kantor	Persen				100 Persen	192.214.350
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD	Persen				85 Persen	2.039.146.900
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Kantor	Persen				85 Persen	38.652.900
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Miim Daerah	bulan				12 bulan	106.466.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	73.000.000		196.520.700	100%	119.221.450
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Kali Kegiatan				6 Kali Kegiatan	105.217.450
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan PATEN	Persen				100 Perse n	14.004.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	591.000.000		39.640.000	100%	32.083.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi dalam rangka Pemberdayaan Desa	Kegiatan				6 Kegiatan	32.083.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.447.000.000		58.530.000	100%	73.155.000
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kejadian				6 Kejadian	73.155.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		185.214.300	100%	200.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen				100 Perse n	200.000.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01				<b>KECAMATAN</b>			2.859.000.000		2.669.264.781		4.625.398.989
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.</b>	100%	599.000.000		2.255.461.526	100%	4.250.483.689
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%				100 %	4.960.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen				1 Dokumen	2.000.308.062
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%				100 %	17.697.350
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				12 Laporan	135.656.110
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis				3 jenis	2.043.856.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis				3 Jenis	37.693.967
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				2 Laporan	10.312.200
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	129.000.000		190.782.455	100%	63.005.700
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	kegiatan				2 kegiatan	57.361.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Paten	Jenis				4 Jenis	5.644.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Tantribum</b>	100%	1.803.000.000		23.020.800	100%	28.360.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah gangguan tantribum yang ditangani	jenis				2 jenis	19.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penegakkan perda/perkada di wilayah kecamatan	%				100 %	9.360.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.000.000	100%	219.886.400
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%				100 %	219.886.400
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		0	100%	63.663.200
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Laporan				1 Laporan	63.663.200
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			123.301.000.000		25.866.628.432		16.023.928.935

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	30.479.000.000		9.600.837.963	100%	11.279.379.485
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	dokumen				1 dokumen	31.559.400
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	dokumen				1 dokumen	8.670.171.863
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	laporan				1 laporan	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	laporan				1 laporan	877.391.049
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	%				100 %	1.564.537.850
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				1 laporan	91.709.323
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%				100 %	29.010.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	1.879.000.000		460.327.400	100%	299.078.850
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi	Kegiatan				1 Kegiatan	107.868.350
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	laporan				1 laporan	191.210.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	82.534.000.000		15.452.791.969	100%	15.035.593.725
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	%				100 %	31.218.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%				100 %	3.982.374.400
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	8.081.000.000		154.947.000	100%	173.548.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	laporan				1 laporan	173.548.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		197.724.100	100%	209.052.700
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%				100 %	209.052.700
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		0	100%	49.277.500
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	laporan				1 laporan	49.277.500
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			7.192.000.000		2.997.948.219		3.485.995.350



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	3.605.000.000		2.362.325.619	100%	2.911.239.550
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	Dokumen				3 Dokumen	11.245.200
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	2.176.676.335
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen				1 Dokumen	16.300.700
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen				1 Dokumen	124.796.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Dokumen				1 Dokumen	305.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Tahun				1 Tahun	61.403.065
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun				1 Tahun	215.818.250
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	362.000.000		296.903.400	100%	141.677.200
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Tahun				1 Tahun	83.678.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan PATEN	Tahun				1 Tahun	57.999.200
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat Diberdayakan</b>	100%	1.451.000.000		26.929.600	100%	8.728.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Tahun				1 Tahun	8.728.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.446.000.000		112.562.600	100%	145.925.200
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%				100 %	145.925.200
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diLimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		199.227.000	100%	220.730.400
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Tahun				1 Tahun	220.730.400
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		0	100%	57.695.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	%				100 %	57.695.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			14.896.000.000		2.069.059.578		1.820.027.461

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	11.572.000.000		1.739.609.240	100%	1.566.931.761
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	dokumen				1 dokume n	5.620.700
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Lapora n				1 Laporan	1.245.882.461
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengiriman ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegaa berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang				2 orang	16.502.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pelayanan administrasi perkantoran	persen				100 perse n	133.038.360
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	persen				100 perse n	90.868.700
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	persen				100 perse n	22.799.540
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	persen				100 perse n	52.220.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan</b>	100%	430.000.000		229.028.838	100%	100.181.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	kali				12 kali	67.681.100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan PATEN	persen				100 persen	32.499.900
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	1.262.000.000		36.320.000	100%	15.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	kali				12 kali	15.000.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibum</b>	100%	1.304.000.000		47.195.000	100%	75.510.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah gangguan trantibum yang di tangani	kali				12 kali	64.900.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase penegakan perda/perkada di wilayah kecamatan	persen				100 persen	10.610.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat</b>	100%	74.000.000		0	100%	32.548.700
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan	persen				100 persen	32.548.700
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		16.906.500	100%	29.856.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Lomba Desa, Pembinaan Desa, Monev PBB)	bulan				12 bulan	29.856.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			72.245.000.000		10.692.691.668		7.326.881.330
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di tingkat kecamatan</b>	100%	19.428.000.000		4.957.433.686	100%	5.728.230.480
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen				3 Dokumen	5.500.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kegiatan				5 kegiatan	4.970.133.830
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Kepegawaian	Dokumen				1 Dokumen	21.131.500
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Persen				100 Persen	291.850.050
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset berkondisi baik	Persen				85 Persen	220.436.700
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	Persen				100 Persen	152.612.400
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset berkondisi baik	Persen				85 Persen	66.566.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	3.713.000.000		456.366.700	100%	261.440.500
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Kali Kegiatan				12 Kali Kegiatan	23.150.200
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan PATEN	Persen				100 Perse n	238.290.300
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	43.708.000.000		5.023.868.682	100%	5.000.017.300
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa	Tahun				1 Tahun	35.830.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen				85 Persen	42.987.300
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tk Kecamatan yang diberdayakan	Persen				100 Perse n	913.200.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	5.068.000.000		37.319.000	100%	47.680.650
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	Persen				85 Persen	38.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kejadian				12 Kejadia n	9.680.650

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.000.000	100%	210.081.400
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Persen				100 Persen	210.081.400
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		17.703.600	100%	87.431.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang diberikan pengawasan dan pembinaan	Persen				100 Persen	87.431.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			20.577.000.000		2.190.220.122		3.285.706.228
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	18.147.000.000		1.791.901.002	100%	2.855.501.228
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Dokumen Adminitrsai Keuangan tepat waktu	Persen				100 Persen	1.510.643.728
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	JUmlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	Orang				2 Orang	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan				1 laporan	95.924.350
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan				1 laporan	1.205.955.860
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				1 laporan	15.517.290

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				1 laporan	12.460.000	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	257.000.000		251.581.420	100%	202.537.500	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Kegiatan				12 Kegiatan	202.537.500	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	764.000.000		37.480.700	80%	19.394.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Monev Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RKPD Tk Desa	Desa				0 Desa	19.394.000	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		0	100%	1.081.000.000		109.257.000	100%	153.734.500
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kejadian				6 Kejadian	153.734.500	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		0	100%	24.546.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen				0 Persen	24.546.000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		0	100%	29.993.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang diberikan pengawasan dan pembinaan	Persen				100 Persen	29.993.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			6.888.000.000		2.803.045.557		3.027.013.727
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1.155.000.000		2.048.558.957	100%	2.346.311.677
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	4.800.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	2.073.750.032
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	10.429.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	96.351.700
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				1 laporan	39.616.200
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	45.777.545

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	75.587.200
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	707.000.000		404.304.500	100%	235.979.050
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan				1 Laporan	73.880.250
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	162.098.800
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	3.175.000.000		36.149.100	100%	29.523.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan				1 Laporan	6.720.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan				1 Laporan	22.803.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.523.000.000		82.200.000	100%	110.848.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan				1 Laporan	110.848.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		199.913.000	100%	227.114.800
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan				1 Laporan	227.114.800
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		31.920.000	100%	77.237.200
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan				1 Laporan	77.237.200
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			6.433.000.000		3.412.846.348		3.964.674.568
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	4.317.000.000		2.989.531.588	100%	3.546.466.418
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan				1 Laporan	68.420.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan				1 Laporan	1.352.486.208
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan				1 Laporan	17.213.800
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan				1 Laporan	77.397.093

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan				1 Laporan	1.973.812.900
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan				1 Laporan	44.299.267
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan				1 Laporan	12.837.150
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>76.000.000</b>		<b>189.138.960</b>	<b>100%</b>	<b>99.844.700</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Laporan				1 Laporan	79.101.500
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	5 Laporan				1 Laporan	20.743.200
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>603.000.000</b>		<b>32.515.900</b>	<b>100%</b>	<b>2.240.000</b>
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan				1 Laporan	2.240.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.109.000.000		90.716.000	100%	146.698.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	5 Laporan				1 Laporan	133.876.600
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan				1 Laporan	12.821.400
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		90.860.900	100%	120.806.100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan				1 Laporan	120.806.100
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		20.083.000	100%	48.619.350
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Laporan				1 Laporan	48.619.350
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			16.362.000.000		3.225.814.122		6.600.484.693
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	8.972.000.000		2.545.205.672	100%	6.036.747.393

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	laporan				1 laporan	7.948.500
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	dokumen				1 dokumen	3.151.643.663
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	umlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	laporan				1 laporan	17.652.800
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan				1 laporan	139.367.807
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan				1 laporan	2.588.754.223
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%				100 %	57.770.500
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%				100 %	73.609.900
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>716.000.000</b>		<b>373.045.850</b>	<b>100%</b>	<b>226.371.700</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	laporan				1 laporan	91.038.300
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	laporan				1 laporan	135.333.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat yang dapat Diberdayakan	100%	5.189.000.000		37.433.000	90%	10.697.600
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	laporan				1 laporan	10.697.600
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.157.000.000		53.083.000	70%	72.963.600
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	1 laporan				1 laporan	61.726.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggraan Tugas Pemerintah Umum Tk Kecamatan	%				100 %	11.237.600
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		199.986.700	100%	221.104.500
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	laporan				1 laporan	221.104.500
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja baik	100%	254.000.000		17.059.900	80%	32.599.900
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	laporan				1 laporan	32.599.900
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			12.053.000.000		2.482.372.119		2.793.133.618

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	6.445.000.000		1.986.048.569	100%	2.396.626.618
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	Laporan				1 Laporan	37.778.700
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan	dokumen				1 dokume n	1.460.440.968
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	25.568.500
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	201.352.450
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				1 Laporan	588.175.700
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Laporan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	43.940.300
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	39.370.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh KecamatanPemerintahan tingkat Kecamatanenyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan</b>	100%	303.000.000		275.535.150	100%	70.411.500



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Laporan				1 Laporan	61.388.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	Laporan				1 Laporan	9.023.500
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	3.390.000.000		59.538.400	100%	27.245.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan				1 Laporan	27.245.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.587.000.000		141.890.000	100%	189.570.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				1 Laporan	170.570.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				1 Laporan	19.000.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		0	100%	15.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		19.360.000	100%	94.280.500
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan				1 Laporan	94.280.500
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			13.588.000.000		4.345.987.611		2.987.517.027
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.822.000.000		3.670.283.811	80%	2.439.244.027
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Rencana, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%				80 %	41.237.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%				80 %	1.607.579.192
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Kepegawaian	%				80 %	20.969.400
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	%				80 %	150.679.235
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	%				100 %	372.632.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan Jasa Penunjang urusan Urusan Pemerintahan Daerah	%				80 %	29.087.200
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proses Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%				80 %	217.060.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	% Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	404.000.000		338.946.600	80%	198.218.600
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	%				80 %	94.662.800
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan PATEN	%				80 %	103.555.800
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	100%	820.000.000		38.764.500	80%	35.652.800
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Desa	%				80 %	16.340.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang berdaya	%				80 %	19.312.800
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.214.000.000		83.741.500	80%	90.000.000
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani	Kejadian				10 Kejadia n	90.000.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		199.999.700	80%	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%				80 %	200.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>100%</b>	<b>254.000.000</b>		<b>14.251.500</b>	<b>80%</b>	<b>24.401.600</b>
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang berkinerja baik	%				80 %	24.401.600
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			<b>6.676.000.000</b>		<b>2.464.723.884</b>		<b>2.278.266.149</b>
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>4.868.000.000</b>		<b>1.876.578.284</b>	<b>100%</b>	<b>1.784.335.699</b>
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	Laporan				1 Laporan	12.120.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen				1 Dokumen	1.365.495.579
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	110.376.420
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	209.799.500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	21.029.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	65.515.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	134.000.000		308.186.900	100%	152.417.150
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Laporan				1 Laporan	57.032.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	Laporan				1 Laporan	95.385.150
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.346.000.000		91.205.700	100%	107.645.700
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterampilan Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				1 Laporan	107.645.700
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		188.753.000	100%	188.633.300
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	188.633.300
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		0	100%	45.234.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan				1 Laporan	45.234.300
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			3.245.000.000		2.120.498.888		2.073.670.437
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	100%	822.000.000		1.611.096.188	100%	1.679.784.637
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen				4 Dokumen	21.040.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	Bulan				12 Bulan	1.358.034.137
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	dokumen				1 dokumen	5.728.600
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengiriman ASN yang mengikuti Pendiidkan dan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsinya	orang				6 orang	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	Kegiatan				6 Kegiatan	112.953.590
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Unit				2 Unit	82.642.086
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan				2 Kegiatan	26.312.800
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan				4 Kegiatan	58.073.424

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat	100%	384.000.000		280.996.700	100%	64.607.600
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan				1 Kegiatan	56.844.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kegiatan				1 Kegiatan	7.763.600
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa yang diberdayakan	100%	1.001.000.000		10.329.900	100%	10.544.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kegiatan				1 Kegiatan	10.544.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase Penanganan Gangguan Tantrimum	100%	710.000.000		103.076.300	100%	135.736.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kegiatan				2 Kegiatan	121.016.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	%				100 %	14.720.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	74.000.000		100.000.000	100%	141.675.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kegiatan				1 Kegiatan	141.675.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		14.999.800	100%	41.323.200
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Jenis Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan				1 Kegiatan	41.323.200
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			26.658.000.000		2.095.559.565		4.179.589.997
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	23.860.000.000		1.747.292.765	100%	3.865.580.297
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%				100 %	10.541.800
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%				100 %	1.362.864.469
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan				2 Kegiatan	10.964.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				100 %	165.860.725
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%				100 %	2.261.118.900
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				100 %	34.790.403
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	%				100 %	19.440.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	219.000.000		242.593.000	100%	130.482.300
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Kegiatan				1 Kegiatan	61.730.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%				100 %	68.752.300
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	781.000.000		31.328.900	100%	18.672.400
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Orang				100 Orang	18.672.400
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.470.000.000		74.344.900	100%	87.904.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	Kegiatan				2 Kegiatan	87.904.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		0	100%	18.993.200
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%				100 %	18.993.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		0	100%	57.957.800
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen RPTK	Dokumen				1 Dokumen	57.957.800
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			18.943.000.000		5.986.427.803		3.277.081.488
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	100%	13.009.000.000		5.549.381.603	100%	2.944.781.888
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen				1 Dokumen	8.050.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	2.291.963.988
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	75.371.710
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%				100 %	536.824.170
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	21.172.020
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%				100 %	11.400.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	185.000.000		187.417.700	100%	79.943.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	74.793.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	%				100 %	5.150.200
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>4.605.000.000</b>		<b>40.688.800</b>	<b>100%</b>	<b>18.286.000</b>
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	18.286.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Program Gangguan Trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>816.000.000</b>		<b>63.743.500</b>	<b>100%</b>	<b>84.582.900</b>
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	62.959.500
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	21.623.400
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>74.000.000</b>		<b>103.136.400</b>	<b>100%</b>	<b>123.128.500</b>
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	%				100 %	123.128.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		42.059.800	100%	26.359.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%				100 %	26.359.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			10.533.000.000		2.010.726.262		2.216.885.317
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	8.954.000.000		1.758.971.262	100%	1.929.534.717
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	Kegiatan				6 Kegiatan	6.837.200
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen				1 Dokumen	1.401.990.877
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	10.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Cetak dan penggandaan	Jenis				2 Jenis	77.410.800
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan mebel	unit				10 unit	395.281.700
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	Jenis				4 Jenis	25.865.840
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran STNK desn servis kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	unit				8 unit	12.148.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	112.000.000		164.527.000	100%	95.194.100
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	1 Laporan				1 Laporan	77.322.100
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	1 Laporan				1 Laporan	17.872.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	475.000.000		12.002.000	100%	42.236.500
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan				1 Laporan	33.456.500
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan				1 Laporan	8.780.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	664.000.000		62.746.000	100%	87.440.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	1 Laporan				1 Laporan	87.440.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		0	100%	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	50.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>100%</b>	<b>254.000.000</b>		<b>12.480.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.480.000</b>
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 Laporan				1 Laporan	12.480.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			<b>7.698.000.000</b>		<b>2.873.219.395</b>		<b>3.127.687.520</b>
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>5.048.000.000</b>		<b>2.176.666.295</b>	<b>100%</b>	<b>2.561.003.720</b>
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen				1 Dokumen	7.851.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen				1 Dokumen	2.010.179.520
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	Dokumen				1 Dokumen	141.971.700
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis				3 Jenis	146.100.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis				3 Jenis	39.117.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis				1 Jenis	200.784.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	157.000.000		397.853.800	100%	244.608.400
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Kegiatan				1 Kegiatan	77.958.400
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	Kali				2 Kali	166.650.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	941.000.000		21.229.400	100%	10.118.900
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%				100 %	10.118.900
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.224.000.000		53.630.100	100%	88.376.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				1 Laporan	80.100.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	%				100 %	8.276.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.000.100	100%	210.583.100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%				100 %	210.583.100
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		23.839.700	100%	12.997.400
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	%				100 %	12.997.400
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			25.010.000.000		5.492.154.799		4.488.912.648
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	100%	19.327.000.000		5.178.734.599	1 Laporan	4.305.162.648
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen				1 dokumen	17.500.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%				100 %	1.693.467.648
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminitrasi Kepegawaian	laporan				1 laporan	9.902.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga	Tahun				1 Tahun	89.512.800
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	%				100 %	2.335.342.700



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				1 laporan	49.587.500
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset	%				100 %	109.850.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>851.000.000</b>		<b>227.820.200</b>	<b>100%</b>	<b>118.958.000</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	kegiatan				1 kegiatan	96.958.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan PATEN	%				100 %	22.000.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>3.528.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>23.992.000</b>
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	laporan				1 laporan	13.992.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	%				100 %	10.000.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>1.304.000.000</b>		<b>55.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.800.000</b>
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	%				100 %	40.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN			13.642.000.000		2.483.199.485		2.494.560.997
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	11.012.000.000		1.848.458.985	100%	1.862.221.397
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	23.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun				1 Tahun	1.421.433.335
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	11.913.800
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	137.383.232
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit				2 Unit	220.123.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	19.005.880
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	29.362.150
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Pub;ik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	342.000.000		225.153.600	82%	126.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Tahun				1 Tahun	91.600.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan PATEN	Tahun				1 Tahun	35.000.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	814.000.000		99.689.500	100%	34.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan				1 Laporan	24.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	laporan				1 laporan	10.000.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	1.146.000.000		103.970.000	80%	202.215.700
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				1 Laporan	9.400.000
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				1 Laporan	192.815.700
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.000.100	90%	230.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	230.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>100%</b>	<b>254.000.000</b>		<b>5.927.300</b>	<b>85%</b>	<b>39.523.900</b>
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan				1 Laporan	39.523.900
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			<b>36.142.000.000</b>		<b>1.902.949.813</b>		<b>2.489.848.957</b>
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>35.595.000.000</b>		<b>1.674.202.713</b>	<b>100%</b>	<b>2.312.734.097</b>
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	CC				58.46 CC	9.578.800
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	CC				58.46 CC	1.442.424.380
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	CC				58.46 CC	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	CC				58.46 CC	90.802.260
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Aset dalam Kondisi Baik	Tahun				1 Tahun	555.190.400
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP	CC				58.46 CC	25.472.007

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun				1 Tahun	174.266.250
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	473.000.000		228.747.100	100%	154.952.860
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Tahun				1 Tahun	104.640.460
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai SKM	%				100 %	50.312.400
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		0	100%	22.162.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%				100 %	22.162.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			4.189.000.000		2.099.177.680		2.533.906.964
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	2.215.000.000		1.794.240.480	100%	2.310.015.214
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Laporan				11 Laporan	1.435.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%				100 %	1.561.675.394
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100 %	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	120.317.050
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				1 Laporan	450.380.370
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan				12 Bulan	32.933.200
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%				100 %	128.273.300
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>128.000.000</b>		<b>209.990.600</b>	<b>100%</b>	<b>69.896.750</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%				100 %	60.496.950
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan PATEN	Laporan				1 Laporan	9.399.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	483.000.000		31.118.400	100%	4.949.700
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan				1 Laporan	4.949.700
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.101.000.000		63.828.200	100%	71.800.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				12 Laporan	71.800.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		0	100%	12.778.800
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Laporan				2 Laporan	12.778.800
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	188.000.000		0	100%	64.466.500
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan				2 Laporan	64.466.500
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			18.226.000.000		4.434.530.926		3.529.336.473
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	16.392.000.000		3.852.609.526	100%	2.963.737.173

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%				100 %	1.607.091.153
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%				100 %	12.970.860
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				100 %	135.385.510
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%				100 %	1.158.296.850
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				100 %	35.592.800
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				100 %	14.400.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>275.000.000</b>		<b>238.961.500</b>	<b>100%</b>	<b>127.475.300</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan				1 Laporan	76.749.200
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%				100 %	50.726.100



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.231.000.000		142.959.900	100%	166.154.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan				1 Laporan	166.154.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		200.000.000	100%	211.020.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan				1 Laporan	211.020.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik - Sukawening	100%	254.000.000		0	100%	60.950.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan				1 Laporan	60.950.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			14.744.000.000		4.549.802.433		3.601.550.893
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	100%	12.235.000.000		4.100.790.733	100%	3.205.386.983
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				16846800 Rupiah	21.196.740

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				17339079 11 Rupiah	1.751.511.593
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%				100 %	3.048.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				11502300 Rupiah	4.025.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				22332900 0 Rupiah	142.360.800
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				17125590 00 Rupiah	964.406.800
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				20196200 Rupiah	42.828.400
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				12188640 0 Rupiah	276.009.650
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>94.000.000</b>		<b>212.532.000</b>	<b>100%</b>	<b>94.955.760</b>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				10000000 0 Rupiah	62.598.900
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				29957100 Rupiah	32.356.860

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	438.000.000		53.154.500	100%	49.262.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%				100 %	24.839.400
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		%				100 %	24.422.600
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase penagnanan gangguan trantibum	100%	1.649.000.000		80.000.000	100%	107.364.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI dan POLRI	bulan				12 bulan	107.364.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat	100%	74.000.000		100.000.200	100%	123.592.200
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana yang dibutuhkan	Rupiah				50000000 Rupiah	123.592.200
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase Desa berkinerja baik	100%	254.000.000		3.325.000	100%	20.989.950
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%				100 %	20.989.950
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			28.159.000.000		6.525.476.996		4.141.306.979

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Laporan Prorgam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.557.000.000		4.566.881.849	7 Laporan	3.292.230.979
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%				100 %	2.031.900
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen				1 Dokumen	2.529.489.643
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	26.279.660
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan				7 Laporan	204.327.416
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				1 Laporan	367.100.300
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan				1 Laporan	86.684.060
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				1 Laporan	76.318.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	552.000.000		429.088.300	100%	270.128.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahaan tingkat Kecamatan	Laporan				1 Laporan	76.856.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan PATEN	Laporan				1 Laporan	193.272.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	9.030.000.000		1.293.398.847	100%	1.433.884.510
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan				4 Laporan	3.600.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan				1 Laporan	1.011.814.010
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Laporan				1 Laporan	259.448.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	2.692.000.000		123.934.000	100%	133.738.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan				1 Laporan	133.738.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat</b>	100%	74.000.000		100.000.000	100%	113.213.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Laporan				1 Laporan	113.213.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	254.000.000		12.174.000	100%	59.135.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan				1 Laporan	59.135.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			71.620.000.000		12.935.011.868		11.566.060.368
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100%	27.221.000.000		5.604.901.249	100%	9.225.030.468
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%				100 %	15.400.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	dokumen				1 dokumen	5.578.800.868
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%				100 %	23.466.800
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan makanan minuman untuk memfasilitasi kunjungan tamu sesuai kebutuhan	%				100 %	264.953.850
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%				100 %	3.146.371.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%				100 %	165.747.950
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%				100 %	30.290.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	1.787.000.000		466.001.200	100%	342.201.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	laporan				1 laporan	88.935.400
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	laporan				1 laporan	253.265.600
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	38.694.000.000		6.562.369.819	100%	6.685.099.172
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	laporan				1 laporan	48.093.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	laporan				1 laporan	50.876.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	laporan				1 laporan	1.576.129.900
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	3.844.000.000		101.700.000	100%	106.800.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	laporan				1 laporan	106.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	74.000.000		200.039.600	100%	216.930.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%				100 %	216.930.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
7	01				<b>KECAMATAN</b>			5.447.000.000		2.748.745.953		2.641.868.325
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Urusan Daerah Tingkat Kecamatan</b>	100%	3.221.000.000		2.053.393.653	100%	2.076.522.125
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja	laporan				1 laporan	5.560.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	tahun				1 tahun	1.733.843.315
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	%				100 %	85.569.826
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit				10 unit	86.846.800
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				1 laporan	35.140.184
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan				1 Laporan	129.562.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Pub;ik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	78.000.000		381.842.700	100%	229.613.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Laporan				1 Laporan	73.415.800
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Pub;ik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	laporan				1 laporan	156.197.200
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	572.000.000		48.366.800	80%	3.780.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan				1 Laporan	3.780.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	1.248.000.000		65.182.800	100%	71.100.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan Monitoring dan Koordinasi	bulan				12 bulan	71.100.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	74.000.000		199.960.000	100%	212.990.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Honor Tim Satgas Covid -19	kali				2 kali	212.990.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	254.000.000		0	100%	47.863.200
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	laporan				1 laporan	47.863.200
8					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>							
8	01				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			85.372.000.000		15.054.913.170		22.593.003.244
8	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	22.635.000.000		3.913.923.670	100%	5.155.389.744
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	%				100 %	138.432.200
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen keuangan SKPD	100 %				100 %	3.892.927.770
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %				100 %	24.668.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %				100 %	387.525.354
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen				1 Dokumen	628.160.515
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen				1 Dokumen	52.197.905
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen				1 Dokumen	31.477.600
8	01	02			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila</b>	<b>90%</b>	<b>5.303.000.000</b>		<b>385.465.100</b>	<b>90%</b>	<b>528.027.500</b>
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun	Dokumen				1 Dokumen	528.027.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	72%	15.553.000.000		2.088.881.200	72%	3.949.427.500
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun	Dokumen				1 Dokumen	3.949.427.500
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Ormas Aktif	90%	10.226.000.000		1.942.067.100	90%	3.677.413.600
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	Dokumen				1 Dokumen	3.677.413.600
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Prosentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Yang Terfasilitasi	90%	2.117.000.000		501.969.200	90%	566.970.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun	Dokumen				1 Dokumen	566.970.000
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Penurunan Konflik Sosial</b>	100%	29.538.000.000		6.222.606.900	100%	8.715.774.900
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun	Dokumen				1 Dokumen	8.715.774.900
					<b>TOTAL</b>			<b>23.635.578.167.265</b>		<b>4.605.978.150.911</b>		<b>5.094.111.912.397</b>

<b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja:</b>	Sudah terintegrasinya Sistem Informasi Perencanaan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah
---	--

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	
1	2	3	4	5	U,P,K,SK	IK_U,P,K,SK	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Faktor penghambat pencapaian kinerja:</b>					<p>Belum adanya integrasi Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Pembangunan untuk mempermudah evaluasi baik pelaksanaan kegiatan RKPD maupun dengan sistem Informasi pelaporan lainnya</p> <p>Perencanaan anggaran dan target kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya dapat didanai dalam APBD</p> <p>Adanya perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, setelah RKPD ditetapkan</p>							
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:</b>					<p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan APBD dan pencapaian kinerja RPJMD pada tahun 2022 dan sisa pencapaian target yang belum tercapai sampai akhir periode RPJMD tahun 2021 sehingga dapat dilakukan percepatan pencapaian target kinerja</p> <p>Melakukan penyesuaian rencana dan target kinerja terhadap adanya perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dalam perubahan RKPD, perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra</p>							
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:</b>					<p>Melakukan integrasi Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Pembangunan untuk mempermudah evaluasi baik pelaksanaan kegiatan RKPD maupun dengan sistem Informasi pelaporan lainnya</p>							